

Sokhi Huda | Hesty Putri Utami | Ahsanul Izzah | Farah Najela | Mochammad Afif Jalla
Dina Rahmawati | M. Ruf'ul Athfal | Ali Murtadlo | Andik Khoirul Iman |
Fidaul Qonita | Lalu Mirwazi | Mohamad Febrianto

ISU DAN SOLUSI DAKWAH KONTEMPORER



ISU DAN SOLUSI DAKWAH KONTEMPORER

Penulis:

Sokhi Huda
Hesty Putri Utami
Ahsanul Izzah
Farah Najela
Mochammad Afif Jalla
Dina Rahmawati
M. Ruf'ul Athfal
Ali Murtadlo
Andik Khoirul Iman
Fidaul Qonita
Lalu Mirwazi
Mohamad Febrianto

Editor:

Dr. Imam Maksun, M.Ag.
Rozaqul Arif, M.Sos.I.



CAKRAWALA
SATRIA MANDIRI

PENERBIT CAKRAWALA SATRIA MANDIRI

ISU DAN SOLUSI DAKWAH KONTEMPORER

Penulis: Sokhi Huda, Hesty Putri Utami, Ahsanul Izzah,
Farah Najela, Mochammad Afif Jalla, Dina
Rahmawati, M. Ruf'ul Athfal, Ali Murtadlo,
Andik Khoirul Iman, Fidaul Qonita, Lalu Mirwazi,
Mohamad Febrianto

Editor: Dr. Imam Maksum, M.Ag., Rozaqul Arif, M.Sos.I.

Perancang Sampul: M. Yusuf

DOI: 10.5281/zenodo.15413041

Hak Penerbit pada Cakrawala Satria Mandiri
Anggota IKAPI (No. 186/JTE/2020)

PENERBIT

CV. CAKRAWALA SATRIA MANDIRI

Pliken RT.04 / RW.09, Kembaran, Banyumas

Jl. Pesantren XII No.03, Pesantren, Kota

Kediri Telp : 08155525121

Email : redaksi.satria@gmail.com

PEMASARAN

CAKRAWALA, Jl. Brigjend Pol Imam Bahri No.

129, Pesantren, Kota Kediri

Telp/Fax. 0354.7418363

Email: cakrawalasatria@gmail.com

www.cakrawalasatria.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-634-7293-05-3

ISBN (EPUB) : 978-634-7293-06-0

Cetakan Pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer* ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini merupakan buah pemikiran kolektif dari para akademisi dan praktisi dakwah yang berupaya merespons berbagai tantangan dan dinamika dakwah Islam di era kontemporer. Di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial yang terus bergerak, dakwah Islam dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga transformatif dan solutif.

Buku ini disusun dengan pendekatan faktual dan reflektif melalui studi kasus aktual dari beragam konteks sosial, budaya, politik, hingga spiritual. Mulai dari isu Islamofobia di kancah global, problem pluralisme dan intoleransi di masyarakat multikultural, dinamika hijrah generasi milenial, kontroversi gender dalam dakwah, hingga peran dakwah dalam isu lingkungan hidup, kesehatan mental, ekonomi syariah, budaya populer, dan gerakan transnasional. Setiap bab ditulis dengan pijakan ilmiah yang kuat dan sensitivitas terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk menjembatani antara teks dan konteks, antara tradisi keilmuan Islam dan realitas kekinian. Dakwah yang hanya bersandar pada narasi normatif semata tidak lagi memadai di tengah derasnya arus perubahan. Karena itu, diperlukan reformulasi paradigma dakwah yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dalam semangat tersebut, buku ini menegaskan bahwa dakwah tidak hanya menyampaikan pesan moral tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para dai, pengajar, peneliti, dan pembaca umum yang memiliki kepedulian terhadap masa depan dakwah Islam. Semoga ikhtiar kecil ini memberi kontribusi nyata dalam upaya membangun peradaban Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Surabaya, 9 Mei 2025

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Bagian Pertama: Pendahuluan	3
Bagian Kedua: Pembacaan Kritis	
1. Spektrum Isu dan Transformasi Dakwah Kontemporer <i>Sokhi Huda</i>	9
Bagian Ketiga: Isu dan Solusi	
2. Islamofobia dan Tantangan Dakwah Global <i>Ahsanul Izzah</i>	17
3. Dakwah di Kalangan Milenial dan Gen Z: Menghadapi Fenomena Gerakan Hijrah sebagai Antisipasi Pemahaman Islam Eksklusif <i>Farah Najela</i>	25
4. Pluralisme dan Dakwah di Masyarakat Multikultural: Studi Kasus Pembakaran Masjid Ahmadiyah <i>Mochammad Afif Jalla</i>	41
5. Ruang dan Rintangan: Dinamika Perempuan dalam Dakwah Kontemporer <i>Dina Rahmawati</i>	57
6. Dakwah dan Isu Lingkungan <i>M. Ruf'ul Athfal</i>	69
7. Dakwah di Dunia Politik dan Pemerintahan <i>Ali Murtadlo</i>	77
8. Ekonomi Islam dan Dakwah: Tantangan Kapitalisme dalam <i>Booming</i> Industri Halal Global <i>Hesty Putri Utami</i>	93
9. Dakwah dan Kesehatan Mental di Era Modern: Permasalahan <i>Burnout</i> di Kalangan Santri dan Ustadz di Lingkungan Pesantren <i>Andik Khoirul Iman</i>	113
10. Dakwah di Dunia Hiburan dan Budaya Populer: Fenomena Nasyid dan Musik Islami di Indonesia	

<i>Fidaul Qonita</i>	125
11. Gerakan Dakwah Transnasional dan Pengaruhnya <i>Lalu Mirwazi</i>	137
12. Dakwah dalam Balutan Hiburan: Analisis Kritis atas Komersialisasi Anak dalam Program Hafiz Indonesia <i>Mohamad Febrianto</i>	153
Bagian Keempat: Penutup	
Refleksi dan Rekomendasi atas Dinamika Dakwah Kontemporer.....	173
Daftar Pustaka	175
Glosarium	191
Biodata Penulis	195

BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Dakwah Islam, dalam lintasan sejarahnya, merupakan aktivitas penyampaian ajaran sekaligus medan dialektika antara teks dan konteks. Ia terus bergulat dengan dinamika zaman, menantang ketertinggalan, dan menawarkan jawaban atas problem-problem sosial umat manusia. Buku ini, *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer*, merupakan ikhtiar intelektual untuk membongkar kepingan-kepingan realitas dakwah di era kontemporer: era yang ditandai oleh ledakan informasi, transkulturalisme, krisis identitas, dan percepatan digitalisasi.

Dalam lanskap seperti itu, dakwah tidak lagi bisa dibatasi pada pendekatan normatif-dogmatis. Ia dituntut untuk menjadi wacana yang reflektif, kontekstual, dan transformatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdulaziz Sachedina, dakwah masa kini mesti bergerak dari “eksklusivisme teologis” menuju “komitmen etik yang mampu menjawab tantangan pluralitas dan keadilan sosial global” (Sachedina, 2001, p. 27)

Buku ini disusun oleh sekelompok akademisi muda dari Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan pendekatan studi kasus dan analisis kontekstual, mereka membedah isu-isu aktual dakwah, mulai dari Islamofobia global, gerakan hijrah generasi milenial, pluralisme keagamaan, peran perempuan dalam dakwah, hingga tantangan ekologi, kesehatan mental, ekonomi halal, serta komersialisasi dakwah dalam budaya populer. Setiap bagian menyuguhkan potret realitas dan berusaha merekonstruksi kerangka respons dakwah yang lebih etis, inklusif, dan partisipatoris. Inilah semangat utama buku ini: menyajikan dakwah sebagai praksis kritis, bukan sekadar doktrin.

Sebagaimana dicatat oleh Louay M Safi dalam *Islam and the Trajectory of Globalization*, Islam abad ini, melalui dakwahnya, harus “mampu menavigasi arus globalisasi dan membangun konektivitas lintas budaya, tanpa kehilangan otentisitas nilai-nilainya” (Safi, 2022, p. 281). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena hadirnya polarisasi politik keagamaan, tekanan dari ideologi transnasional, dan kemunculan spiritualitas baru yang kerap mengaburkan batas antara agama, hiburan, dan pasar.

Buku ini secara kritis memperlihatkan bahwa dakwah kontemporer bukanlah wilayah yang steril dari konflik ideologis dan tarik-menarik kepentingan sosial-politik. Sebaliknya, ia merupakan arena pertarungan makna, di mana setiap narasi keagamaan bersaing membentuk kesadaran publik. Seperti diungkap oleh Martin Nguyen, “*Islam and the Praxis of Gratitude: Shukr from Divine Orientations to the Structures of the Social*” dalam *A Theology of Gratitude: Christian and Muslim Perspectives*, bahwa teologi Islam memiliki implikasi sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim (Siddiqui & Vette, 2022, p. 131).

Lebih jauh, refleksi dakwah kontemporer juga menyentuh soal metodologi dan epistemologi dakwah itu sendiri. Dakwah bukan sekadar kegiatan komunikasi satu arah, melainkan konstruksi dialogis yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur’ani dengan kebutuhan kontekstual audiens. Fazlur Rahman menekankan bahwa pendekatan Islam terhadap perubahan sosial harus berakar pada “*ethical hermeneutics*” yang menekankan *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan moral hukum Islam) (Rahman, 2017, pp. 16–17).

Buku ini juga memberikan penekanan pada pentingnya *digital literacy* dalam dakwah. Era media sosial telah melahirkan medan dakwah baru, namun sekaligus membawa

tantangan berupa banalitas spiritual, fragmentasi pesan, dan radikalisasi berbasis algoritma. Karenanya, strategi dakwah digital yang dirumuskan dalam buku ini menjadi krusial dalam membangun narasi Islam yang damai, adil, dan humanis di dunia digital yang hiperrealitas.

Kritik terhadap pemahaman Islam eksklusif yang menjangkiti sebagian gerakan hijrah, misalnya, menjadi salah satu refleksi penting. Dalam hal ini, Khaled Abou El Fadl mengingatkan bahwa “*Authoritarian discourses in Islam suppress the moral agency of believers*” (Abou El Fadl, 2005, p. 45).

Akhirnya, buku ini menawarkan gambaran persoalan dan solusi konkret: dakwah yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, *gender equality*, keberlanjutan ekologis, kesehatan jiwa, dan literasi ekonomi Islam yang etis. Semua itu diramu dalam narasi yang bersandar pada warisan klasik Islam, namun dengan sensitivitas terhadap krisis kemanusiaan masa kini. Dengan demikian, buku *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer* ini merupakan kompendium akademik sekaligus seruan moral bagi para pendakwah, peneliti, dan pemangku kebijakan dakwah untuk membangun strategi dakwah yang visioner, berdampak, dan memuliakan martabat insani.

BAGIAN KEDUA
PEMBACAAN KRITIS

SPEKTRUM ISU DAN TRANSFORMASI DAKWAH KONTEMPORER

Sokhi Huda

Dakwah merupakan pilar utama dalam peradaban Islam, namun praktik dan strateginya tidaklah monolitik. Perubahan zaman menuntut pembaruan pendekatan dakwah agar tetap relevan dengan tantangan kontemporer. Buku ini, *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer*, hadir sebagai respons terhadap berbagai fenomena sosial, politik, budaya, dan spiritual yang sedang dihadapi oleh umat Islam, baik di tingkat lokal maupun global.

Salah satu isu sentral yang diangkat adalah *Islamofobia dan Tantangan Dakwah Global*, sebagaimana dibahas oleh Ahsanul Izzah. Ia menyoroti kasus larangan hijab di sekolah negeri Prancis yang memantik gelombang protes dari umat Islam dunia. Kasus ini menunjukkan bahwa dakwah global kini menghadapi tantangan struktural dalam membangun citra Islam yang moderat di tengah dominasi narasi negatif Barat. Seperti yang dikemukakan oleh Esposito, “*Islamophobia is not only a matter of public sentiment but a structural challenge to Muslim presence in secular democracies*” (Esposito & Kalin, 2011, p. 87).

Di ranah domestik, tantangan dakwah juga hadir dalam relasi antara Islam dan keberagaman. Mochammad Afif Jalla, dalam tulisannya mengenai *Pluralisme dan Dakwah di Masyarakat Multikultural*, membedah kasus pembakaran masjid Ahmadiyah di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana dakwah masih perlu menekankan toleransi dan penerimaan terhadap keragaman mazhab dan kelompok dalam Islam. Sebagaimana

dinyatakan An-Na'im, "*Pluralism is essential for both religious and civic peace*" (An-Na'im, 2008, p. 145).

Generasi muda menjadi perhatian tersendiri dalam dakwah era digital. Farah Najela membahas *Dakwah di Kalangan Milenial dan Gen Z* melalui studi kasus fenomena hijrah artis Indonesia, seperti Teuku Wisnu dan Arie Untung. Gerakan ini mengindikasikan kebangkitan kesadaran spiritual, namun juga menimbulkan risiko radikalisasi jika tidak diarahkan dengan bijak. Menurut Abou El Fadl, "*The danger of authoritarian Islam lies in its capacity to suppress pluralism within the faith itself*" (Abou El Fadl, 2005, p. 53).

Aspek gender dalam dakwah dikaji secara kritis oleh Dina Rahmawati dalam topik *Perempuan dalam Dakwah Kontemporer*. Ia menganalisis kontroversi Ustazah Oki Setiana Dewi yang pernah menyatakan bahwa istri tetap harus taat meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kontroversi ini membuka ruang diskusi tentang pentingnya perspektif keadilan gender dalam wacana dakwah. Amina Wadud menegaskan bahwa "*Gender justice is not a Western imposition, but a Qur'anic imperative*" (Wadud, 1999, p. 11).

Dimensi ekologi dalam dakwah ditawarkan oleh M. Ruf'ul Athfal melalui pembahasan tentang *Dakwah dan Isu Lingkungan (Eco-Theology)*. Ia mengangkat krisis air bersih di Gaza akibat blokade Israel sebagai titik tolak untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki tanggung jawab ekologis yang kuat. Richard Foltz menyatakan bahwa "*Islamic environmental ethics must reconnect the spiritual with the ecological*" (Foltz, 2005, p. 35).

Dalam lanskap politik, Ali Murtadlo membahas *Dakwah di Dunia Politik dan Pemerintahan*, dengan menyoroti dinamika gerakan Front Pembela Islam (FPI) di bawah kepemimpinan Habib Rizieq. Pendekatan dakwah FPI yang konfrontatif menimbulkan pro-kontra, dan menjadi refleksi tentang batas-batas etika antara dakwah moral dan dakwah politis.

Transformasi ekonomi berbasis syariah dibahas oleh Hesty Putri Utami dalam topik *Ekonomi Islam dan Dakwah: Tantangan Kapitalisme*, dengan fokus pada fenomena *booming* industri halal di Jepang dan Korea Selatan. Dakwah Islam turut berperan dalam promosi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, namun juga menghadapi tantangan pasar kapitalis global.

Andik Khoirul Iman mengangkat tema *Dakwah dan Kesehatan Mental di Era Modern*, dengan studi kasus *burnout* di kalangan santri dan ustadh. Ia menyoroti perlunya pendekatan dakwah yang integratif antara nilai keislaman dan psikologi modern untuk menjawab krisis kesehatan di pesantren.

Fenomena budaya populer juga menjadi medan dakwah, sebagaimana dijelaskan oleh Fidaul Qonita dalam topik *Dakwah di Dunia Hiburan dan Budaya Populer*. Ia menelaah tren nasyid dan musik Islami serta polemik hukum musik dalam Islam. Dakwah melalui budaya populer menjadi dilema antara efektivitas pesan dan batas-batas syar'i.

Di bagian lain, Lalu Mirwazi membahas Gerakan *Dakwah Transnasional dan Pengaruhnya*, dengan studi tentang gerakan Salafi di Indonesia. Gerakan ini membawa nuansa puritan, namun juga menimbulkan tantangan integrasi dengan konteks sosial-politik Indonesia yang plural.

Sebagai penutup, Mohamad Febrianto melakukan *Evaluasi dan Refleksi Dakwah Kontemporer*, dengan meninjau efektivitas program-program dakwah televisi seperti "Hafiz Indonesia". Ia menyoroti sisi positif dalam upaya memopulerkan al-Qur'an, namun juga mengkritisi potensi komersialisasi dakwah yang menjauh dari nilai ruhani.

Seluruh bab dalam buku ini disusun berdasarkan pendekatan studi kasus yang faktual dan analitis. Dengan menampilkan isu-isu aktual beserta solusi berbasis nilai-nilai Islam, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para da'i, akademisi, dan pemerhati dakwah dalam merancang strategi yang lebih kontekstual, humanis, dan solutif di era modern.

Fenomena dakwah kontemporer tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi, digitalisasi, serta transformasi sosial yang terus berlangsung. Para dai saat ini dituntut mahir dalam aspek teologis dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami kompleksitas medan dakwah masa kini.

Selain itu, tantangan kontemporer juga memunculkan kebutuhan akan respons teologis yang normatif sekaligus transformatif. Dakwah tidak lagi cukup hanya menyampaikan pesan moral tetapi juga menjadi agen perubahan sosial. Dengan mempertimbangkan pemikiran Fazlur Rahman, dakwah yang progresif harus mampu menawarkan solusi terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Rahman menekankan, bahwa Islam tidak cukup hanya dipahami secara tekstual-formal tetapi harus dikembangkan sebagai sistem etika yang dapat mengarahkan transformasi sosial. Ia menyatakan juga, bahwa syari'ah dan ajaran Islam harus dikembangkan untuk menghadirkan keadilan sosial dan menanggapi ketimpangan dalam masyarakat modern (Rahman, 2017, pp. 17–22, 147–150).

Buku ini berupaya memberikan peta wacana yang utuh tentang problematika dan respons dakwah kontemporer, dengan cara memadukan refleksi akademik dan realitas kasuistik. Setiap bagian pembahasan diupayakan untuk mendeskripsikan fenomena serta mengevaluasi dan mengusulkan strategi yang relevan bagi pelaku dakwah.

Lebih jauh, pendekatan dakwah yang partisipatoris dan berbasis komunitas menjadi tuntutan di tengah lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan formal. Gerakan dakwah berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh komunitas HijrahFest atau pengajian komunitas urban, memperlihatkan bahwa ruang-ruang spiritual saat ini bertransformasi menjadi arena dialog identitas dan solidaritas sosial.

Pendekatan dakwah kontemporer yang berakar pada spiritualitas dan moralitas, sebagaimana ditawarkan dalam tradisi sufistik, menjadi semakin relevan untuk mengatasi krisis nilai dan identitas umat di era modern. Sokhi Huda menunjukkan bahwa dakwah sufistik, seperti yang dikembangkan oleh Fethullah Gülen melalui gerakan Hizmet, mampu membangun jembatan antara spiritualitas Islam dan tuntutan kehidupan sosial modern dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang sebagai fondasi dakwah yang transformative (Huda, 2017, pp. 325–326).

Lebih jauh, dalam artikelnya yang lain, Sokhi Huda menegaskan pentingnya reformulasi paradigma dakwah yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, melainkan juga kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menyatakan bahwa ‘pendekatan dakwah harus mengalami evolusi seiring perubahan sosial agar tetap menjadi kekuatan transformasi yang relevan dalam kehidupan masyarakat modern’ (Huda, 2008, p. 4).

Dalam konteks pasca pandemi, reformulasi paradigma dakwah juga menjadi sangat krusial. Dalam tulisannya ‘Reformulasi Paradigma Dakwah dan Komunikasi di Era Pos-Pandemi’, Ries Dyah Fitriyah dkk menyoroti pentingnya pendekatan dakwah yang lebih humanis, partisipatoris, dan *digital-friendly*. Menurutnya, pandemi COVID-19 telah membuka mata para pelaku dakwah tentang urgensi pemanfaatan media digital, dialog lintas iman, dan empati sosial sebagai bagian dari misi dakwah Islam yang signifikan (Fitriyah et al., 2022, pp. 209–210).

Pada akhirnya, kehadiran buku ini diharapkan menjadi kontribusi intelektual yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, serta antara dakwah sebagai ajaran dan dakwah sebagai praksis sosial.

BAGIAN KETIGA
ISU DAN SOLUSI

ISLAMOFOBIA DAN TANTANGAN DAKWAH GLOBAL

Ahsanul Izzah

ISU

Islamofobia merupakan bentuk prasangka negatif terhadap Islam dan umat Muslim yang termanifestasi dalam sikap diskriminatif, penolakan sosial, serta kekerasan simbolik maupun verbal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara Barat tetapi juga telah merambah ke Indonesia. Ironisnya, di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini, narasi Islamofobia justru berkembang melalui media, dinamika politik, serta interaksi sosial di ruang publik digital. Dalam konteks Indonesia, ruang digital menjadi arena utama pembentukan opini publik mengenai Islam dan umat Muslim. Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Menteri Agama, menyatakan bahwa media sosial telah memfasilitasi kelompok Islamis dalam memproduksi serta menyebarkan wacana keislaman yang sering kali menyimpang dari konsensus kebangsaan. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah seperti pembubaran ormas yang dianggap radikal, narasi Islam yang dikaitkan dengan radikalisme tetap menyebar luas dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Islamofobia di Indonesia tidak selalu berasal dari luar, tetapi juga tumbuh dari dalam tubuh umat Islam melalui konflik ideologis, persaingan antarorganisasi, dan polarisasi politik internal. Perbedaan pandangan antarkelompok Islam sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketegangan, yang memperkuat persepsi bahwa Islam bersifat eksklusif dan intoleran (Abdillah & Putri, 2022).

Fenomena Islamofobia memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa para guru agama sering kali mengalami stigmatisasi dan pembatasan dalam menyampaikan materi yang dianggap sensitif, seperti topik jihad, khilafah, dan sejarah Islam. Ketakutan terhadap radikalisasi menyebabkan ruang akademik—yang seharusnya mendukung pembentukan sikap keagamaan yang terbuka dan kritis—menjadi semakin sempit (Azizah et al., 2025).

Jika kondisi ini terus berlanjut, akan muncul ketakutan dalam mengekspresikan identitas keislaman secara utuh, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi menimbulkan alienasi religius, yang pada gilirannya dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama secara menyeluruh. Hi Asnawi (2020) menegaskan bahwa media sosial turut memperburuk kecenderungan ini melalui praktik ujaran kebencian, pelabelan, serta ketidaksantunan berbahasa terhadap simbol-simbol Islam, yang memperkuat stigma negatif terhadap identitas keagamaan.

Islamofobia kerap dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk memengaruhi opini publik serta mendiskreditkan kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan narasi dominan negara. Narasi ini berfungsi memperkuat hegemoni ideologi Pancasila dan menjadi strategi preventif terhadap munculnya paham keagamaan yang dipandang bertentangan dengan semangat nasionalisme. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara aspirasi keagamaan umat Islam dan batas-batas ideologis yang dibentuk oleh negara (Aryati et al., 2024).

Politisasi Islamofobia juga tampak melalui pelabelan sepihak terhadap kelompok atau tokoh Islam sebagai “radikal” atau “anti-NKRI” tanpa didukung oleh kajian akademik yang objektif. Kebijakan represif semacam ini justru memperlebar jurang kepercayaan antara umat Islam dan institusi negara, sekaligus memperparah segregasi sosial dan ideologis dalam masyarakat (Syahda et al., 2024).

Dalam perspektif dakwah, kondisi ini merupakan tantangan yang signifikan. Umat Islam tidak cukup hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan dakwah yang dialogis, inklusif, dan komunikatif. Dakwah kontemporer harus mampu merespons kegelisahan publik, membongkar stereotip, dan menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang majemuk. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nahl: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْذَبِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan pendekatan yang lembut, agar Islam tampil sebagai solusi atas krisis moral dan sosial yang dipicu oleh Islamofobia.

STRATEGI DAN SOLUSI DAKWAH

1. Penguatan Pendidikan Spiritual dan Moderasi Beragama

Dalam menghadapi tantangan Islamofobia yang semakin meluas, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang moderat dan toleran. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai spiritual, etika Islam, serta pendekatan moderasi diyakini mampu membangun pemahaman keislaman yang komprehensif sekaligus mencegah munculnya pola pikir ekstrem maupun eksklusif. Apriliyana dkk. (2023) menyatakan bahwa pendidikan agama yang berlandaskan pada nilai-nilai moderasi berperan penting dalam menumbuhkan sikap toleran dan pemahaman yang inklusif terhadap Islam, sehingga dapat menekan tingkat Islamofobia di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan

spiritual berbasis moderasi beragama merupakan strategi dakwah yang efektif untuk meredam dampak negatif Islamofobia di Indonesia (Syahda et al., 2024).

Hal tersebut sejalan dengan perintah al-Qur'an dalam Q.S. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan identitas sosial bukanlah dasar untuk permusuhan, melainkan fondasi bagi saling pengertian dan kerja sama. Dalam konteks dakwah, ayat ini memberikan landasan teologis bagi pentingnya hidup berdampingan, menjalin dialog, serta menjauhkan diri dari sikap saling mencurigai yang menjadi benih Islamofobia.

2. Dakwah yang Kontekstual dan Dialogis

Dalam menyikapi perubahan zaman yang cepat serta kompleksitas masyarakat modern, dakwah Islam dituntut untuk dilakukan secara kontekstual. Artinya, dakwah tidak hanya menyampaikan nilai-nilai teologis secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan psikologis dari masyarakat yang menjadi objek dakwah. Pendekatan ini merujuk pada prinsip dasar dalam Q.S. al-Nahl: 125 yang menyatakan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan kebijaksanaan, pelajaran yang baik, dan perdebatan yang santun. Pesan tersebut mengandung arahan bahwa dakwah tidak boleh bersifat memaksa, tetapi perlu membangun suasana

dialog yang menghargai perbedaan dan mendorong pemahaman timbal balik.

Dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, dakwah Islam harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan karakteristik budaya lokal. Pesan-pesan keagamaan tidak dapat disampaikan secara monolitik, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan resistensi. Hal ini menuntut pendakwah untuk tidak hanya memahami teks-teks agama, tetapi juga memiliki wawasan sosial dan keterampilan komunikasi lintas budaya. Pendekatan seperti ini akan menciptakan dialog yang sehat dan memperkuat semangat kebersamaan di tengah perbedaan yang ada (Hidayat, 2013).

Kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi penyebaran dakwah secara lebih luas dan efektif. Media sosial memungkinkan dai untuk menyampaikan pesan agama secara langsung, interaktif, dan real-time kepada audiens yang beragam, terutama kalangan muda. Melalui konten dakwah yang menarik dan komunikatif, pesan Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat yang kini sangat akrab dengan dunia digital. Namun, pendakwah juga harus memahami karakteristik masing-masing platform digital agar konten yang disampaikan tetap relevan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman (Nitah, 2024)

Strategi dakwah modern tidak hanya membutuhkan pendekatan dialogis, tetapi juga inklusivitas dalam menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan. Pendekatan yang terbuka dan non-dogmatis diyakini mampu meredakan ketegangan serta membangun rasa saling percaya antara pendakwah dan audiens. Dakwah yang memberi ruang bagi diskusi dua arah juga mendorong masyarakat untuk aktif berpikir dan berkontribusi dalam memahami nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dakwah tidak menjadi alat indoktrinasi semata, melainkan sarana membangun kesadaran kolektif (Zafri et al., 2023).

3. Pemanfaatan Media Digital secara Bijak

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah dakwah secara signifikan. Media digital, khususnya media sosial, kini menjadi kanal utama dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat luas. Karakteristik media sosial yang bersifat interaktif dan masif memungkinkan pesan dakwah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batas geografis. Dalam hal ini, pemanfaatan media digital menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan. Namun, penggunaan media ini harus disertai dengan kebijaksanaan, agar dakwah tidak kehilangan arah dan justru menjadi alat provokasi atau penyebar kebencian.

Perkembangan media sosial menuntut dai dan institusi keagamaan untuk hadir di ruang digital dengan pendekatan yang lebih interaktif dan responsif. Penyampaian pesan agama harus disesuaikan dengan karakteristik media, termasuk penggunaan bahasa yang komunikatif serta visual yang menarik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dakwah, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemuka agama dan masyarakat secara lebih terbuka. Sebagaimana diuraikan oleh Hasbi & Fadillah (2024), pemanfaatan media sosial dalam dakwah membuka peluang besar untuk menjangkau generasi muda dan mengatasi stigma negatif terhadap Islam, asalkan dilakukan dengan strategi komunikasi yang bijak dan tidak provokatif (Hasbi & Fadillah, 2024).

Selain sebagai media penyebaran pesan keagamaan, *platform* digital berperan penting dalam membentuk opini publik tentang Islam. Ketika pesan dakwah disampaikan dengan cara yang santun, inklusif, dan menghargai keberagaman, citra Islam sebagai agama yang damai dan *rahmatan lil 'alamin* akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Untuk itu, konten dakwah di media sosial perlu dirancang secara cermat agar tidak hanya komunikatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam Islam (Syahda et al., 2024).

4. Penguatan Solidaritas Lintas Agama dan Budaya

Tantangan Islamofobia yang bersifat multidimensional tidak dapat dihadapi hanya dengan pendekatan internal umat Islam. Dakwah yang eksklusif justru dapat memperkuat sekat-sekat sosial dan memperlebar jarak dengan komunitas lain. Dalam konteks masyarakat yang plural, penguatan solidaritas lintas agama dan budaya menjadi langkah strategis untuk membangun kohesi sosial. Q.S. al-Mumtahanah: 8 menjelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi atau mengusir kaum Muslim dari tempat tinggalnya. Nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kedamaian antarumat manusia, terlepas dari perbedaan keyakinan (Ramadhani et al., 2025).

Kolaborasi lintas iman dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti kegiatan sosial bersama, kampanye toleransi, atau forum dialog antaragama. Pendekatan ini bukan hanya simbolik, tetapi memiliki efek konkret dalam membangun kepercayaan lintas kelompok. Ketika umat beragama bekerja sama dalam isu-isu kemanusiaan seperti pendidikan, kesehatan, atau bencana alam, mereka tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga meruntuhkan prasangka yang selama ini dibangun oleh narasi Islamofobia. Syahda et al. (2024) menekankan pentingnya dakwah yang inklusif dan tidak menghakimi, sehingga dapat diterima dalam ruang publik yang heterogen (Syahda et al., 2024).

Lebih jauh, solidaritas lintas agama tidak berarti mengaburkan identitas keagamaan, tetapi justru mempertegas nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Dakwah dalam konteks ini berfungsi sebagai jembatan antara komunitas Muslim dengan kelompok lain, membangun ruang bersama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Hasbi & Fadillah (2024) menunjukkan bahwa strategi dakwah yang mengedepankan nilai-nilai humanis dan komunikasi yang dialogis mampu meredakan sentimen negatif terhadap Islam, sekaligus memperluas pengaruh positif dakwah di tengah masyarakat plural (Hasbi & Fadillah, 2024).

REFLEKSI

Fenomena Islamofobia merupakan tantangan multidimensi yang tidak hanya berdampak pada citra Islam secara global, tetapi juga memengaruhi identitas keagamaan umat Muslim, khususnya dalam konteks sosial-politik dan budaya di Indonesia. Refleksi terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa Islamofobia bukan sekadar persoalan eksternal yang datang dari luar komunitas Muslim, melainkan juga diperparah oleh disintegrasi internal, konflik ideologis, serta pemanfaatan agama dalam kontestasi politik.

Dalam konteks dakwah, tantangan ini menuntut pergeseran pendekatan dari yang semata normatif menjadi lebih dialogis, kontekstual, dan inklusif. Dakwah tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga perlu hadir sebagai ruang edukatif, komunikatif, dan transformatif yang mampu merespons prasangka sosial secara bijak dan konstruktif. Hal ini mencerminkan pentingnya peran strategis komunikasi dakwah dalam membangun narasi Islam yang damai, toleran, dan adaptif terhadap keberagaman.

Kesadaran kolektif akan pentingnya moderasi beragama, pemanfaatan media digital secara bijak, serta penguatan kolaborasi lintas agama dan budaya menjadi elemen krusial dalam menanggulangi dampak Islamofobia. Dakwah yang diarahkan pada penguatan pemahaman keislaman yang *rahmatan lil 'alamin* berpotensi merekonstruksi kembali citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Pada kesadaran yang mendalam, dakwah Islam pada era kontemporer perlu terus ditumbuhkembangkan sebagai sarana membangun ketahanan identitas, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan ruang dialog yang sehat di tengah masyarakat majemuk. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi keilmuan dan keagamaan dalam menghadirkan Islam sebagai solusi atas berbagai bentuk diskriminasi dan stigmatisasi yang berkembang di era global.

DAKWAH DI KALANGAN MILENIAL DAN GEN Z

Menghadapi Fenomena Gerakan Hijrah sebagai Antisipasi Pemahaman Islam Eksklusif

Farah Najela

ISU

Hijrah adalah salah satu terminologi penting dalam islam. Pada awalnya hijrah merujuk pada migrasi Rasulullah SAW dengan pengikutnya dari Mekkah ke Madinah dengan menghindari opresi kaum kafir Quraisy. Secara etimologi “hijrah” diartikan sebagai pergeseran orang atau sekelompok orang dari suatu kawasan ke kawasan lain. Sedangkan berdasarkan istilah dalam perspektif peristiwa sejarah dalam Islam, hijrah bermakna keberangkatan atau perpindahan lahan dakwah Rasulullah Muhammad saw. Dari Makkah ke daerah Yasrib atau Madinah pada tahun ke-13 bi'tsah (penegasan kenabian). Pemberangkatan dari Makkah terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 27 Shafar (12 September 622 M), dan tiba di Yatsrib hari Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awwal (27 September 622 M). Hakikat dari hijrah Rasulullah ini merupakan upaya mencapai kawasan baru yang lebih potensial dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam (Notonegoro, 2023).

Dalam konteks modern, hijrah saat ini diartikan dengan konteks serta kebutuhan kelompok. Dengan begitu, level pemaknaannya bergantung pada tipologi ideology kelompok (Windi Triyana, 2021). Hijrah mengalami perluasan makna dan mengemban misi yang lebih substantive dengan menjadi perpindahan perilaku atau perbuatan dari yang dipandang tidak atau kurang islami menjadi yang lebih islami. Kemudian,

ditandai dengan fenomena perubahan seorang muslim menjadi sosok yang lebih religious. Fenomena gerakan hijrah kerap kali terjadi di kalangan artis Indonesia yang salah satu contohnya dilakukan oleh Teuku Wisnu dan Ari Untung. Gerakan ini tidak hanya sekadar perubahan penampilan atau gaya hidup, tetapi juga menunjukkan pencarian spiritual yang lebih dalam dari individu-individu dalam masyarakat. Ketertarikan generasi milenial terhadap Islam, sebagaimana terlihat dalam gerakan hijrah ini, sering kali dipicu oleh krisis identitas yang mereka alami di tengah modernitas dan nilai-nilai sekuler yang dominan. Teuku Wisnu dan Ari Untung, yang telah mengubah pandangan hidup mereka menuju nilai-nilai Islam, kini menjadi simbol bagi banyak orang yang ingin menelusuri jalan yang sama menuju kesadaran spiritual dan identitas yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka (Saloom, 2021).

Peran teknologi dan media yang makin canggih menjadi faktor yang membantu dalam menjamurnya gerakan hijrah pada generasi Milenial dan Gen Z. Terutamanya, media sosial. Dengan adanya media sosial yang menjadi ruang baru untuk mencari berbagai informasi termasuk dalam hal keagamaan. Tidak hanya itu, teknologi digital dan media sosial memberikan pengaruh pada pola pikir generasi milenial dan gen Z.

Gerakan hijrah di kalangan Milenial dan Gen Z memang penting untuk mendapatkan perhatian tersendiri. Di karenakan Generasi ini sangatlah erat kaitannya dengan teknologi digital yang akan sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat membentuk pola pikirnya. Di tengah krisis keteladanan figur publik, media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk dan mengarahkan preferensi generasi milenial dan Gen Z terhadap sosok-sosok panutan baru yang sesuai dengan nilai dan selera mereka. Persoalan utama bukan terletak pada semangat hijrah itu sendiri, melainkan pada arah dan proses hijrah yang dijalani oleh generasi ini. Secara umum, generasi milenial yang didominasi oleh kaum muda perkotaan cenderung memiliki tingkat pemahaman keislaman yang masih minim. Hal ini disebabkan

oleh latar belakang sosial mereka yang umumnya jauh dari lingkungan religius, serta gaya hidup yang lebih dekat dengan pola konsumsi hedonistik akibat akses yang relatif mudah terhadap berbagai kebutuhan duniawi.

1. Motivasi Hijrah Generasi Milenial dan Gen Z

Motivasi generasi milenial dan gen Z untuk berhijrah cukup beragam. Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor diantaranya faktor kesadaran, faktor kejenuhan, dan faktor prestise (Notonegoro, 2023).

a. Faktor Kesadaran

Fenomena hijrah pada generasi Milenial dan Gen Z menjadi ‘titik balik’ kesadaran seseorang setelah mengalami proses pematangan religiusitas. Kesadaran untuk kembali ke jalan agama bisa disebabkan oleh berbagai proses. Proses hijrah yang dialami generasi milenial tidak selalu didasarkan pada pembelajaran agama Islam yang mendalam dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sebagian dari mereka lebih dipengaruhi oleh paparan doktrin keagamaan yang disampaikan oleh figur-figur yang mereka percayai di media sosial. Pemahaman keagamaan yang terbentuk pun cenderung bersifat instan dan parsial, tidak melalui proses intelektual yang sistematis. Dalam konteks ini, hijrah dipahami sebagai suatu transformasi spiritual, bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan ditentukan oleh motivasi dan niat individu dalam menjalani perubahan tersebut.

Di kalangan generasi muda milenial, hijrah lebih dimaknai sebagai perubahan sikap mental dan perilaku yang dilandasi semangat religiusitas baru. Kesadaran untuk berhijrah umumnya bermula dari pengakuan internal bahwa terdapat aspek dalam kehidupan mereka yang dianggap keliru dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, dorongan untuk mencari kebenaran mendorong mereka mengakses berbagai informasi, meskipun sering kali hanya secara tekstual dan permukaan. Dalam hal ini, media sosial

menjadi sarana utama yang digunakan sebagai jalan pintas dalam memperoleh pemahaman keagamaan.

b. Faktor Kejenuhan

Kosongnya jiwa mendorong tumbuhnya rasa jenuh yang menjadikan generasi milenial dan gen Z mencari agama untuk menjadi solusi tenangnya batin. Rasa jenuh dan kekosongan jiwa yang dialami generasi milenial dan gen Z terutama di daerah perkotaan, mendorong mereka mencari ketenangan batin melalui agama. Kehidupan yang serba praktis dan materialistis sering kali menyebabkan krisis spiritual, di mana nilai-nilai religius terabaikan. Meskipun secara lahiriah mereka hidup dalam kenyamanan materi, namun hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan ruhani, sehingga muncullah pencarian terhadap hal-hal yang transenden. Dalam kondisi ini, agama dipandang sebagai solusi atas kegersangan jiwa dan keterasingan diri. Fenomena ini tercermin dalam meningkatnya minat generasi muda terhadap pengajian dengan tema ringan dan pembimbing spiritual yang mereka anggap mampu memberikan ketenangan. Bahkan di kalangan selebritas, guru spiritual tidak hanya berfungsi sebagai penasihat moral, tetapi juga sebagai pembimbing ibadah.

Buya Hamka menegaskan bahwa jiwa yang kosong tampak dari lemahnya komitmen terhadap amal salih meski mengaku beriman. Senada dengan itu, sosiolog UGM Muhammad Najib Azca menyebut hijrah sebagai respons terhadap krisis eksistensial, terutama pada anak muda. Dalam konteks ini, gerakan hijrah menjadi alternatif pencarian makna hidup baik sebagai pelarian sementara maupun komitmen jangka panjang yang diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas keagamaan, termasuk pengajian dan komunitas kajian keislaman.

c. Faktor Prestise

Di era kontemporer, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai transformasi spiritual, tetapi juga berkembang menjadi tren gaya hidup baru di kalangan milenial. Sebagaimana tren lainnya, gaya hidup hijrah pun bersifat dinamis dapat bertahan lama atau sekadar berlangsung sementara. Dalam konteks ini, hijrah kerap diwujudkan secara simbolik melalui perubahan penampilan, seperti busana syar'i yang tetap modis, penggunaan istilah religius dalam komunikasi, serta pencitraan diri di media sosial. Sayangnya, perubahan ini sering kali tidak disertai dengan transformasi perilaku atau pemahaman religius yang mendalam. Akibatnya, hijrah sebagai gaya hidup lebih menonjolkan aspek luar tanpa memberi dampak ideologis maupun psikologis yang signifikan bagi pelakunya, yang masih lekat dengan nilai-nilai duniawi khas generasi milenial.

2. Tantangan dalam Gerakan Hijrah

Tantangan utama yang dapat terjadi pada gerakan ini yaitu mencegah anggota generasi ini jatuh ke dalam pemahaman Islam yang sempit dan eksklusif. Fenomena hijrah modern sering kali disertai dengan berbagai penafsiran ajaran agama yang dapat berujung kepada radikalisisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana gerakan ini berkembang. Berdasarkan salah satu penelitian menggambarkan hijrah sebagai upaya pemuda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih jauh dari tradisi sebelumnya. Misalnya, Addini mencatat bahwa gerakan hijrah di kalangan pemuda Muslim bukan hanya mencakup aspek religius semata, tetapi juga merupakan bentuk mode sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai strategi dakwah yang dinamis dan terhubung dengan kenyataan generasi saat ini (Addini, 2019).

Gerakan hijrah yang terjadi dapat berfungsi sebagai mekanisme identitas bagi generasi milenial yang berinteraksi dengan berbagai tekanan dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga mencakup

aspek psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks. Adapun tantangan yang lebih besar muncul ketika beberapa suara dalam komunitas hijrah mulai menyuarakan pandangan yang lebih eksklusif, sehingga menciptakan kontradiksi dalam ajaran Islam yang seharusnya bersifat inklusif (Hakim, 2024).

Beberapa kalangan melihat hijrah sebagai sebuah fenomena yang mengalami komodifikasi atau menjadi ajang untuk pencitraan di masyarakat. Sikap skeptis muncul ketika artis-artis terlibat dalam gerakan tersebut; ada pandangan bahwa hijrah mereka mungkin hanya sekadar *gimmick* untuk meningkatkan popularitas di media sosial, yang pada akhirnya berpotensi merusak inti dari nilai spiritual yang ingin mereka sampaikan. Hal ini mengarah pada pertanyaan kritis mengenai niat dan tujuan sebenarnya di balik hijrah mereka (Amna, 2019).

Menghadapi tantangan ini, Agama Islam seharusnya menjadi pangkal dari pemahaman yang lebih luas dan moderat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan yang memadai dan menciptakan ruang diskusi yang inklusif di antara anggota komunitas hijrah. Proses pendidikan yang membangun kesadaran akan pentingnya moderasi dalam beragama merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hijrah tidak melahirkan bentuk ekstremisme atau pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam yang damai (Ridwan, 2021).

Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan menjangkau generasi muda melalui media sosial, gerakan hijrah diharapkan dapat dipandu menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran agama, yang pada gilirannya akan memperkuat identitas keislaman mereka tanpa mengorbankan keragaman dan inklusivitas. Komunikasi dan dialog antar generasi di kalangan masyarakat menjadi krusial untuk membangun pemahaman yang harmonis serta membekali generasi muda dengan pengetahuan agama yang solid dan berimbang (Zahara et al., 2020).

Dalam isu yang diungkapkan diatas yaitu gerakan hijrah di kalangan artis Indonesia menunjukkan bahwa ada keinginan kuat di kalangan generasi milenial untuk mencari identitas dan memahami nilai-nilai spiritual melalui lensa modernitas. Namun, tantangan untuk membimbing mereka agar tidak terjerumus dalam ekstremisme perlu dihadapi dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, sehingga mereka dapat mengenal Islam secara holistik tanpa terperangkap dalam pemahaman yang sempit dan eksklusif. Upaya ini bukan hanya untuk kebaikan individu, tetapi juga untuk kestabilan sosial dan harmoni antar umat beragama di Indonesia yang kaya akan kebudayaan dan tradisi.

SOLUSI

Perkembangan pemahaman Islam yang sempit dan eksklusif di kalangan generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, menjadi tantangan serius bagi dakwah kontemporer. Dalam menghadapi pemahaman Islam yang sempit dan eksklusif di kalangan generasi muda, dakwah memainkan peran yang sangat vital. Melalui pendekatan yang tepat, dakwah dapat menjadi jembatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih toleran, moderat, dan inklusif terhadap ajaran Islam. Terdapat beberapa solusi dakwah yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini, masing-masing memanfaatkan teknologi modern, strategi komunikasi yang efektif, dan pendekatan pendidikan yang adaptif.

1. Pendekatan Dakwah yang Humanis dan Kontekstual

Gerakan hijrah, yang sering kali menekankan pada perilaku dan penampilan fisik, terkadang dapat menciptakan pandangan yang sempit terhadap praktik agama. Oleh karena itu, pendekatan dakwah yang inklusif, berbasis nilai kasih sayang, dan relevan dengan konteks sosial generasi muda menjadi sangat penting. Penting untuk memahami karakteristik generasi milenial dan Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Menurut Ana dan Shofa, penggunaan media sosial yang intensif oleh generasi ini membuat dakwah digital menjadi

sangat relevan dan efektif (Ana & Shofa, 2023) . Strategi penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dapat dijadikan sarana untuk mendekati mereka dengan cara yang lebih menarik dan tidak mengintimidasi, sehingga menciptakan interaksi yang lebih positif. Keterlibatan mereka di media sosial memungkinkan generasi muda untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi dan pengembangan pemahaman yang lebih luas mengenai Islam.

Dalam konteks ini, dakwah harus mampu memberikan penjelasan yang kontekstual dan relevan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, seperti kesehatan mental, keadilan sosial, dan keberagaman. Hasil penelitian oleh Karim dan Nuraziza menunjukkan bahwa dakwah yang efektif bagi generasi milenial harus disesuaikan dengan karakteristik mereka dan memberikan ruang bagi mereka untuk berinteraksi, bertanya, dan menyampaikan pandangan mereka (Karim & Nuraziza, 2024). Ini menciptakan sebuah komunitas belajar yang inklusif, di mana mereka merasa nyaman untuk berbagi dan mengembangkan pemahaman mereka. Dalam berdakwah perlu memanfaatkan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana generasi muda dapat langsung terlibat dalam diskusi seputar nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga mampu memberikan kontribusi pemikiran yang mendorong perkembangan perspektif keagamaan yang lebih luas dan adaptif terhadap kehidupan modern.

Tidak kalah pentingnya, pendidikan berbasis kontekstual menjadi aspek utama dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, generasi muda diajak untuk memahami Islam sebagai agama yang relevan dengan kondisi sosial dan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, integrasi semua elemen dalam pendekatan dakwah yang humanis dan kontekstual sangat diperlukan. Mendorong generasi milenial dan Gen Z untuk terus menerus belajar, berdiskusi, dan mengkaji ulang pandangan keagamaan mereka dengan

cara yang terbuka dan transparan dapat membantu mereka menjauh dari pemahaman agama yang sempit. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat iman mereka, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih toleran, empatik, dan sadar akan keberagaman dalam masyarakat.

2. Penguatan Literasi Islam Digital

Penguatan literasi Islam digital di kalangan generasi milenial dan Gen Z merupakan strategi penting dalam mengatasi pemahaman Islam yang sempit, khususnya dalam konteks gerakan hijrah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, pemahaman dan praktik keagamaan di kalangan generasi muda harus didukung oleh literasi digital yang kuat agar dapat memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual. Hal ini penting untuk menghindari ekstremisme pemahaman keagamaan serta memastikan bahwa gerakan hijrah dipahami sebagai transformasi positif dalam hidup, bukan sekadar perubahan penampilan.

Generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai digital natives yang sangat bergantung pada teknologi dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bijak dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan mencegah pemahaman yang sempit. Mengedukasi mereka tentang cara menggunakan media sosial untuk mencari dan membagi pengetahuan tentang Islam dapat membantu menciptakan dialog yang lebih sehat dan konstruktif. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Hikami et al. yang menggarisbawahi pentingnya moderasi beragama dalam memahami multikulturalisme dan peradaban Islam (al-Hikami et al., 2023). Salah satu tantangan utama dalam gerakan hijrah adalah kecenderungan untuk mengadopsi pandangan yang eksklusif dan reduktif terhadap Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi Islam digital di kalangan milenial perlu diarahkan untuk mempromosikan perspektif yang lebih inklusif.

Pentingnya aspek pendidikan dalam literasi digital juga tidak dapat diabaikan. Pendidikan yang berbasis literasi digital harus mencakup pelajaran tentang analisis kritis terhadap informasi yang tersedia di internet, khususnya mengenai konten yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, generasi muda dapat belajar untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. Hal ini penting mengingat pergeseran menuju pemahaman yang lebih radikal sering kali dipicu oleh informasi yang tidak terverifikasi (Azmy, 2020). Upaya ini dapat membantu mencegah penyebaran narasi-narasi yang dapat membawa kepada ekstremisme dalam bentuk apapun.

Di samping itu, konteks sosial dan budaya yang ada juga mempengaruhi cara generasi muda memahami dan mempraktikkan Islam. Basri menekankan bahwa gerakan hijrah, yang sering kali diasosiasikan dengan perubahan sifat keislaman, juga terpengaruh oleh tren globalisasi dan modernisasi (Basri, 2023). Dengan literasi digital yang baik, generasi muda dapat lebih memahami bahwa hijrah adalah proses yang harus dilalui dengan kesadaran sosial dan budaya yang lebih luas, serta tidak terjebak pada dogma yang sempit. Dalam praktiknya, literasi Islam digital juga mencakup keterampilan untuk berpartisipasi dalam diskusi online yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, respek, serta pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan konteks ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, generasi muda tidak hanya belajar tentang pentingnya identitas keagamaan, tetapi juga bagaimana menempatkan identitas tersebut dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka (Widigdo, 2018). Ini merupakan langkah penting untuk mendorong sikap empatik dan toleran dalam memahami perbedaan pandangan dalam Islam. Dengan begitu penguatan literasi Islam digital bagi generasi milenial dan Gen Z bukan hanya tentang meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab.

3. Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Dakwah

Optimalisasi media sosial sebagai sarana dakwah bagi generasi milenial dan Gen Z sangat penting untuk menangani pemahaman Islam yang sempit dalam konteks gerakan hijrah. Dalam era digital ini, pemanfaatan media sosial menjadi krusial karena mayoritas generasi muda sangat aktif menggunakan *platform-platform* tersebut untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun identitas keagamaan mereka.

Pertama, media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang relevan dan kontemporer. Penelitian oleh Firdaus dan Kolil menunjukkan bahwa penggunaan platform seperti Instagram dan YouTube mendapatkan respon positif dari kalangan pemuda, terutama dalam menyampaikan informasi yang dapat menjembatani pemahaman agama yang lebih luas (Firdaus & Kolil, 2023). Konten yang menarik dan mudah dipahami sangat diperlukan untuk menarik perhatian pengguna yang lebih muda, sehingga dakwah dapat disampaikan dengan cara yang lebih kreatif dan engaging.

Selain itu, optimalisasi media sosial juga memerlukan pemahaman tentang bagaimana mengemas konten yang menarik secara visual. Dalam hal ini, penggunaan teknik komunikasi viral dan pengemasan konten yang interaktif sangat dianjurkan. Habibi mencatat bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, pengelolaan media sosial harus melibatkan kreativitas dalam menghasilkan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga menyentuh aspek emosional audiens (Habibi, 2018). Dengan menyajikan konten dakwah dalam bentuk video pendek, meme, atau infografik, maka dapat meningkatkan engagement audiens dan memudahkan pemahaman.

Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi dakwah melalui media sosial, seperti pengelolaan waktu dan keterbatasan sumber daya, harus diatasi dengan perencanaan yang matang. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai konten yang disebarluaskan agar tidak menyebarkan informasi atau narasi yang salah. Porrasi menyatakan bahwa penggunaan media sosial juga menghadapi tantangan dari algoritma yang membatasi penyebaran konten, sehingga strategi dakwah

perlu disesuaikan agar mencapai audiens yang lebih luas (Muyassaroh et al., 2024).

Dari perspektif moderasi beragama, penting bagi para pendakwah untuk menekankan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dalam setiap pesan dakwah yang mereka sampaikan. Ulfa dan Efrina menekankan bahwa konten yang disebarakan harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang pemahaman agama di kalangan audiens. Menghadirkan narasi yang seimbang dan tidak ekstrem merupakan cara efektif untuk menanamkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam (Ulfa & Efrina, 2024).

4. Membangun Komunitas Hijrah yang Terbuka dan Inklusif

Membangun komunitas hijrah yang terbuka dan inklusif bagi generasi milenial dan Gen Z sangat penting dalam menjaga pemahaman Islam yang sempit dalam gerakan hijrah. Dalam konteks ini, pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai inklusivitas, dialog, dan pembelajaran yang saling mendukung menjadi esensial. Generasi muda saat ini, yang cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan keragaman, membutuhkan ruang di mana mereka dapat belajar, berdiskusi, dan mengekspresikan pemahaman mereka tentang Islam dengan cara yang konstruktif.

Pertama-tama, pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk membangun komunitas hijrah yang inklusif adalah kunci. Penelitian oleh Royani et al. menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang kekinian dan mudah dipahami, bersama dengan konten interaktif seperti video animasi dan live streaming, dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda di dalam dakwah. Media sosial dapat digunakan untuk menciptakan ruang dialog, di mana para pemuda merasa bebas untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka terkait hijrah. Melalui platform ini, komunitas juga dapat mengadakan sesi tanya jawab langsung, diskusi, dan webinar yang melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memperluas perspektif keagamaan mereka (Royani et al., 2024).

Selanjutnya, pendekatan dakwah yang berbasis pada pengalaman dan keterlibatan juga harus diperkuat. Kegiatan yang melibatkan komunitas seperti pengajian, pelatihan kepemimpinan, dan program-program sosial dapat membantu memfasilitasi interaksi yang lebih dalam antara anggota komunitas. Namun, prinsip pengembangan kemampuan berpikir kritis tetap relevan dalam upaya membangun kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Dengan mendekatkan dakwah kepada konteks kehidupan sehari-hari mereka, komunitas hijrah dapat membantu generasi muda memahami relevansi ajaran Islam dalam menghadapi isu-isu sosial saat ini, termasuk keadilan, lingkungan, dan kesehatan mental.

Membangun keterbukaan dalam komunitas hijrah juga bisa diarahkan melalui program mentoring yang melibatkan pemuda yang telah lebih lama terjun dalam gerakan hijrah. Program ini dapat membantu generasi baru untuk memahami perjalanan spiritual mereka secara lebih mendalam dan mengurangi potensi salah pengertian tentang hijrah. Melalui interaksi ini, mereka dapat belajar untuk merangkul keragaman dan menghargai perbedaan dalam pemahaman Islam, yang sering kali hadir dalam komunitas multikultural (Budiantoro & Saputri, 2021). Dalam rangka mewujudkan komunitas hijrah yang inklusif, perlu juga adanya kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah. Dengan kerja sama ini, program-program dakwah dapat lebih terarah dan memiliki dampak yang lebih luas dalam membangun kesadaran keagamaan yang moderat dan menghargai keragaman.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Dakwah dan Institusi Pendidikan

Kolaborasi antara lembaga dakwah dan institusi pendidikan merupakan pilar penting untuk menangani pemahaman Islam yang sempit dalam gerakan hijrah, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Dengan mengintegrasikan program-program dakwah yang berbasis pendidikan, dapat

diciptakan pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang ajaran Islam.

Lembaga dakwah dapat menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini penting, mengingat fenomena hijrah di Indonesia telah berkembang menjadi gerakan sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan interaksi sosial. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang inklusif dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ajaran Islam, sehingga generasi muda tidak hanya terfokus pada aspek ritual tetapi juga pada prinsip moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama (Hakim, 2024).

Selanjutnya, pelatihan bagi pengajar juga sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Alnashr et al., internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam harus dilakukan secara kontinu dan terprogram. Oleh karena itu, lembaga dakwah dan institusi pendidikan perlu mengembangkan program pelatihan bagi para pendidik untuk menyampaikan materi keagamaan dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Dengan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih baik tentang hijrah sebagai suatu perjalanan spiritual yang tidak hanya terbatas pada perubahan penampilan (Alnashr et al., 2022).

Keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan dakwah juga perlu diperkuat. Penelitian oleh Wardi menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam komunitas dapat memberikan wawasan baru dan membantu mereka mengalami sendiri proses hijrah. Kolaborasi antara lembaga dakwah dan institusi pendidikan dapat menghadirkan seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang membahas tema-tema relevan dengan situasi saat ini, seperti isu sosial, kesehatan mental, dan keadilan, mengingat keberadaan gerakan hijrah yang sering kali diakui sebagai solusi untuk tantangan sosial di masyarakat. (Wardi Suhra, 2024)

Akhirnya, untuk memastikan efektivitas kolaborasi ini, evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan sangat penting. Melalui umpan balik dari peserta dan komunitas, lembaga dakwah dan institusi pendidikan dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan metode dan konten agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan generasi milenial dan Gen Z tidak hanya memahami hijrah sebagai tren, tetapi sebagai proses transformasi diri yang mendalam dan bermakna.

REFLEKSI

Fenomena gerakan hijrah di kalangan generasi milenial dan Gen Z merupakan cerminan dari dinamika pencarian spiritual di era modern yang sarat dengan kompleksitas sosial, budaya, dan teknologi. Hijrah, yang pada hakikatnya adalah transformasi spiritual menuju kebaikan, dalam praktiknya dapat menjadi jalan menuju pemahaman Islam yang lebih mendalam dan inklusif. Namun, jika tidak dibarengi dengan literasi keagamaan yang memadai dan bimbingan yang tepat, gerakan ini berpotensi melahirkan pemahaman Islam yang sempit, eksklusif, dan bahkan menyimpang dari nilai-nilai moderasi yang menjadi inti ajaran Islam.

Refleksi terhadap dinamika ini mengingatkan kita akan pentingnya peran semua pihak—pendakwah, pendidik, orang tua, hingga institusi negara—dalam membangun ekosistem dakwah yang ramah, terbuka, dan relevan bagi generasi muda. Dakwah harus hadir sebagai jembatan, bukan tembok; sebagai ruang dialog, bukan ruang penghakiman. Generasi milenial dan Gen Z membutuhkan pendekatan yang humanis, kontekstual, dan kreatif—bukan hanya ceramah satu arah, melainkan ruang belajar yang partisipatif dan membangun nalar kritis.

Refleksi ini juga mengajak kita untuk tidak hanya melihat hijrah dari segi tampilan luar, tetapi dari niat, proses, dan keberlanjutan spiritual seseorang. Transformasi yang sejati tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi tercermin dalam

keteguhan moral, empati sosial, dan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus membuka ruang-ruang diskusi, memperkuat literasi Islam digital, dan membina komunitas hijrah yang inklusif, agar semangat hijrah benar-benar menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual, bukan sekadar tren sesaat.

PLURALISME DAN DAKWAH DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Studi Kasus Pembakaran Masjid Ahmadiyah

Mochammad Afif Jalla

ISU

Pluralisme dan multikulturalisme adalah dua konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial yang mencakup keberagaman etnis, agama, dan budaya di masyarakat. Pluralisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada, baik dari segi keyakinan, budaya, maupun cara hidup. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai agama, pluralisme menjadi suatu keharusan untuk menciptakan kedamaian dan keberlangsungan hubungan antarbudaya (Mazid & Suharno, 2019).

Multikulturalisme, di sisi lain, mencakup pemahaman dan penerimaan bahwa keberagaman budaya adalah bagian integral dari identitas kolektif suatu bangsa. Ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam aspek budaya dan agama, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai yang berbeda yang ada dalam komunitas tersebut (Sitepu, 2023). Dalam lingkungan pendidikan, penerapan nilai-nilai multikulturalisme penting untuk menanamkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di kalangan generasi muda, yang akan bertanggung jawab atas keberlanjutan harmoni sosial di masa depan.

Kedua konsep ini saling melengkapi dan memiliki relevansi khusus dalam konteks hubungan antaragama dan antarbudaya.

Keberhasilan dalam menerapkan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia tergantung pada upaya untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Di era globalisasi saat ini, tantangannya adalah mendorong sikap inklusivitas dan dialog yang konstruktif, yang memungkinkan kelompok yang berbeda untuk saling belajar dan berkolaborasi, serta meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi (Nawangsih et al., 2022).

Konsep pluralisme dan multikulturalisme sering kali diuji oleh munculnya intoleransi dan diskriminasi yang terus menerus. Dalam banyak kasus, pemahaman yang sempit tentang pluralisme dapat menyebabkan eksklusi sosial dan polaritas, yang pada akhirnya mengancam keutuhan sosial. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat membentuk karakter dan mengajarkan nilai-nilai koeksistensi yang damai dan saling menghargai di kalangan masyarakat yang beragam (Nawangsih et al., 2022). Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, masyarakat dapat dibekali dengan keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mengelola perbedaan dan menciptakan suasana sosial yang harmonis.

Kejadian pembakaran Masjid Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari konflik agama yang mencerminkan tantangan mendalam terhadap pluralisme dan toleransi. Masjid Ahmadiyah, yang menjadi tempat ibadah bagi umat Islam Ahmadiyah, sering kali dicap sebagai tempat ibadah yang kontroversial karena dianggap menyimpang oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Islam (Djuniasih & Kosasih, 2019). Pembakaran masjid ini bukan hanya menunjukkan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencerminkan kebangkitan intoleransi yang semakin mengkhawatirkan di dalam masyarakat.

Insiden pembakaran masjid bukanlah sebuah kejadian terisolasi. Dalam rentang waktu tertentu, banyak masjid dan tempat ibadah milik jemaah Ahmadiyah yang mengalami kekerasan, terlepas dari upaya mereka untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Muslim lainnya. Contohnya, di

Sukabumi, terjadi pembakaran masjid Al-Furqon pada tahun 2008, yang melibatkan pengikut Ahmadiyah dan masyarakat setempat, menciptakan ketegangan yang berkepanjangan (Putri et al., 2021). Kejadian ini memperlihatkan betapa besar pengaruh dari diskriminasi dan kurangnya pemahaman dalam hubungan antaragama di Indonesia, yang seharusnya mengedepankan toleransi dan saling pengertian terlepas dari perbedaan keyakinan.

Pembangunan masjid sebagai simbol kehadiran komunitas Ahmadiyah di suatu daerah sering kali diikuti dengan reaksi yang negatif dari kelompok masyarakat lain. Ketidakhahaman tentang ajaran dan praktik Ahmadiyah kerap memicu respon yang agresif, yang tidak hanya terbatas pada tindakan hukum tetapi juga bentuk kekerasan fisik. Pemicu dari insiden ini sering kali berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang meresahkan dari beberapa tokoh agama yang menyerukan penolakan terhadap keberadaan musalla atau masjid Ahmadiyah dalam konteks lokal, yang pada gilirannya memperparah polarisasi di masyarakat (Putri et al., 2021).

Dari perspektif yang lebih luas, pembakaran Masjid Ahmadiyah menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak beribadah kelompok minoritas. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama pun menjadi sorotan; meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, kenyataannya banyak individu yang merasa terpinggirkan dan tidak aman untuk menjalankan ibadah mereka secara bebas (Sitepu, 2023). Rangkaian kejadian ini memberikan indikasi bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang kaya, tantangan terkait intoleransi dan kekerasan berbasis agama masih harus dihadapi secara serius oleh semua elemen masyarakat.

Ketidakhahaman akan pluralisme dan multikulturalisme jelas menjadi masalah yang mendasar dalam konteks ini. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Penanganan yang tepat dalam konteks konflik berbasis agama seperti ini harus melibatkan dialog

interagama dan pemahaman mendalam tentang keberagaman sebagai modal sosial yang dapat menguatkan persatuan di tengah masyarakat yang kompleks (Sholichati & Janitra, 2021).

Dengan memahami kompleksitas di balik kejadian pembakaran Masjid Ahmadiyah, diharapkan masyarakat dapat bersikap lebih terbuka terhadap perbedaan, sehingga peristiwa serupa di masa depan dapat dihindari, dan integrasi sosial dapat terwujud dengan lebih baik di seluruh strata masyarakat.

Konflik yang terjadi di masyarakat, seperti pembakaran masjid Ahmadiyah, memiliki dampak yang mendalam terhadap keharmonisan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu dampak utama dari konflik ini adalah terjadinya polarisasi antar kelompok yang berbeda. Ketika sebuah insiden kekerasan terjadi, seperti tindakan vandalisme terhadap tempat ibadah, hal ini dapat menciptakan suasana ketegangan yang meluas, menyebabkan kelompok-kelompok yang terlibat saling menuduh dan membangun tembok pemisah satu sama lain. Sebagai akibatnya, potensi untuk bekerja sama dan dialog konstruktif antara agama dan etnisitas yang berbeda menjadi terganggu. Masyarakat menjadi lebih terfragmentasi, di mana individu mengidentifikasi diri berdasarkan pola pikir "*in-group*" dan "*out-group*", yang pada gilirannya mengarah pada meningkatnya ketidakpercayaan dan ketegangan.

Lebih jauh lagi, dampak konflik terhadap keharmonisan sosial juga mencakup hilangnya rasa aman bagi anggota komunitas yang minoritas. Pembakaran masjid tidak hanya merusak infrastruktur fisik tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang ada di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi kelompok keagamaan tertentu. Akibatnya, individu-individu dari kelompok yang terpinggirkan cenderung menarik diri ke dalam komunitas mereka sendiri, memperdalam isolasi sosial dan berdampak negatif pada integrasi dalam masyarakat yang lebih luas (Putri et al., 2021). Hal ini menciptakan siklus yang sulit diatasi, di mana pemisahan lebih dalam menyebabkan lebih banyak mispersepsi dan konflik.

Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, dampak dari konflik ini juga sangat signifikan. Kejadian-kejadian seperti ini menciptakan suasana ketidakpastian di mana nilai-nilai toleransi dan empati terhadap perbedaan menjadi semakin sulit untuk ditegakkan. Pendidikan yang diharapkan dapat memperkuat karakter dan integrasi sosial sering kali terhambat oleh lingkungan yang dipenuhi oleh ketakutan dan prasangka. Kurikulum pendidikan yang seharusnya mengedepankan kehidupan bersama yang harmonis menjadi terkompromi oleh pengaruh negatif dari konflik, menghasilkan generasi yang mungkin lebih cenderung memilih jalan diskriminasi daripada saling memahami.

Lebih jauh, dampak jangka panjang dari konflik ini berpotensi merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Ketegangan yang melahirkan kebencian tidak hanya menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengarah pada konflik yang lebih serius di masa depan (Yanthi & Widiyasavitri, 2018). Jika tuduhan dan provokasi dibiarkan berkembang tanpa adanya dialog atau tindakan pencegahan, maka masyarakat akan semakin terbelah, mengarah pada situasi di mana kelompok-kelompok sosial yang berbeda tidak akan mampu menemukan titik temu dalam menghadapi tantangan dan isu yang lebih besar (Syahyuti, 2013).

Sebagai kesimpulan, dampak konflik terhadap keharmonisan sosial sangat kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam membangun dialog antaragama serta upaya pencegahan terhadap setiap bentuk kekerasan agama. Melalui pendidikan dan interaksi positif, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kembali rasa saling percaya, harmoni, dan kerjasama yang dibutuhkan untuk menciptakan kedamaian di tengah keberagaman.

SOLUSI

Dalam menghadapi masalah pluralisme dan intoleransi yang muncul di masyarakat multikultural, maka diperlukan berbagai solusi yang mendorong dialog, toleransi, serta harmoni antarkelompok. Dalam konteks kasus pembakaran Masjid Ahmadiyah, beberapa pendekatan solutif dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

1. Pendidikan Toleransi dan Multikultural

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter individu dan sikap terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan multikultural sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

a. Integrasi Kurikulum Multikultural

Sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti diskusi panel atau pertukaran budaya untuk memperdalam pemahaman siswa tentang nilai-nilai toleransi dan HAM. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga melatih siswa untuk berinteraksi langsung dengan beragam perspektif, sehingga menumbuhkan empati dan keterbukaan. Misalnya, diskusi panel bisa menghadirkan pembicara dari latar belakang agama, suku, atau budaya yang berbeda, sementara pertukaran budaya memungkinkan siswa mengalami tradisi dan nilai-nilai kelompok lain secara nyata. Selain itu, sekolah dapat menggandeng organisasi pemuda atau lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jaringan dan sumber belajar siswa. Dengan demikian, ekstrakurikuler menjadi wadah praktis bagi siswa untuk menginternalisasi prinsip-prinsip toleransi dan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Guru juga perlu dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran interaktif, seperti role-play atau simulasi, yang memungkinkan siswa mengalami langsung pentingnya menghargai perbedaan. Pelatihan ini harus mencakup teknik

fasilitasi yang inklusif agar guru mampu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berekspresi dan berdiskusi tanpa takut dihakimi. Kolaborasi dengan komunitas lokal atau lembaga HAM dapat memperkaya materi pembelajaran melalui workshop atau ceramah dari para ahli, yang memberikan insight praktis tentang isu-isu aktual terkait HAM dan keberagaman. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas kurikulum ini, misalnya melalui survei sikap siswa atau proyek kelompok yang menilai pemahaman mereka tentang inklusivitas. Dengan pendekatan holistik ini, sekolah tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung praktik nyata penghormatan terhadap sesama, sekaligus mempersiapkan siswa menjadi agen perubahan di masyarakat (Nurhayati & Agustina, 2020).

b. Seni dan Budaya sebagai Alat Edukasi:

Mengadakan festival seni dan budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak hanya menjadi sarana untuk menampilkan keindahan keberagaman, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat identitas bangsa. Dalam festival tersebut, setiap kelompok masyarakat dapat menunjukkan kekayaan budayanya, mulai dari tarian tradisional, musik daerah, hingga kuliner khas, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan. Selain itu, kegiatan ini dapat dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai generasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua, agar nilai-nilai kebersamaan dan kebanggaan terhadap budaya dapat ditanamkan sejak dini. Dengan adanya workshop atau seminar budaya, masyarakat juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang makna di balik setiap tradisi yang ditampilkan. Dengan demikian, festival ini tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga menjadi medium pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

Festival seni dan budaya yang terencana dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Dengan menghadirkan pengrajin, musisi, dan pelaku seni lainnya, festival ini membuka peluang bagi mereka untuk

memasarkan produk dan karya mereka kepada khalayak yang lebih luas. Dampak ekonomi ini akan semakin terasa jika festival tersebut dikelola secara berkelanjutan, misalnya dengan menjadikannya sebagai agenda tahunan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas seni dapat memperluas jangkauan festival, sehingga menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan begitu, selain memperkuat persatuan, festival ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan industri kreatif.

2. Program Moderasi Beragama

Program-program yang mendorong moderasi dalam beragama merupakan solusi krusial dalam menyikapi intoleransi. Hal ini bisa meliputi:

a. Pelatihan dan Pendidikan untuk Tokoh Agama

Workshop dan pelatihan tersebut perlu dirancang dengan kurikulum yang komprehensif agar para tokoh agama dapat menginternalisasi nilai-nilai moderasi secara mendalam. Pertama, kurikulum harus mencakup materi tentang sejarah dan filosofi moderasi beragama, sehingga peserta memahami akar permasalahan dan urgensi penerapannya. Kedua, perlu disertakan studi kasus dari berbagai budaya dan agama untuk memperkaya wawasan peserta tentang keragaman. Ketiga, sesi refleksi diri dapat membantu tokoh agama mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka selama ini tentang moderasi. Keempat, pendekatan bertahap dari dasar hingga lanjutan akan memastikan penyerapan materi berlangsung efektif. Kelima, integrasi teknologi, seperti platform e-learning, dapat memudahkan akses peserta terhadap materi tambahan di luar sesi pelatihan (Rahayu & Baggio, 2024).

Selain itu, metode pembelajaran partisipatif, seperti diskusi kelompok dan simulasi konflik, akan membantu peserta memahami praktik nyata dari prinsip-prinsip yang diajarkan. Diskusi kelompok dapat mendorong pertukaran ide antartokoh agama, sementara simulasi konflik melatih mereka menyelesaikan

perbedaan dengan cara damai. Kolaborasi dengan akademisi, psikolog, dan praktisi perdamaian juga penting untuk memberikan perspektif multidisiplin dalam penyampaian materi. Misalnya, psikolog dapat membantu merancang modul tentang manajemen emosi, sedangkan praktisi perdamaian dapat membagikan pengalaman lapangan dalam mediasi konflik. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menyesuaikan konten pelatihan sesuai kebutuhan peserta. Dengan demikian, para tokoh agama tidak hanya menjadi paham teori, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang mendorong harmoni sosial di masyarakat.

b. Kampanye Anti-intoleransi:

Kampanye publik ini perlu dirancang secara sistematis untuk memastikan pesan toleransi tersampaikan dengan efektif. Pertama, konten media sosial harus dibuat menarik dan mudah dibagikan, mencakup infografis, video pendek, serta testimoni dari korban intoleransi. Hal ini penting karena media sosial memiliki jangkauan luas dan dapat menyentuh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Selain itu, penggunaan hashtag yang relevan dan kolaborasi dengan influencer dapat memperkuat viralitas pesan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi akan semakin meningkat (Arfa & Lasaiba, 2022).

Seminar dan lokakarya dapat diadakan secara berkala dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang agama, akademisi, dan aktivis HAM. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tetapi juga membangun jejaring antarkelompok untuk memperkuat persatuan. Ketiga, diskusi publik harus difasilitasi secara inklusif, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait isu intoleransi. Keempat, kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan akan memperluas jangkauan kampanye sekaligus menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Terakhir, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai dampak kampanye dan menyusun

strategi perbaikan ke depan agar upaya ini terus relevan dan efektif.

3. Metode Dakwah yang Inklusif

Dakwah yang inklusif bisa menjadi salah satu alternatif dalam menangani konflik antaragama. Metode yang harus diutamakan meliputi:

a. Dakwah dengan Pendekatan Dialogis

Dakwah yang dialogis tidak hanya menekankan pada penyampaian pesan agama secara monolog, tetapi juga membuka ruang bagi umat untuk bertanya, mengkritisi, dan berdiskusi secara aktif. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran yang sehat, di mana para dai tidak hanya menjadi pemberi ceramah, tetapi juga pendengar yang empatik. Dengan begitu, dakwah menjadi lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan spiritual serta intelektual masyarakat modern. Selain itu, metode dialogis juga mendorong keterbukaan, sehingga pesan agama dapat dipahami secara lebih mendalam tanpa kesan pemaksaan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan dakwah yang dinamis dan partisipatif (MUBAROK & YUSUF, 2024).

Ketika dakwah dilakukan secara dialogis, kesalahpahaman antarkelompok dapat diminimalisir karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Proses diskusi yang terbuka akan memperkaya wawasan bersama, sekaligus mengikis prasangka yang mungkin timbul akibat kurangnya komunikasi. Lebih jauh, pendekatan ini juga memperkuat rasa saling menghargai, karena perbedaan dipandang sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai ancaman. Dalam jangka panjang, dakwah dialogis dapat menjadi fondasi bagi terciptanya kerukunan sosial yang lebih harmonis di tengah keberagaman. Dengan demikian, para dai tidak hanya menjadi penyampai ajaran agama, tetapi juga agen perdamaian yang mendorong persatuan umat.

b. Menonjolkan Pesan Toleransi dalam Dakwah

Memastikan bahwa pesan-pesan dalam dakwah tidak hanya berbasis pada ajaran agama tetapi juga dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai keberagaman memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Pertama, para dai perlu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat yang beragam agar pesan yang disampaikan relevan dan mudah diterima. Kedua, penggunaan bahasa yang inklusif dan empatik sangat penting untuk menghindari kesan menggurui atau eksklusif. Ketiga, integrasi kisah-kisah inspiratif dari berbagai latar belakang dapat memperkaya materi dakwah dan menunjukkan universalitas nilai kebaikan. Keempat, dialog interaktif harus dibangun untuk memastikan bahwa dakwah tidak hanya satu arah, tetapi juga memberi ruang bagi pertukaran pemikiran. Kelima, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dari berbagai agama atau keyakinan dapat memperkuat pesan perdamaian dan toleransi. (Hidayat et al., 2020).

Membangun narasi yang positif dan inklusif agar dakwah tidak hanya memenuhi aspek spiritual, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkeadilan. Narasi tersebut harus menekankan pada kesamaan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang dijunjung tinggi oleh semua agama dan budaya. Selain itu, penting untuk menghindari retorika yang memecah belah atau menyudutkan kelompok tertentu, melainkan menonjolkan persatuan dalam keberagaman. Penggunaan media kreatif, seperti video, podcast, atau tulisan yang mengedukasi, dapat memperluas jangkauan dakwah sehingga lebih menarik bagi generasi muda. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga alat untuk memperkuat harmoni sosial dan kemanusiaan universal.

4. Membangun Interaksi Sosial Positif

Untuk meningkatkan interaksi sosial yang sehat di masyarakat multikultural, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

a. Program Pertukaran Budaya:

Program pertukaran yang melibatkan berbagai komunitas dalam kegiatan sosial akan membuka peluang bagi masyarakat untuk saling mengenal. Misalnya, pertukaran pelajar dengan latar belakang berbagai agama atau budaya dapat memperkuat hubungan antarkelompok. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga mendorong toleransi dan empati di antara peserta. Dengan berinteraksi langsung, mereka dapat memahami perbedaan dan menemukan kesamaan yang selama ini mungkin terabaikan. Selain itu, program semacam ini juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak daerah. (Riyadi, 2024).

Program pertukaran sosial juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan. Peserta akan belajar bagaimana bekerja sama dengan individu dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang inklusif dan berwawasan global. Tidak hanya itu, kegiatan semacam ini juga dapat memicu munculnya inisiatif-inisiatif baru yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti proyek sosial atau kampanye kesadaran budaya. Dengan demikian, program pertukaran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

b. Kegiatan Sosial Bersama:

Mengadakan kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial, atau proyek komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat membantu membangun ikatan yang lebih kuat antar kelompok dan menciptakan rasa kebersamaan yang lebih tinggi. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara para peserta. Misalnya, ketika warga dari latar belakang berbeda bekerja sama

membersihkan lingkungan, mereka akan saling mengenal dan memahami satu sama lain. Selain itu, proyek komunitas seperti pembangunan fasilitas umum dapat menjadi sarana pembelajaran kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kegiatan sosial tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga mempererat hubungan sosial yang harmonis.

Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kebanggaan masyarakat terhadap lingkungannya. Ketika individu terlibat dalam bakti sosial, mereka cenderung lebih menghargai hasil kerja bersama dan berusaha menjaga keberlanjutannya. Gotong royong juga dapat menjadi media edukasi informal, di mana nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerja sama diajarkan secara alami. Selain itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, seperti pemuda, tokoh agama, dan aparat setempat, dapat memperluas jaringan sosial dan mendorong inisiatif positif lainnya. Dengan begitu, kegiatan sosial tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih bersatu dan peduli.

5. Keterlibatan Media dalam Penyebaran Pesan Positif

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Penggunaan media yang bertanggung jawab dapat membantu menyebarkan pesan-pesan positif mengenai pluralisme dan toleransi:

a. Jurnalisme yang Bertanggung Jawab

Mendorong media untuk memberitakan berita secara objektif, tidak terpacu pada sensasionalisme yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok, merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Media memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik, sehingga pemberitaan yang seimbang dan faktual dapat mencegah penyebaran prasangka dan misinformasi. Selain itu, dengan menghindari framing yang provokatif, media dapat menjadi jembatan dialog antarberbagai kelompok yang berbeda keyakinan atau latar belakang. Pelatihan bagi jurnalis

tentang etika pemberitaan dan pentingnya keberagaman juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu menyajikan informasi secara profesional. Dengan demikian, media tidak hanya menjalankan fungsi informasinya, tetapi juga turut serta dalam memupuk perdamaian sosial.

Penekanan pada berita positif tentang interaksi antaragama yang sukses akan meningkatkan citra toleransi di masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Contoh nyata seperti kolaborasi lintas agama dalam kegiatan sosial atau dialog antarumat beragama dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Pemberitaan semacam ini tidak hanya mengurangi stereotip negatif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mencontoh praktik-praktik baik tersebut. Media juga dapat menggali lebih banyak kisah sukses tentang kerukunan beragama yang selama ini mungkin kurang terekspos. Dengan menyoroti aspek-aspek positif ini, media berkontribusi dalam menciptakan iklim yang mendukung persatuan dan menghargai perbedaan. (Mazid & Suharno, 2019).

b. Kampanye Media Digital

Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kampanye tentang pentingnya pluralisme, yang melibatkan pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk berbagi cerita tentang toleransi dan perdamaian, dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, pesan-pesan tentang kerukunan dapat disampaikan secara visual dan interaktif, sehingga mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Pemimpin masyarakat dan tokoh agama, sebagai figur yang dihormati, dapat menggunakan pengaruh mereka untuk menyebarkan narasi-narasi positif tentang kerja sama antarumat beragama. Konten seperti video pendek, kutipan inspiratif, atau diskusi langsung (live) dapat menarik minat audiens yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi dengan influencer atau aktivis perdamaian juga dapat memperkuat dampak kampanye ini.

Dengan memberikan contoh konkret melalui cerita-cerita toleransi, masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-nilai pluralisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh agama dapat membagikan pengalaman pribadi tentang kerja sama dengan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial, sementara pemimpin masyarakat dapat menceritakan upaya mereka dalam meredakan konflik di tingkat lokal. Media sosial juga memungkinkan adanya ruang dialog terbuka, di mana masyarakat dapat bertukarpikiran dan belajar dari satu sama lain. Melibatkan generasi muda dalam kampanye ini juga penting, karena mereka adalah pengguna aktif media sosial yang dapat menjadi agen perubahan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, kampanye ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis (Yani et al., 2020).

Pengimplementasian solusi-solusi yang adaptif dan responsif terhadap konteks masyarakat multikultural, kita dapat berharap untuk memperbaiki keadaan yang meresahkan terkait intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Upaya ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media. Melalui langkah-langkah yang terintegrasi, kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya menghargai perbedaan tetapi juga hidup dalam harmoni dan kedamaian.

REFLEKSI

Kasus pembakaran Masjid Ahmadiyah menjadi cermin tajam atas tantangan nyata dalam penerapan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman yang utuh dan sikap saling menghargai. Padahal, dalam konteks negara yang berdiri di atas fondasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sikap inklusif dan toleran bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan kolektif demi menjaga harmoni sosial.

Refleksi ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa pluralisme dan multikulturalisme bukan sekadar konsep teoritis, melainkan praktik hidup yang menuntut keberanian, empati, dan kesediaan untuk berdialog. Ketika intoleransi masih menjelma dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksklusi sosial, maka pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman sejak dini menjadi keharusan. Demikian pula halnya dengan dakwah yang semestinya memeluk semangat *rahmatan lil 'alamin*—dakwah yang menyapa, bukan menghakimi; yang merangkul, bukan menyingkirkan.

Refleksi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak—tokoh agama, pendidik, aparat negara, media, dan masyarakat sipil—untuk bersama-sama menciptakan ruang sosial yang aman dan adil bagi seluruh warga, tanpa kecuali. Komitmen untuk membangun masyarakat yang toleran bukan hanya untuk meredam konflik sesaat, tetapi untuk menyiapkan masa depan yang damai, di mana perbedaan menjadi kekuatan, bukan ancaman.

RUANG DAN RINTANGAN

Dinamika Perempuan dalam Dakwah Kontemporer

Dina Rahmawati

ISU

Tidak akan lahir sebuah peradaban tanpa kehadiran perempuan. Perempuan adalah tonggak ajaran, pemikiran, dan peradaban. Rahimnya melahirkan kehidupan, nafasnya menghadirkan kedamaian. Dalam berbagai ajaran agama, perempuan ditempatkan pada posisi yang luhur, meski sejarah umat manusia sempat mencatatkan lembaran kelam bagi perempuan. Menurut mitologi Yunani Kuno, misalnya, perempuan dipandang sebagai sumber godaan dan kesengsaraan dunia (Marwing & Yunus, 2021). Begitu pula pada masa jahiliyah, perempuan dijadikan objek yang bisa diwariskan dan ditukarkan seperti harta benda (Sugitanata, 2020). Islam lantas hadir untuk mereformasi tradisi maupun pemikiran yang eksploitatif dan diskriminatif tersebut. Namun, pembebasan ini tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan dalam kehidupan umat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perempuan kembali mengalami eksklusi dari ruang publik dan gerakannya dibatasi oleh konstruksi patriarki yang menempatkannya hanya pada urusan kasur, dapur, dan sumur.

Di tengah ketimpangan tersebut, kesadaran global akan pentingnya kesetaraan gender menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disepakati oleh 189 negara pada tahun 2000 adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini bertujuan meningkatkan akses

perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik, serta mengurangi ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran jika pembagian kerja dan peran perempuan di era modern ini mengalami transisi ke suatu proses pembebasan atau emansipasi. Hal ini juga didukung dengan adanya reformasi kelembagaan dan terbukanya ruang publik menjadi peluang bagi perempuan untuk tampil, memperoleh representasi, dan ikut serta dalam perumusan kebijakan publik (Tanjung et al., 2024).

Transformasi tersebut juga menyentuh ruang-ruang dakwah. Perempuan Muslim kini secara aktif terlibat dalam pendidikan, membentuk organisasi perempuan Islam, serta memainkan peran penting di berbagai bidang, termasuk dakwah. Sejak permulaan Islam, peran perempuan dalam dakwah sudah tampak nyata, seperti yang dilakukan oleh Khadijah yang dengan tulus mengorbankan hartanya demi dakwah Nabi Muhammad SAW, serta Aisyah dan Saudah yang turut berjuang mendampingi Rasulullah (Rizal, 2020).

Keberadaan perempuan dalam dakwah tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan menjadikan dakwah lebih representatif dan relevan dengan realitas sosial. Karena pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Nisa': 34:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ...

“...bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Representasi perempuan dalam diskursus dakwah dibutuhkan agar ajaran Islam dapat hadir secara lebih utuh dan menyentuh seluruh lapisan umat, terutama perempuan yang selama ini kerap menjadi objek dari wacana keagamaan, namun tidak selalu dilibatkan secara aktif dalam penyusunannya (Faizah & Alkhalimi, 2023). Lebih dari itu, dakwah yang dilakukan oleh perempuan memiliki kekuatan tersendiri dalam mendorong perubahan sosial. Dai perempuan

memiliki kedekatan emosional dan empati terhadap isu-isu yang secara langsung menyentuh kehidupan perempuan dan anak-anak, seperti keadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, hingga akses terhadap pendidikan (Alfiyah et al., 2022).

Di Indonesia, kehadiran dai perempuan semakin terlihat nyata dalam lanskap dakwah kontemporer, terutama melalui media digital yang memungkinkan penyebaran pesan keislaman secara luas dan cepat. Salah satu figur penting adalah Ustazah Halimah Alaydrus yang dikenal melalui dakwahnya yang lembut dan menenangkan. Ustazah Halimah Alaydrus aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube, menyampaikan pesan-pesan keislaman yang sarat makna melalui pendekatan reflektif dan penuh kasih (Annisa et al., 2023).

Ada pula Ustazah Oki Setiana Dewi menyampaikan dakwahnya dengan santun, serta mengangkat tema-tema aktual yang dekat dengan kehidupan perempuan. Ia juga aktif menulis buku dan kerap diundang di berbagai forum nasional maupun internasional, menjadikan dirinya sebagai ikon dai perempuan modern yang mampu menjangkau berbagai kalangan (Syafitri & Arief, 2023). Ustazah Mumpuni Handayayekti memiliki keunikan dalam gaya dakwahnya yang bumi dan penuh semangat. Ustazah Mumpuni Handayayekti sering menyampaikan ceramah dalam bahasa Jawa, dengan gaya lugas dan merakyat. Kekuatan komunikasinya terletak pada kemampuannya menjangkau masyarakat akar rumput dengan pesan-pesan keislaman yang praktis dan mudah dipahami (Ayu Rahmawati & Prembayun Miji Lestari, 2024).

Sosok yang tidak kalah populer adalah Mamah Dedeh, yang dikenal luas berkat gaya dakwahnya yang tegas, jenaka, namun tetap menyentuh. Melalui program televisi, Mamah Dedeh menyampaikan pesan-pesan agama dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat umum. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya membangun kedekatan emosional dengan jamaah melalui humor dan gaya bicara yang ceplas-ceplos

namun sarat makna (Faizah & Alkhalimi, 2023). Selain itu, Ning Umi Laila hadir sebagai representasi dai muda yang menggabungkan dakwah dengan nasyid. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pesan spiritual yang disampaikannya, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW di kalangan pendengarnya (Ifansyah et al., 2023).

Kehadiran para dai perempuan ini mencerminkan beragamanya wajah dakwah kontemporer yang tidak hanya memperkuat peran perempuan dalam menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya pendekatan-pendekatan dakwah yang lebih variatif, kontekstual, dan inklusif. Namun, di tengah geliat ini, muncul pertanyaan penting: apakah para dai perempuan telah sepenuhnya terbebas dari jeratan peran ganda dan beban struktural yang selama ini melekat kuat pada identitas perempuan dalam masyarakat? Realitanya, berbagai tantangan masih membayangi kiprah dai perempuan di ranah keagamaan.

1. Stereotip terhadap Dai Perempuan

Stereotip terhadap perempuan sebagai pendakwah masih cukup kuat di banyak komunitas Muslim. Perempuan kerap kali dianggap kurang kompeten dalam menyampaikan ajaran Islam dibandingkan laki-laki, apalagi jika tema dakwah yang mereka bawaan menyentuh isu-isu sensitif seperti hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakadilan gender. Tidak jarang, dai perempuan yang menyuarakan keadilan justru dicap liberal, “kebarat-baratan”, atau menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kajian (Nurjannah, 2023), fenomena ini tampak dalam reaksi warganet terhadap Gita Savitri saat menyuarakan pilihan hidup *childfree*. Beberapa netizen langsung menganggap bahwa Gita merupakan sosok yang liberal. Pola respons semacam ini menunjukkan bahwa ketika perempuan mengemukakan pandangan yang tidak populer atau berbeda dari arus utama, mereka rentan mendapat serangan personal.

2. Pembatasan Ruang Dakwah

Ruang dakwah yang tersedia bagi perempuan masih sangat terbatas. Forum-forum dakwah utama yang strategis dan berskala luas masih banyak didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan lebih banyak diberi porsi dalam majelis-majelis tertutup yang hanya dihadiri sesama perempuan. Hal ini membuat suara dan perspektif perempuan tidak cukup terdengar dalam diskursus keislaman yang lebih luas (Ghafournia, 2020). Keterbatasan ruang ini menjadi kendala dalam menyampaikan isu-isu penting yang lebih relevan jika disuarakan oleh perempuan sendiri, seperti fikih perempuan, kesehatan reproduksi, atau kekerasan berbasis gender.

3. Beban Ganda (*Double Burden*)

Tantangan yang tidak kalah signifikan adalah beban sosial dan domestik yang masih melekat kuat pada diri perempuan. Sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga, perempuan kerap menghadapi tuntutan ganda yang menyita waktu, energi, dan ruang pikir. Di sisi lain, tugas dakwah juga menuntut konsistensi, kesiapan mental, dan mobilitas yang tidak ringan. Ketimpangan dalam pembagian peran domestik ini menjadikan kesempatan dakwah bagi perempuan lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam peran ganda ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung seperti motivasi pribadi, keinginan kuat untuk mengaktualisasikan diri, serta adanya keyakinan dan penilaian positif terhadap kemampuan diri sendiri. Banyak perempuan tetap memilih untuk aktif berdakwah karena mereka melihat peran tersebut sebagai jalan untuk memberi kontribusi lebih luas bagi masyarakat (Fitriani et al., 2020). Selain itu, peran domestik yang mereka emban juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keluarga demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, beban ganda yang dijalani tidak selalu menjadi penghalang, tetapi dapat menjadi daya dorong untuk memperjuangkan sistem sosial dan kelembagaan dakwah yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

4. Prinsip Berkeadilan Gender

Tantangan keempat berkaitan dengan keberpihakan pesan dakwah terhadap keadilan gender. Dalam beberapa kasus, terdapat dai perempuan yang justru secara tidak sadar mereproduksi pandangan patriarkal melalui ceramahnya. Contohnya adalah kontroversi ceramah Ustazah Oki Setiana Dewi di Magelang pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa seorang istri harus tetap taat kepada suami meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap tidak berpihak kepada korban dan bisa menjadi justifikasi atas KDRT.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Nurun Najwah (2022), beberapa dai perempuan seperti Mamah Dedeh dan Aisyah Dahlan, dalam konten YouTube mereka justru memperlihatkan kecenderungan memposisikan perempuan bukan sebagai manusia merdeka, tetapi sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki, dengan dalih-dalih agama. Hal ini menunjukkan bahwa dai perempuan pun tidak otomatis berpihak pada perempuan, dan penting untuk terus mengembangkan perspektif kritis dan adil gender dalam materi dakwah mereka.

Meskipun kehadiran dai perempuan telah menjadi angin segar bagi wajah dakwah Islam kontemporer, jalan yang mereka tempuh masih penuh tantangan. Tantangan ini bukan semata berasal dari luar, tetapi juga dari dalam, baik berupa beban struktural maupun kesadaran kritis terhadap isi pesan dakwah itu sendiri. Upaya kolektif untuk memperkuat kapasitas dai perempuan dan memperluas ruang partisipasi mereka dalam dakwah adalah langkah penting menuju dakwah Islam yang lebih inklusif, adil, dan membebaskan.

SOLUSI

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya mampu memberdayakan perempuan sebagai dai, tetapi juga membentuk lingkungan yang lebih terbuka dan adil bagi keterlibatan mereka.

1. Edukasi Kesetaraan Gender

Penting untuk memulai edukasi kesetaraan gender sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Konsep kesetaraan gender mengacu pada kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai sesama manusia, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, hingga keamanan. Dalam al-Qur'an, beberapa ayat seperti Q.S. al-Nisa': 124, Q.S. Ali Imran: 195, Q.S. al-Nahl: 9, Q.S. al-Tawbah: 71-72, serta Q.S. al-Ahzab: 355, menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan peran dan tanggung jawab yang sama untuk laki-laki dan perempuan, baik dari segi kehidupan spiritual hingga sanksi atas segala kesalahan (Sulistiyowati, 2020).

Mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender akan membentuk pola pikir yang menghargai hak dan peran perempuan di masyarakat. Edukasi ini juga dapat mengurangi stereotip negatif yang membatasi perempuan dalam menjalankan peran dakwah dan memfasilitasi mereka untuk berbicara dan bertindak dalam ruang-ruang publik. Dengan memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan tumbuh dengan kesadaran bahwa peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dakwah, adalah hal yang sah dan penting (Nisa & Kurniawan, 2024). Kurikulum dan bahan ajar keislaman di berbagai jenjang pendidikan juga perlu disesuaikan agar tidak melanggengkan tafsir-tafsir agama yang bias gender. Hal ini tidak lain karena persoalan ketidakadilan gender terkadang dilegitimasi oleh penafsiran tafsir ajaran agama yang bias dan menempatkan perempuan di posisi inferior.

2. Pendekatan Dakwah Kontekstual dan Humanis

Dakwah perempuan harus relevan dengan realitas kehidupan perempuan masa kini. Pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi perempuan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, dai perempuan perlu menggunakan

narasi keadilan dan kesetaraan, dengan mengedepankan pesan-pesan agama yang mendukung peran perempuan sebagai subjek yang aktif dalam masyarakat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam yang universal. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam diri perempuan masih melekat sebuah kodrat untuk menjadi ibu dan istri, sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi anak dan suami (Rizal, 2020). Pemilihan bahasa dan pendekatan yang humanis akan lebih memudahkan perempuan untuk meresapi pesan dakwah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi

Media sosial saat ini berfungsi sebagai sarana transformasi pengetahuan yang terus berkembang dalam berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, keagamaan, hingga politik dan sosial. Media sosial kini menjadi ruang ekspresi yang sangat potensial bagi dakwah perempuan. Melalui *platform* digital, perempuan dapat berbagi pengetahuan agama, pengalaman hidup, serta memperluas jangkauan dakwah ke khalayak yang lebih luas. Ustazah Halimah Alaydrus misalnya, aktif memberikan edukasi agama yang praktis dan kontekstual melalui platform digital, seperti YouTube dan Instagram. Mengoptimalkan media sosial sebagai alat dakwah dapat menjawab tantangan keterbatasan ruang fisik yang sering dihadapi oleh perempuan dalam berdakwah.

Munculnya gerakan dakwah digital perempuan, tidak hanya memperkuat integritas keilmuan perempuan ulama, tetapi juga menghadirkan narasi keagamaan yang menentang kekerasan dan radikalisme. Geliat dakwah ini membentuk pola baru yang masif dan terorganisasi, memicu lahirnya semangat baru di kalangan Ibu Nyai, ustazah, dan aktivis dakwah perempuan untuk mereformulasi gerakan dakwah yang lebih adaptif terhadap zaman (Muttaqin, 2022).

4. Pemberdayaan Perempuan dalam Studi Islam

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat peran mereka dalam dunia dakwah. Pemberdayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan status perempuan dengan tolok ukur yang maskulin, tetapi sebagai proses transformasi gender yang bertujuan menguatkan martabat, kemandirian, dan kapasitas perempuan untuk mengontrol serta mengarahkan hidupnya sendiri (Marwing & Yunus, 2021). Dalam dakwah, pemberdayaan ini diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan formal maupun informal yang setara, khususnya di lembaga keagamaan dan pendidikan tinggi. Pelatihan-pelatihan komunikasi, manajemen dakwah, dan pemanfaatan media juga sangat diperlukan agar perempuan dapat menyampaikan pesan agama secara efektif dan strategis di ruang publik.

Berbagai inisiatif telah menunjukkan geliat nyata dalam penguatan kapasitas dai perempuan. Salah satunya adalah Pengkaderan Ulama Perempuan yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, di mana tokoh seperti Nyai Badriyah Fayumi menekankan pentingnya membangun generasi ulama perempuan yang mampu menyuarakan dakwah Islam yang moderat, termasuk melalui media sosial. Selain itu, pelatihan-pelatihan seperti yang dilakukan oleh *Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism* (WGWC), Yayasan Mulia Raya, dan Magdalene, turut mendorong terbentuknya generasi muslimah milenial yang reformis, progresif, dan memiliki kesadaran sosial tinggi. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keilmuan agama, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kepedulian pada kelompok rentan, cinta tanah air, serta kemampuan menyikapi isu-isu kontemporer secara kritis. Gerakan pemberdayaan ini sejalan dengan semangat yang dibangun oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan lembaga-lembaga seperti Rahima dan AMAN Indonesia. Mereka menekankan bahwa perempuan memiliki prasyarat penting untuk berada di garis depan dalam menyampaikan dakwah yang inklusif dan damai. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan sebagai subjek dalam dakwah,

tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menghadapi isu-isu besar seperti radikalisme, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan sosial (Muttaqin, 2022).

Pada akhirnya, pemberdayaan perempuan bukan bertujuan untuk menjadikan perempuan menyaingi laki-laki, melainkan agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk mewujudkan potensi terbaiknya dalam bidang sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Perempuan yang mandiri dapat memilih untuk berkarier, mengabdikan diri di ranah publik, atau fokus di ranah domestik. Semua itu adalah keputusan sadar yang lahir dari nilai dan prinsip hidup perempuan itu sendiri. Dalam dakwah, perempuan yang diberdayakan adalah mereka yang mampu menentukan arah perjuangannya, menyuarakan nilai-nilai Islam dengan penuh tanggung jawab, dan berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

5. Kolaborasi dan Jaringan Dakwah Inklusif

Pembentukan komunitas dakwah berbasis kesetaraan merupakan langkah penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang dakwah. Komunitas ini harus menciptakan ruang yang inklusif, di mana perempuan memiliki akses yang sama dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dakwah. Peran organisasi Islam juga sangat krusial dalam mendukung partisipasi perempuan dalam dakwah, dengan memberikan wadah yang adil, memfasilitasi pengembangan keterampilan, serta memberikan platform untuk berbicara dan bertindak.

Contoh konkret dari kolaborasi dan pembentukan jaringan dakwah inklusif dapat dilihat pada inisiatif Fatayat NU bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2017. Dalam upaya menanggulangi persoalan radikalisme di kalangan masyarakat Muslim perkotaan, Fatayat NU dan BNPT melantik 500 dai perempuan anti-radikalisme pada 21 April 2017. Para dai perempuan ini dibekali pemahaman Islam yang moderat untuk menyampaikan narasi alternatif yang damai, ramah, dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Fatayat NU, sebagai organisasi perempuan Muslim terbesar di Indonesia,

dinilai mumpuni dalam melawan narasi *takfiri* dalam isu-isu kontemporer. Kredibilitas keilmuannya yang diakui di tengah masyarakat menjadikan Fatayat NU mitra strategis pemerintah dalam pendidikan keagamaan, terutama dalam menyentuh lapisan akar rumput seperti anak-anak di majelis taklim (Muttaqin, 2022).

Keberhasilan kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa jaringan dakwah perempuan yang berbasis kesetaraan dan kebangsaan bukan hanya memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai penjaga nalar keagamaan yang damai, toleran, dan kontekstual. Dukungan dari negara maupun organisasi keagamaan diperlukan untuk memperluas jangkauan dan pengaruh gerakan dakwah perempuan demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan bebas dari ekstremisme.

Berbagai solusi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan dalam medan dakwah bukanlah hambatan yang tidak terpecahkan, melainkan peluang untuk membangun sistem dakwah yang lebih adil, inklusif, dan transformatif. Mulai dari edukasi kesetaraan gender sejak dini, pendekatan dakwah yang kontekstual dan humanis, pemanfaatan media dan teknologi digital, hingga pemberdayaan dan pembentukan jaringan dakwah yang berbasis kesetaraan. Solusi-solusi ini tidak hanya menjawab keterbatasan yang ada, tetapi harapannya juga dapat membuka ruang baru bagi lahirnya wajah dakwah yang lebih segar, reflektif, dan relevan dengan realitas kehidupan umat hari ini.

REFLEKSI

Perjalanan perempuan dalam dunia dakwah kontemporer menyimpan kisah perjuangan yang tidak ringan. Di balik semakin tampaknya peran publik perempuan Muslim sebagai dai, masih terhampar tantangan yang bersifat struktural, kultural, bahkan ideologis. Stereotip, pembatasan ruang, beban ganda, dan bias dalam tafsir agama menunjukkan bahwa jalan dakwah perempuan belum sepenuhnya merdeka. Namun justru

dalam kondisi itulah semangat dakwah perempuan menemukan makna terdalamnya: sebagai perlawanan yang lembut, sebagai keteguhan dalam cinta, dan sebagai suara yang merawat kehidupan.

Refleksi ini mengajak kita untuk melihat dakwah bukan hanya sebagai aktivitas menyampaikan pesan agama, tetapi juga sebagai arena perjuangan untuk keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dakwah yang dilakukan oleh perempuan membawa warna khas yang lebih empatik, kontekstual, dan dekat dengan realitas hidup umat, terutama kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya. Melalui pendekatan yang humanis dan inklusif, perempuan tidak hanya menjadi penerima pesan agama, tetapi juga penyampai yang berdaya dan berpengaruh.

Peran perempuan dalam dakwah seharusnya tidak dilihat sebagai kompetisi terhadap laki-laki, melainkan sebagai bentuk kolaborasi menuju masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban. Ketika perempuan diberdayakan secara ilmu, dibuka aksesnya terhadap ruang publik, dan didukung untuk menyuarakan keadilan dari sudut pandang pengalamannya sendiri, maka dakwah menjadi lebih utuh—tidak hanya menyapa pikiran, tetapi juga menyentuh hati.

Kini saatnya membangun sistem dakwah yang lebih adil gender: sebuah sistem yang tidak menempatkan perempuan sebagai pengecualian, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan Islam yang inklusif, damai, dan transformatif.

DAKWAH DAN ISU LINGKUNGAN

M. Rufful Athfal

ISU

Krisis lingkungan global saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar peradaban manusia. Dari perubahan iklim, deforestasi, polusi air dan udara, hingga kepunahan spesies, dampaknya terasa di seluruh penjuru bumi (Prabowo, 2020). Namun, di beberapa wilayah, krisis ini diperparah oleh konflik bersenjata, yang bukan hanya merenggut nyawa manusia tetapi juga menghancurkan ekosistem secara brutal. Salah satu contoh paling nyata adalah kondisi lingkungan di Jalur Gaza, Palestina.

Konflik yang berkepanjangan di Gaza telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan multidimensional. Pemboman yang intensif tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mencemari tanah, air, dan udara dengan sisa-sisa bahan peledak dan puing-puing bangunan. Sumber daya air bersih, yang memang sudah langka di wilayah tersebut, semakin tercemar dan tidak layak konsumsi akibat kerusakan jaringan pipa dan fasilitas pengolahan limbah. Limbah padat menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai, menjadi sarang penyakit dan menambah beban polusi. Deforestasi terjadi untuk kepentingan logistik perang, dan lahan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal hancur lebur. Dampak langsungnya adalah peningkatan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat, mulai dari penyakit kulit, diare, masalah pernapasan, hingga potensi kanker akibat paparan zat berbahaya. Kondisi ini secara drastis menurunkan kualitas hidup masyarakat Gaza, yang sudah terhimpit oleh blokade dan krisis kemanusiaan.

Isu lingkungan di Gaza ini menjadi cermin betapa krusialnya dakwah lingkungan dalam konteks yang paling ekstrem sekalipun. Meskipun fokus utama mungkin adalah penyelamatan nyawa, namun keberlanjutan hidup di masa depan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Dalam Islam, menjaga kehidupan (*hifz* *al-nafs*) dan menjaga harta benda/lingkungan (*hifz* *al-ma>l/al-bi>ah*) adalah bagian dari tujuan syariat (*maqa>sid al-shari>'ah*). Oleh karena itu, kesadaran akan urgensi masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ilmuwan dan pembuat kebijakan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas Muslim.

SOLUSI

1. Konsep Khalifah Dan Amanah Lingkungan

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۢ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa peran manusia bukan hanya sebagai penghuni bumi, tetapi juga sebagai pengelola dan pemelihara. Konsep kekhalifahan ini mengandung amanah besar untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa “manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini, bukan untuk merusaknya, melainkan untuk membangunnya dan memanfaatkannya dengan bijaksana” (Sholihin, 2025).

2. Konsep Islam tentang Alam (Mizan) dan Larangan Perusakan

Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam (mizan). Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Rahman: 7-8:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)
 “Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.”

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Rasulullah SAW juga sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan (Azzahra & Maysithoh, 2024). Salah satu hadis yang relevan adalah:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan burung atau manusia atau binatang, melainkan baginya pahala sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan nilai pahala dalam menjaga dan menumbuhkan kehidupan, serta dampak positif dari tindakan tersebut. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga melarang perusakan lingkungan, bahkan dalam kondisi perang (Khaer, 2016). Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwatta'*, Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah berpesan kepada pasukannya: “Janganlah kamu merusak pohon-pohon, jangan membakar tanaman, dan jangan membunuh binatang kecuali yang untuk dimakan.” Ini menunjukkan universalitas ajaran Islam dalam menjaga lingkungan.

3. Etika Lingkungan dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim

Para ulama dan cendekiawan Muslim modern telah banyak membahas isu lingkungan dari perspektif Islam. Seyyed Hossein Nasr (1976) dalam karyanya *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Manusia dan Alam: Krisis Spiritual Manusia Modern) berpendapat bahwa krisis lingkungan adalah cerminan dari krisis spiritual dalam diri manusia yang telah terputus dari akar-akar ilahi (Maftukhin, 2016). Menurutnya,

solusi krisis lingkungan harus berakar pada pemulihan hubungan spiritual manusia dengan alam.

Nurcholish Madjid juga sering menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam kerangka etika Islam (Monib & Bahrawi, 2011). Ia berpendapat bahwa kemajuan peradaban tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

4. Konseptualisasi Dakwah Lingkungan sebagai Pesan Komunikasi

Dakwah lingkungan adalah upaya sistematis untuk menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya pelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam (Fitriani & Aliyudin, 2021). Dalam perspektif komunikasi, dakwah lingkungan dapat dipandang sebagai pesan persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan (Itasari, 2024). Efektivitas dakwah ini sangat bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan.

5. Strategi Komunikasi Dakwah Lingkungan

a. Pemanfaatan Media Massa dan Media Baru

Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar memiliki jangkauan yang luas untuk menyebarkan pesan dakwah lingkungan. Misalnya, melalui program talkshow, dokumenter, atau iklan layanan masyarakat. Prof. Dr. Alo Liliweri menegaskan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik (Liliweri, 2020).

Selain itu media baru seperti media sosial (Instagram, TikTok, YouTube), podcast, dan platform daring lainnya menawarkan peluang besar untuk dakwah lingkungan yang lebih interaktif dan partisipatif (Kasir & Awali, 2024). Konten-konten kreatif seperti infografis, video pendek edukatif, atau kampanye daring dapat menarik perhatian khalayak muda dan menyebarkan pesan dengan cepat.

b. Komunikasi Antarpribadi dan Kelompok

Dakwah lingkungan tidak hanya efektif melalui media massa, tetapi juga melalui komunikasi antarpribadi dan kelompok (Karim, 2016). Kegiatan seperti ceramah, pengajian, seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok kecil di masjid atau komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan dakwah secara langsung dan mendalam.

Proses membangun kedekatan emosional dan kepercayaan antara *da'i* dan *mad'u* (mitra dakwah) juga sangat penting untuk mencapai efektivitas dakwah. Pendekatan persuasif yang menyentuh hati dan akal akan lebih mudah diterima (Wahid, 2019).

c. Pendekatan Edukasi dan Literasi Lingkungan Berbasis Agama

Meningkatkan literasi lingkungan di kalangan umat Islam melalui kurikulum pendidikan agama, pesantren, madrasah, atau majelis taklim adalah krusial. Materi-materi tentang fiqh lingkungan, etika lingkungan dalam Islam, dan sejarah pelestarian alam oleh para Nabi dan ulama dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dan pencerahan (Freire, 2024).

d. Peran Juru Dakwah dalam Dakwah Lingkungan

Juru dakwah memiliki peran sentral sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku ramah lingkungan (Awang Darmawan & Rina Desiana, 2020). Kredibilitas dan kompetensi *da'i* dalam memahami isu lingkungan serta mengkomunikasikannya dengan baik akan sangat menentukan keberhasilan dakwah lingkungan.

6. Tantangan dan Prospek Dakwah Lingkungan

a. Tantangan dalam Pelaksanaan Dakwah Lingkungan

Meskipun urgensi dakwah lingkungan semakin meningkat, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Minimya kesadaran awal: masih banyak masyarakat yang belum menyadari seriusnya krisis lingkungan atau menganggapnya sebagai masalah sekunder.
- 2) Kesenjangan pengetahuan: kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang relevan dengan isu lingkungan di kalangan sebagian *da'i* maupun masyarakat.
- 3) Resistensi perubahan perilaku: mengubah kebiasaan yang tidak ramah lingkungan memerlukan upaya berkelanjutan dan kadang menemui resistensi.
- 4) Keterbatasan sumber daya: baik sumber daya finansial, SDM, maupun infrastruktur untuk mendukung program dakwah lingkungan yang komprehensif.

b. Prospek dan Arah Pengembangan Dakwah Lingkungan

Prospek dakwah lingkungan sangat cerah mengingat semakin meningkatnya kesadaran global dan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa arah pengembangan ke depan meliputi:

- 1) Integrasi kurikulum: mengintegrasikan isu lingkungan secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan Islam di semua jenjang.
- 2) Kolaborasi *multistakeholder*: membangun kemitraan antara lembaga dakwah, pemerintah, LSM lingkungan, akademisi, dan sektor swasta untuk gerakan dakwah lingkungan yang lebih masif.
- 3) Inovasi media dakwah: terus berinovasi dalam penggunaan media digital dan platform baru untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
- 4) Pemberdayaan komunitas: mendorong terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan berbasis masjid atau pesantren yang aktif melakukan aksi nyata.

REFLEKSI

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya menggambarkan kerusakan fisik pada alam semesta, tetapi juga merefleksikan krisis spiritual dan etika dalam relasi manusia dengan ciptaan Tuhan. Dalam pandangan Islam, amanah kekhalifahan yang diemban manusia bukan sekadar

simbol keunggulan, melainkan panggilan untuk bertanggung jawab menjaga keseimbangan (*mizan*) dan keberlanjutan bumi sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Dakwah lingkungan hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan zaman, di mana isu ekologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual umat manusia. Peran dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran, tetapi menjadi jembatan moral yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan tindakan konkret pelestarian lingkungan. Refleksi ini menegaskan bahwa dakwah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).

Pentingnya pendekatan dakwah yang holistik—yang menggabungkan strategi komunikasi, keteladanan perilaku, dan penguatan pendidikan berbasis nilai Islam—merupakan langkah fundamental dalam membentuk kesadaran ekologis kolektif. Upaya ini bukan hanya bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku umat, tetapi juga membangun budaya baru yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah sehari-hari.

Dalam konteks ini, peran *da'i*, institusi keagamaan, dan media dakwah sangat strategis untuk memperluas jangkauan pesan pelestarian alam. Ketika nilai-nilai Islam diinternalisasi dalam kehidupan ekologis, maka dakwah tidak hanya berfungsi sebagai seruan moral, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif yang mampu menciptakan masyarakat berkeadaban ekologis.

Dengan demikian, dakwah lingkungan perlu terus dikembangkan, didukung, dan diarusutamakan agar menjadi bagian integral dari gerakan keagamaan kontemporer. Menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga amanah teologis yang menuntut komitmen lintas generasi.

DAKWAH DI DUNIA POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kasus Dinamika Dakwah Habib Rizieq dan FPI

Ali Murtaadlo

ISU

Habib Rizieq Shihab adalah seorang ulama karismatik keturunan Arab-Yaman yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang tegas dan provokatif. Habib Rizieq Shihab mendirikan Front Pembela Islam (FPI) pada 17 Agustus 1998, di tengah gelombang reformasi yang menuntut perubahan politik dan sosial di Indonesia dan tidak lama setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Mujibuddin, 2022). FPI awalnya dibentuk sebagai organisasi yang bertujuan untuk "memberantas kemaksiatan dan menegakkan syariat Islam." Namun, seiring berjalannya waktu, FPI berkembang menjadi gerakan sosial-politik yang memiliki pengaruh signifikan di Indonesia.

Habib Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam (FPI) telah menjadi aktor penting dalam dinamika politik Indonesia, terutama dalam dua dekade terakhir. Melalui dakwah dan aksi-aksi massa, mereka berhasil mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah, dan interaksi antara kelompok Islam konservatif dengan kekuatan politik lainnya. Pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga merambah ke ranah politik, sosial, dan budaya.

Dalam perkembangannya, FPI dan Habib Rizieq mulai mengambil peran lebih besar dalam politik, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan pemerintahan (Ichwan, 2016). FPI dikenal karena aksi-aksi sweeping terhadap tempat-tempat yang dianggap maksiat, seperti klub malam, tempat

hiburan, dan lokasi yang menjual alkohol. Selain itu, FPI juga aktif dalam isu-isu politik, terutama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam dan perlindungan umat Islam dari ancaman yang dianggap merusak moral dan agama. Salah satu momen penting yang menunjukkan pengaruh FPI dalam politik adalah aksi demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi 212 pada tahun 2016 (Sholikin, 2018). Aksi ini menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dituduh melakukan penistaan agama. Keberhasilan mobilisasi massa dalam aksi ini menjadi bukti kuatnya pengaruh FPI dan Habib Rizieq dalam membentuk opini publik serta mempengaruhi kebijakan politik.



Sumber: BERITASATU

1. Mobilisasi Massa dan Pengaruh Opini Publik

Salah satu kekuatan utama FPI dan Habib Rizieq adalah kemampuannya untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar. FPI dikenal sebagai organisasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam memobilisasi massa untuk menyuarakan tuntutan politik dan sosial (Firmansyah, 2019). FPI memiliki jaringan yang kuat di berbagai daerah, terutama di Jawa, dan mampu menggerakkan ribuan hingga ratusan ribu orang untuk turun ke jalan dalam waktu singkat. Kemampuan mobilisasi ini terlihat jelas dalam serangkaian aksi yang dikenal sebagai 'Aksi

Bela Islam' pada tahun 2016-2017. Demonstrasi yang dilakukan oleh FPI, seperti Aksi Bela Islam 212, menunjukkan bahwa organisasi ini dapat menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Mobilisasi massa yang besar tidak hanya memberikan tekanan kepada pemerintah, tetapi juga memengaruhi keputusan politik serta kebijakan yang berkaitan dengan umat Islam.

Aksi Bela Islam dipicu oleh kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta (Saputra & Sutiadi, 2020). Habib Rizieq dan FPI memainkan peran kunci dalam mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang menuntut Ahok diadili. Aksi ini tidak hanya berhasil mempengaruhi opini publik, tetapi juga menciptakan tekanan politik yang besar terhadap pemerintah. Ahok akhirnya dihukum dan dipenjara, meskipun banyak pihak yang menganggap keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan massa dan politisasi isu agama. Aksi Bela Islam menunjukkan bagaimana FPI dan Habib Rizieq mampu memanfaatkan sentimen keagamaan untuk memobilisasi massa dan mempengaruhi proses politik. Aksi ini juga menciptakan polarisasi dalam masyarakat Indonesia, antara kelompok yang mendukung penegakan nilai-nilai agama dalam politik dan kelompok yang lebih mendukung pluralisme dan sekularisme.

Dari kejadian inilah Habib Rizieq dan FPI juga sering menjadi aktor utama dalam berbagai aksi protes yang menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam. FPI mampu menciptakan tekanan politik yang memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakannya. Contohnya adalah dalam kasus Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2017, yang kemudian menjadi dasar bagi pembubaran FPI pada tahun 2020. Meski demikian, pembubaran tersebut tidak serta-merta menghilangkan pengaruh Habib Rizieq dalam politik, karena gerakan yang dipimpinnya tetap memiliki basis pendukung yang solid.



Sumber : BERITASATU

2. Narasi Keagamaan dan Politik Identitas

Dakwah Habib Rizieq dan FPI seringkali menekankan pentingnya penegakan syariat Islam dan perlindungan umat Islam dari ancaman yang dianggap merusak moral dan agama (Putra, 2020). Narasi ini menarik bagi sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia, terutama di kalangan konservatif, yang merasa bahwa nilai-nilai keagamaan mereka terancam oleh modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya Barat.

FPI menggunakan narasi ini untuk membangun identitas politik yang kuat. Mereka menciptakan dikotomi antara "umat Islam" yang harus dilindungi dan "musuh-musuh Islam" yang dianggap merusak moral dan agama. Musuh-musuh ini bisa berupa kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah, atau kelompok yang dianggap sekuler dan liberal, seperti aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil.

Narasi ini tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya, tekanan dari FPI dan kelompok Islam konservatif lainnya telah menyebabkan pemerintah lebih berhati-hati dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan agama, seperti penistaan agama dan kebebasan beragama.

Di channel Youtube dalam akun *arkana212* menampilkan pidato Habib Rizieq yang menjelaskan politik identitas (Triantoro, 2019). Dalam pidatonya Habib Rizieq memaparkan saat pemilihan pemimpin, secara konotasi umat disuruh memilih antara serigala sama buaya. Jika seperti ini, jangankan umat

kyai saja bingung, yang harus memilih antara serigala dan buaya. Hal ini terjadi, menurut Habib Rizieq karena partai politik yang ada tidak ada lagi yang memperjuangkan agama. Jika ada yang memperjuangkan agama, maka disebutlah Politik Identitas. Politik identitas disini adalah politik yang membawa-bawa identitas agama.

3. Interaksi dengan Kekuatan Politik

FPI dan Habib Rizieq memiliki hubungan yang kompleks dengan kekuatan politik di Indonesia. Di satu sisi, mereka seringkali berseberangan dengan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebebasan beragama. Di sisi lain, mereka juga memiliki hubungan dengan beberapa partai politik dan tokoh-tokoh politik yang memanfaatkan dukungan massa FPI untuk kepentingan elektoral. Dalam berbagai pemilu, FPI dan Habib Rizieq kerap memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap sejalan dengan perjuangan Islam (Effendi & Syafrudin, 2020). Hubungan ini menunjukkan bahwa FPI memiliki peran dalam membentuk koalisi politik berbasis Islam.

Selama Aksi Bela Islam, beberapa tokoh politik terlihat mendukung atau memanfaatkan aksi tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka di kalangan pemilih Muslim konservatif. Misalnya, Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra, dan Anies Baswedan, yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, terlihat hadir dalam aksi tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana FPI dapat menjadi kekuatan pendukung bagi politisi tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum. Selain itu dalam Pemilu 2019, misalnya, Habib Rizieq secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dukungan ini memberikan dorongan bagi pasangan tersebut dalam memperoleh suara dari kelompok Muslim konservatif. Meskipun pasangan ini kalah dalam pemilu, peran FPI dalam membangun narasi politik berbasis agama tetap menjadi faktor penting dalam kontestasi politik nasional.

Namun, hubungan FPI dengan kekuatan politik tidak selalu harmonis. Pada Desember 2020, pemerintah Indonesia membubarkan FPI dengan alasan bahwa organisasi tersebut tidak memiliki izin resmi dan terlibat dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra, dengan beberapa pihak mendukung keputusan pemerintah dan pihak lain mengkritiknya sebagai upaya untuk membungkam suara kelompok Islam konservatif.



Sumber : KOMPASTV

4. Dampak Pembubaran FPI terhadap Politik Indonesia

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia resmi membubarkan FPI dengan alasan bahwa organisasi ini kerap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum (Damaitu & Wada, 2017). Pembubaran ini menandai berakhirnya eksistensi resmi FPI sebagai organisasi, tetapi tidak serta-merta menghilangkan pengaruh Habib Rizieq dan jaringan pendukungnya dalam politik Indonesia. Pembubaran FPI menandai babak baru dalam hubungan antara kelompok Islam konservatif dan pemerintah. Meskipun FPI secara resmi telah dibubarkan, pengaruh Habib Rizieq dan jaringan pendukungnya masih tetap ada, terutama di kalangan masyarakat Muslim konservatif. Habib Rizieq sendiri sempat melarikan diri ke Arab Saudi setelah kasus hukum yang

menimpanya, tetapi ia kembali ke Indonesia pada 2020 dan kembali menjadi sorotan publik.

Selain itu adanya Polarisasi (terbagi 2 bagian) Politik yang semakin kuat. FPI dikenal sebagai kelompok yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama terkait kebijakan yang dianggap tidak pro-Islam. Pembubaran FPI memperdalam polarisasi antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi, terutama di kalangan umat Islam konservatif.

Setelah FPI dibubarkan, ada dinamika perubahan oposisi. sebagian pendukungnya bergabung dengan kelompok oposisi lainnya, seperti PA 212 dan Habib Rizieq Shihab Center. Mereka tetap mengkritik pemerintah, tetapi dengan strategi baru, seperti lebih banyak menggunakan media sosial dan forum dakwah.

Penguatan Peran Negara dalam Mengontrol Ormas. Pembubaran FPI menjadi preseden (sbg contoh/sbg rujukan) bagi pemerintah dalam mengontrol organisasi masyarakat yang dianggap berseberangan dengan negara. Hal ini terlihat dari langkah serupa terhadap ormas lain, seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sebelumnya dibubarkan pada 2017. Sejak pembubaran FPI, tidak ada lagi mobilisasi massa besar oleh kelompok ini dalam agenda politik seperti Pemilu. Namun, wacana "perlawanan" tetap muncul dalam politik elektoral, di mana mantan anggota FPI mendukung calon-calon yang mereka anggap mewakili kepentingan Islam. Seperti Alif Akbar eks FPI dan beberapa simpatisan yang lain mendukung Anies baswedan dalam pilpres 2024.



Sumber : detikcom

5. Kontroversi Dakwah HRS

Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, FPI dan Habib Rizieq juga menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan. FPI sering dituduh melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok minoritas, yang menyebabkan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Selain itu, gaya dakwah Habib Rizieq yang provokatif juga sering menimbulkan kontroversi.

Tuduhan intoleransi dan radikalisme juga dituduhkan ke HRS. Isu toleransi dituduhkan karena HRS sering melakukan aksi-aksi *sweping* tempat hiburan, penolakan terhadap kelompok minoritas (Syaefudin, 2014). Selain intoleransi HRS juga dianggap mendekatai narasi islam radikal seperti dukungan terhadap penerapan syariat islam secara kaku dan kritik terhadap sistem demokrasi.

Selain hal diatas, HRS juga terlibat dalam politik praktis. Seperti mendukung calon tertentu dalam pilkada atau pemilu (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Hal ini menimbulkan kritik bahwa dalam dakwahnya dicampur dengan kepentingan politik. Aksi 212 (2016) menunjukkan bhw HRS menjadi tokoh sentral yang awalnya menuntut penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok. Hal ini dianggap sbg momen adanya politik identitas islam namun juga memicu kekhawatiran akan polarisasi masyarakat.

HRS juga tersangkut masalah hukum. Diantaranya kasus pornografi (2017) yang mana HRS dilaporkan ke polisi terkait dugaan chat mesum yg viral di medsos (Amallah, n.d.). Kasus ini menuai pro dan kontra. Pendukungnya menganggap sbg upaya kriminalisasi. Selain *chat* mesum, HRS juga tersangkut hukum perihal pelanggaran protocol Kesehatan selama pandemi Covid-19. HRS dianggap melanggar protocol Kesehatan dengan mengadakan acara besar yakni pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang.

Ke depan, peran kelompok seperti FPI akan terus menjadi bahan perdebatan dalam upaya Indonesia untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama, pluralisme, dan demokrasi.

SOLUSI

Dinamika politik yang melibatkan HRS menimbulkan sejumlah tantangan, seperti polarisasi, intoleransi, dan potensi konflik horizontal. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan.

1. Penguatan Dialog dan Moderasi Beragama

Penguatan dialog dan moderasi beragama merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial di Indonesia yang multikultural. Dialog antaragama dan internal umat beragama berfungsi sebagai sarana utama untuk membangun saling pengertian, menghormati perbedaan, serta mengurangi potensi konflik yang muncul

akibat perbedaan keyakinan dan pandangan politik (Machali, 2013).

Dialog yang efektif tidak bertujuan untuk menyebarkan agama atau mendiskreditkan kelompok lain, melainkan untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas antarumat beragama melalui berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan (persaudaraan sehari-hari), dialog karya (kerjasama dalam kegiatan sosial), dialog teologis (antar ahli agama), dan dialog pengalaman iman (berbagi pengalaman spiritual). Pendekatan ini menumbuhkan sikap keterbukaan dan penghargaan terhadap keunikan ajaran masing-masing agama tanpa memaksakan keseragaman.

Secara umum, moderasi mendorong toleransi, sikap seimbang, dan menolak ekstremisme dalam praktik keagamaan. Konsep ini menekankan pentingnya tengah (*al-wasathiyah*) yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pendidikan agama. Melalui moderasi, masyarakat dapat mengamati stabilitas sosial dan mengenali kekerasan atau fanatisme yang dapat berbahaya.

Peran tokoh agama dan pemerintah sangat membantu dalam mendorong dialog dan moderasi ini. Melalui pendidikan agama yang inklusif, pengembangan kurikulum moderat, dan forum dialog antaragama seperti yang disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, kerangka untuk memupuk toleransi dan gagasan diciptakan. Kepemimpinan agama moderat juga memainkan peran kunci dalam menangani radikalisasi dan menyoroti sentimen perdamaian.

Selain itu, seperti yang dicatat oleh pemimpin agama di seluruh dunia, termasuk Paus Fransiskus, dalam kunjungannya ke Indonesia, dialog antaragama dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi ekstremisme dan radikalisme. Diskusi ini bukan hanya bersifat teoretis; ini juga menguraikan langkah-langkah praktis untuk menciptakan masyarakat yang beragam dan inklusif dengan mendorong saling pengertian dan meningkatkan hubungan kerja dengan pemimpin agama.

Dengan cara ini, dialog dan moderasi berfungsi sebagai fondasi utama untuk mencegah polarisasi, mendorong persatuan, dan memastikan bahwa perbedaan politik tidak berkembang

menjadi konflik sosial yang mempengaruhi seluruh populasi Indonesia. Ini harus selalu dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, pemimpin agama, dan masyarakat umum. Hanya dengan cara itulah akan ada kehidupan yang harmonis dan damai.

2. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang konsisten dan adil merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara serta mencegah munculnya persepsi kriminalisasi politik (Waluyo, 2022). Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, baik terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) maupun kelompok lain, agar hukum dapat berlaku setara bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.

Konsistensi dalam penegakan hukum mencakup penerapan aturan yang transparan dan profesional, bebas dari intervensi politik, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu (Tarigan, 2024). Sangat penting bagi masyarakat umum untuk memahami bahwa hukum adalah alat untuk keadilan, bukan alat politik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah komite untuk memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar menjadi lebih independen, efektif, dan progresif dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk yang berdampak pada seluruh negara.

Selain itu, reformasi hukum yang sedang berlangsung, seperti revisi KUHP dan KUHAP, bertujuan untuk mengurangi multitafsir dan penggunaan hukum, yang secara historis telah menjadi sumber ketidakadilan. Konsistensi hukum juga harus dikejar bersamaan dengan peningkatan kapasitas aparat dan transparansi dalam proses hukum untuk mencegah keputusan yang diskriminatif atau semena-mena.

Pentingnya mematuhi dan mempertahankan hukum yang konsisten juga dibahas dalam konteks internasional, di mana tidak mungkin bagi bisnis untuk mengabaikan hukum dan standar harus diterapkan secara konsisten. Pemahaman masyarakat tentang hukum harus ditingkatkan melalui pendidikan dan

penegakan hukum yang konsisten agar kesadaran hukum meningkat dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Konsistensi dan keadilan hukum dapat mengurangi potensi konflik politik yang diakibatkan oleh aktivitas kriminal, meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukumnya, serta menghasilkan iklim politik yang sehat dan demokratis di Indonesia.

3. Pendidikan Politik dan Literasi Media

Pendidikan politik dan literasi media sangat penting untuk membekali masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang kerap dimanfaatkan dalam mobilisasi politik (Widiatmaka & Yuliandari, 2024). Pendidikan politik memberikan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara menilai informasi politik secara kritis.

Sementara literasi media mengajarkan masyarakat untuk mengenali informasi yang benar dan hoaks, memahami konteks berita, serta menghindari penyebaran disinformasi yang dapat memicu konflik sosial (Nisa, 2024).

Menurut Pemilu 2024, banyak inisiatif pendidikan politik dan literasi media yang dilakukan untuk kepentingan kaum muda dan generasi muda, yang sangat bermanfaat mengingat dampak media sosial dan informasi yang tidak akurat. Tujuan dari program pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik sekaligus mengajarkan cara mengkomunikasikan informasi agar tidak terdistorsi dengan cara yang berbasis isu SARA.

Selain berfungsi sebagai sumber informasi, media independen dan netral juga menyediakan pendidikan politik yang akurat dan komprehensif sehingga masyarakat umum dapat memperoleh opini politik yang tidak bias dan berbasis fakta. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, media, dan masyarakat umum sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi publik bersifat konstruktif dan bebas dari provokasi.

Di sisi lain, literasi digital yang mendukung keluarga, sekolah, dan komunitas juga sangat penting untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling pengertian di dunia Maya. Dengan demikian, pendidikan politik dan literasi media berfungsi sebagai pilar utama untuk membangun demokrasi yang sehat, menyelesaikan konflik sosial, dan meningkatkan martabat Bangsa Indonesia.

Perlu memberikan pendidikan politik yang baik dan literasi media kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik.

4. Rekonsiliasi dan Inklusi Politik

Upaya rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berseberangan, termasuk Habib Rizieq Shihab (HRS) dan loyalisnya, merupakan langkah penting untuk meredakan ketegangan politik dan sosial di Indonesia. Rekonsiliasi ini bertujuan mengembalikan suasana dialog yang sehat dan menurunkan polarisasi yang selama ini memperuncing perbedaan di masyarakat (Khasanah & Wawuan, 2023).

Rekonsiliasi tidak dapat diselesaikan tanpa dialog yang penuh dan terbuka antara semua pihak. HRS sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog yang mendukung FPI dan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, ada banyak pengamat yang menilai potensi rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan HRS, tetapi mereka masih sebagian besar bersifat simbolis dan tidak menangani situasi yang sebenarnya. Namun, ini masih dianggap sebagai langkah penting oleh beberapa anggota masyarakat untuk mengurangi konflik horizontal dan memperkuat politik pascapemilu.

Selain rekonsiliasi, pemahaman politik juga merupakan aspek kunci. Mendorong dialog yang sehat dan membina hubungan di antara semua pihak yang terlibat, termasuk peserta HRS, dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat demokrasi yang inklusif. Inklusi politik memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk dilibatkan dan diakomodasi

dalam proses penyusunan keputusan, sehingga mengurangi keterasingan politik dan ketidakadilan.

Namun, rekonsiliasi dan pemahaman politik tidak boleh dikaitkan dengan indikator-indikator pribadi seperti pemulangan HRS, yang tidak relevan dan berpotensi menghambat proses rekonsiliasi. Fokus utama harus pada pengembangan komunikasi konstruktif yang menyoroti kepentingan nasional dan persatuan Bangsa.

Dengan demikian, rekonsiliasi dan inklusi politik menjadi jalan keluar strategis untuk meredam ketegangan politik, mengurangi polarisasi, dan menciptakan iklim politik yang lebih stabil dan harmonis di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Langkah ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, tokoh politik, maupun masyarakat luas, untuk mewujudkan dialog yang terbuka dan saling menghargai demi kepentingan bersama.

5. Penguatan Peran Tokoh Agama Moderat

Penguatan peran tokoh agama moderat sangat krusial dalam menjaga kerukunan dan memperkuat moderasi beragama di Indonesia yang multikultural (Amtiran & Kriswibowo, 2024). Tokoh agama moderat diharapkan aktif menyampaikan pesan-pesan damai, toleransi, dan saling menghormati antarumat beragama, sehingga menjadi penyeimbang dalam diskursus politik keagamaan yang cenderung keras dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Sebagai sosok yang dihormati dan dipercaya, pemuka agama memiliki peran penting dalam membentuk sikap serta perilaku para pengikutnya. Mereka diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengamalkan prinsip-prinsip moderasi beragama, tidak hanya lewat nasihat atau ceramah, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Selain itu, pemuka agama yang moderat turut berkontribusi secara aktif dalam membangun dialog yang inklusif antarumat beragama guna memperkuat toleransi dan mencegah munculnya radikalisme maupun ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

Di tengah berlangsungnya pesta demokrasi, peran pemuka agama yang moderat menjadi semakin krusial dalam mengangkat nilai-nilai keberagaman dan persatuan, serta mencegah pemanfaatan isu agama untuk kepentingan politik yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Para tokoh agama sebaiknya mendorong terwujudnya dialog yang terbuka dan saling memahami, memandang perbedaan sebagai aset, bukan sebagai ancaman, sehingga tercipta iklim politik yang damai dan harmonis.

Beberapa tokoh moderat seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Dr. Azyumardi Azra, Buya Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin telah memberikan inspirasi besar dalam mengembangkan moderasi beragama di Indonesia. Mereka menonjolkan pentingnya sikap pluralisme, inklusivitas, serta penolakan terhadap kekerasan atas nama agama, dan secara aktif terlibat dalam dialog lintas agama demi menjaga keharmonisan sosial

Tokoh agama moderat juga memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti YouTube untuk menyebarkan pendidikan moderasi beragama, khususnya kepada generasi milenial yang rentan terhadap pengaruh narasi ekstremis. Dengan pendekatan edukatif melalui konten yang kreatif dan menarik, mereka berupaya menangkis pengaruh radikalisme sekaligus memperkuat sikap toleransi di kalangan anak muda

Secara keseluruhan, penguatan peran tokoh agama moderat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia, dengan memastikan bahwa pesan keagamaan yang disampaikan selalu dalam bingkai moderasi, damai, dan toleran, sehingga dapat meredam potensi konflik dan memperkokoh persatuan bangsa (Tlonaen & Saingo, 2023).

REFLEKSI

Fenomena dakwah politik yang diperankan oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Front Pembela Islam (FPI) menyuguhkan gambaran kompleks tentang pertemuan antara agama, kekuasaan, dan ruang publik di Indonesia. Dakwah tidak lagi semata-mata sebagai penyampai pesan moral dan spiritual, tetapi telah merambah ke ranah mobilisasi politik, pembentukan opini publik, dan bahkan konfrontasi dengan negara. Dinamika ini menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana dakwah dapat tetap mencerahkan ketika dibalut oleh narasi politik identitas dan potensi polarisasi?

Refleksi ini mengajak kita menyadari bahwa kekuatan dakwah terletak bukan hanya pada jumlah massa yang berhasil digerakkan, tetapi pada nilai-nilai yang dibawanya—apakah dakwah menjunjung kedamaian, inklusi, dan keadilan sosial, atau justru memperkeras sekat sosial dan memperdalam konflik horizontal. Ketika dakwah terlalu lekat dengan kepentingan politik praktis, risikonya bukan hanya distorsi pesan agama, tetapi juga terganggunya kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Kita perlu mendorong model dakwah yang membangun, bukan menghasut; yang mengajak berpikir kritis, bukan sekadar ikut arus; dan yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai intisari ajaran Islam. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal lumrah. Namun, semangat dakwah seharusnya menjadi energi perekat bangsa, bukan bahan bakar bagi konflik.

Masa depan Indonesia yang damai dan demokratis tidak dapat dilepaskan dari peran dakwah yang tercerahkan—yang mampu berdiri di tengah, memberi arah moral, dan menjembatani perbedaan. Untuk itu, kita semua, baik dai, umat, maupun negara, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga agar dakwah tetap berada di jalan yang mencerdaskan dan mempersatukan.

EKONOMI ISLAM DAN DAKWAH

Tantangan Kapitalisme dalam Booming Industri Halal Global

Hesty Putri Utami

ISU

Halal menjadi isu penting di ranah perekonomian di Indonesia karena dirasa dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk dapat dinikmati di luar negeri dengan *takeline* halal. Dalam kurun enam tahun terakhir, ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 7,08%. Adapun nilai ekspor produk halal Indonesia tahun 2024 mencapai USD 51,4 miliar atau tumbuh sebesar 1,70% (yoy) yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 81,16% dari total ekspor produk halal Indonesia dikutip dari Media Keuangan MK+. Hal ini menunjukkan bahwa produk halal memiliki peran penting dalam perekonomian dunia. Seiring dengan dinamika ekonomi global, ekonomi syariah kini dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang dibutuhkan oleh dunia dan mulai menarik perhatian di berbagai kawasan.

Bagi Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, kondisi tersebut menjadi peluang strategis untuk menjadikan industri halal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Konsep halal telah berkembang menjadi indikator universal dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Industri halal pun tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu,

keberadaan industri halal perlu terus dikembangkan dan dijaga kelangsungannya. (Sungkawaningrum & Nasrullah, 2019).

Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, hal tersebut belum mampu menjadikannya sebagai pemain utama dalam penyediaan komoditas halal di tingkat global. Fakta ini tercermin dari belum berhasilnya Indonesia menembus peringkat 10 besar di seluruh sektor industri halal. Bahkan untuk sektor makanan halal yang merupakan kebutuhan pokok bagi umat Muslim Indonesia masih belum dapat memenuhinya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi besar yang dimiliki dengan realitas industri halal yang berkembang di dalam negeri. Akibatnya, Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen dalam pasar industri halal global. Kini, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah nyata untuk bangkit dan tampil sebagai panutan dalam pengembangan industri halal dunia. Pemerintah pun telah menyatakan visinya agar Indonesia menjadi pusat industri halal global. Untuk mewujudkan visi tersebut, kesenjangan yang ada harus segera diatasi secara sistematis dan berkelanjutan (Fathoni, 2020).

Sebagai upaya untuk menjadi negara yang menjadi kiblat halal di dunia, Indonesia memiliki peran penting disertai dengan tantangan untuk mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Bukan hanya tentang regulasi tetapi juga tentang kesiapan sarana prasarana yang ada dan dukungan sumber daya manusia sebagai bentuk kesiapan yang matang untuk menjadi kiblat halal dunia. Dalam kerangka manajemen halal yang dikembangkan oleh Kementerian Bappenas melalui publikasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, konsep halal *by design* yang berlandaskan prinsip syariat Islam terkait proses produksi dan pengolahan barang—yakni memenuhi standar halal dan *thayyib* didorong untuk menjadi paradigma baru dalam industri global. Dengan mengedepankan dua prinsip utama tersebut, diharapkan pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Pujayanti, 2020).

Peran masyarakat Indonesia untuk mewujudkan halal global menjadi utama, karena bukan hanya sebagai subyek dalam pelaksanaannya juga sebagai obyek dalam proses perepannya. Sehingga peningkatan literasi halal di kalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun secara global, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Saat ini, tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu halal masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 16,3%. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mendorong kampanye dan edukasi halal secara masif. Kesadaran publik harus terus dibentuk agar konsep halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup (*halal lifestyle*). Jika kesadaran ini berhasil ditingkatkan secara luas, maka permintaan terhadap produk halal pun akan tumbuh secara signifikan (Hasyim, 2023).

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) menjadi sebuah peluang strategis sekaligus tantangan nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan yang adaptif untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring dengan semakin menguatnya arus utama halal di tingkat global. Konsep halal tidak lagi terbatas pada dimensi keagamaan semata, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang diakui secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa produk halal memberikan nilai lebih berupa rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan yang dibutuhkan oleh konsumen di berbagai belahan dunia (Rachim & Santoso, 2021). Adapun isu-isu strategis yang memicu tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat industri halal sebagai berikut.

1. Halal Lifestyle: Konsumsi Islami yang Konsumtif

Fenomena gaya hidup halal saat ini kerap dikemas dalam bentuk tren komersial, seperti dalam industri fesyen, kosmetik, hingga pariwisata. Sayangnya, pendekatan ini justru cenderung mendorong perilaku konsumtif dan hedonistik di kalangan masyarakat. Hal ini tercermin dari maraknya penyelenggaraan pameran produk halal yang megah dan eksklusif, yang pada

akhirnya menjauh dari nilai kesederhanaan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, dakwah memiliki peran penting untuk meluruskan pemahaman mengenai konsep halal, agar tetap berakar pada prinsip-prinsip kesederhanaan, keadilan sosial, serta spiritualitas yang mendalam.

Secara ekonomi, perilaku konsumsi yang berlebihan dapat menjerumuskan individu ke dalam lingkaran utang yang sulit dihindari. Banyak orang tergoda oleh berbagai bentuk iklan dan promosi menarik, sehingga akhirnya membeli barang-barang yang tidak esensial dan melebihi kemampuan keuangan mereka. Akibatnya, terjadilah pemborosan sumber daya karena fokus individu lebih banyak diarahkan pada pengeluaran konsumtif dibandingkan menabung atau melakukan investasi jangka panjang. Dalam jangka waktu yang lebih lama, pola konsumsi seperti ini dapat merusak kestabilan keuangan pribadi dan turut memberi dampak negatif terhadap perekonomian secara umum. Ketika sebagian besar masyarakat terjebak dalam utang, daya beli pun menurun, dan kondisi ini dapat berkontribusi terhadap risiko terjadinya perlambatan atau krisis ekonomi.

Selain implikasi ekonomi, konsumsi yang berlebihan juga membawa konsekuensi serius bagi lingkungan hidup. Permintaan tinggi terhadap produk konsumen memicu eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, yang pada gilirannya merusak ekosistem alam. Proses produksi barang-barang tersebut sering menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang mencemari lingkungan. Selain itu, pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan juga memperburuk krisis iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari berbagai tahap produksi dan distribusi barang. Dengan demikian, konsumsi berlebihan tidak hanya melemahkan aspek ekonomi, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan secara global (Nadhifah & Syakur, 2025).

2. Ketimpangan Akses UMKM Muslim terhadap Industri Halal

Besarnya potensi pasar industri halal global mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan sektor ini. Pertumbuhan populasi Muslim yang terus meningkat,

termasuk di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Eropa, Amerika, dan Australia, menciptakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Bagi pelaku UMKM di Indonesia, kondisi ini menjadi kesempatan emas untuk menembus pasar global, asalkan mereka mampu bersaing dengan negara-negara produsen lainnya melalui peningkatan standar kualitas produk dan daya saing yang kuat. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah dominasi negara-negara non-Muslim dalam pasar industri halal global, termasuk dalam penyediaan produk halal di pasar domestik seperti makanan, minuman, dan fesyen, padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Seiring dengan bertambahnya populasi Muslim secara global, permintaan terhadap konsumsi produk halal juga akan meningkat signifikan, khususnya di sektor makanan, minuman, dan pakaian yang memiliki peluang besar untuk merambah pasar internasional. Ketertarikan umat Islam terhadap kajian keislaman serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup halal turut mendorong pertumbuhan industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya aspek spiritual yang diperhatikan, tetapi juga manfaat produk halal terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sektor industri halal harus dikembangkan dengan strategi yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan konsumen global dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal dunia (Hasyim, 2023).

Salah satu kendala utama dalam proses pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah keterbatasan jumlah serta kualitas tenaga pembina yang tersedia. Kegiatan pembinaan sering kali tidak berjalan optimal karena para pembina belum memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman. Selain itu, dukungan anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan, sehingga program-program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Di sisi lain, tantangan juga datang dari para pelaku IKM itu sendiri. Banyak dari mereka yang masih memiliki pola pikir konsumtif dan belum menunjukkan kesiapan mental untuk berkembang secara mandiri. Kurangnya perencanaan yang matang dalam mengikuti atau menjalankan kegiatan pembinaan juga membuat hasilnya kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa selain dari sisi pembina, kesiapan dan kesadaran dari pelaku IKM juga perlu ditingkatkan agar proses pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata (Bakhri, 2020).

3. Lemahnya Peran Negara dalam Regulasi Industri Halal

Sertifikasi halal untuk produk dan pangan di Indonesia merupakan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang pelaksanaannya merujuk pada berbagai regulasi nasional. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mendukung. Kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan pada individu atau tokoh agama, melainkan juga merupakan kewajiban negara melalui regulasi dan pengawasan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah yang mengatur sertifikasi halal, setiap produsen atau pelaku usaha yang membuat dan mendistribusikan produk ke wilayah Indonesia serta menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam, harus siap bertanggung jawab atas klaim tersebut. Oleh karena itu, pencantuman label halal menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan. Label tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada konsumen dan memastikan bahwa produk benar-benar sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan (Bakhri, 2020). Secara teknis, tugas pemeriksaan dan pengkajian kehalalan

produk dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang berada di bawah naungan MUI. LPPOM MUI memiliki mandat untuk mengevaluasi kelayakan produk dari aspek kesehatan sekaligus kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga ini berperan dalam menentukan apakah suatu produk aman dikonsumsi dan digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses produksinya memenuhi kaidah halal yang berlaku.

Dari regulasi yang negara hadir untuk ketentuan halal yang bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, nyatanya tetap saja sulit dalam proses pengajuan sertifikasi. Jika proses tidak sulit, maka ada biaya besar yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal.

4. Reduksi Halal Menjadi Sekadar Label Tanpa Nilai

Simbol halal menjadi salah satu label yang sedang digemari di pasar global saat ini. Dengan mengatasmakan atau mencatut label halal maka masyarakat muslim di manapun berada dapat mengkonsumsi atau menjadi obyek dalam proses jual beli. Kaidah halal setiap negara memiliki ketentuannya sendiri, sehingga halal versi Indonesia akan berbeda dengan halal versi Amerika. Hal ini menjadi pertanyaan besar Ketika halal sebagai label yang tertera di sebuah tempat atau produk apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai islam atau syariat islam itu sendiri dalam proses pemberian label.

5. Dominasi Pasar oleh Negara Non-Muslim dalam Industri Halal

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Keberadaan regulasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat penerapan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) di Indonesia, sekaligus mendorong pengaruhnya pada tataran global. Sertifikasi dan pelabelan halal juga telah menjadi isu penting dalam perdagangan internasional, terutama sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim di berbagai negara. Di tengah arus globalisasi dan implementasi pasar bebas seperti ASEAN

Free Trade Area (AFTA), NAFTA, Uni Eropa, hingga *World Trade Organization* (WTO), sertifikasi halal menjadi instrumen yang memperkuat posisi umat Islam dalam menentukan standar konsumsi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga label halal menjadi satu-satunya *prestige* bagi kelompok dagang agar dapat menembus ke pasar global.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya produk halal, organisasi-organisasi internasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga semakin intensif mendorong konsep halal melalui mekanisme standarisasi di tingkat global. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam sistem sertifikasi halal antarnegara, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk halal mampu bersaing dalam pasar internasional tanpa kehilangan esensinya. Standarisasi tersebut menjadi kunci penting agar produk-produk halal tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga dipercaya sebagai bagian dari sistem perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual serta etika Islam (Rachim & Santoso, 2021).

Kemunculan banyak negara pesaing dalam industri halal global menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Para pesaing ini berasal dari negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, Iran, Oman, Sri Lanka, Mesir, Tunisia, Azerbaijan, Albania, Bangladesh, dan Lebanon. Selain itu, negara-negara non-muslim seperti Australia, Thailand, Singapura, Inggris, Italia, Spanyol, Kanada, Prancis, Afrika Selatan, Nigeria, dan Belanda juga turut ambil bagian dalam persaingan ini.

Persaingan yang semakin ketat tersebut berpotensi mengurangi daya saing dan penetrasi produk halal Indonesia di pasar internasional. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu berfokus pada peningkatan mutu produk halal yang dihasilkan serta memperkuat kualitas pelayanan yang mendukung rantai pasok industri halal. Upaya ini penting agar Indonesia tetap mampu bersaing dan mengambil peran strategis dalam industri halal global (Herianti et al., 2023).

6. Komersialisasi Simbol Halal oleh Kapitalisme Global

Komersialisasi agama sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak lama, unsur-unsur keagamaan telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari busana yang dikenakan hingga ornamen yang dipasang di dalam rumah. Namun, yang membedakan tren saat ini adalah bagaimana simbol-simbol agama berhasil menembus sistem ekonomi kapitalis dan dimanfaatkan sebagai alat perantara untuk memperjualbelikan nilai-nilai religius secara luas dan besar-besaran (Adam, 2019). Hal ini dinormalisasi oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak lagi menjadi hal yang patut untuk dibahas lebih dalam karena masyarakat muslim menjadi pangsa pasar dominan dalam proses perdagangan baik barang ataupun jasa.

Setiap negara pada dasarnya memiliki lembaga tersendiri yang secara khusus menangani proses sertifikasi halal terhadap berbagai produk, dengan regulasi yang berbeda-beda sesuai kebijakan nasional masing-masing. Sertifikasi halal telah menjadi perhatian global, tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di wilayah seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Menariknya, dominasi dalam industri halal saat ini justru banyak berasal dari negara-negara non-muslim yang mampu mengembangkan sektor ini secara strategis dan profesional.

Sebagai contoh, Brasil yang penduduk muslimnya kurang dari 1% telah menjadi eksportir utama daging unggas ke negara-negara Timur Tengah. Sementara itu, Australia tercatat sebagai pemasok terbesar daging sapi halal ke negara-negara anggota OKI. Dari kawasan Asia, Tiongkok kini dikenal sebagai pengeksport terbesar pakaian halal ke Timur Tengah, dan Korea Selatan berambisi menjadi destinasi wisata halal utama dunia. Jepang pun mengakui bahwa sektor halal memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Thailand bahkan memiliki visi menjadikan dirinya sebagai “dapur halal dunia”, sedangkan kota London secara terbuka mencanangkan diri sebagai pusat keuangan Islam di kawasan Barat (Thamrin & Putra, 2022).

Sudah banyak contoh negara non-Islam yang memiliki andil besar sebagai pemasok produk ataupun jasa yang memiliki legalitas halal. Konsep halal yang dipakai disetiap negara menyesuaikan kondisi negara tersebut, sehingga ketika produk itu dikatakan halal disebuah negara harusnya tetap dilakukan standarisasi halal lagi ketika masuk ke Indonesia, agar halal bukan hanya sekedar label tapi nilai-nilai Islam tetap halal tetap dipertahankan.

7. Dakwah yang Belum Menyentuh Struktur Ekonomi

Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dengan jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024. Kontribusi ekonomi syariah dalam PDB tahun 2024 juga tercatat sebesar 46,71% yang menunjukkan bahwa sektor utama ekonomi syariah mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia juga menempati peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Economy Indicator*, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya disadari bahwa peran dakwah dan ekonomi sangat erat. *Boomingnya* label halal ke ranah global didasari karena jumlah masyarakat muslim yang mayoritas sehingga peran ekonomi kompleks ketika dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat muslim yang mayoritas. Bentuk dakwah yang dapat memberikan andil di dalamnya seperti memberikan pengertian tentang halal sesuai *fiqh*, halal sesuai syariat dan tidak dicampur adukan dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi yang lebih mengutamakan *margin* atau keuntungan disbanding proses sesuai syariat halal.

Ekonomi dalam Islam, yang dikenal sebagai ekonomi Islam, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang sempurna. Ini karena transaksi dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam

setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan muamalah seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerjasama, dan bentuk interaksi ekonomi lainnya, sesuai dengan konsep ekonomi Islam (Agus, 2023). Sehingga perlu adanya sumbangsih dakwah di dalam ekonomi agar seimbang antara dunia dan akhirat.

SOLUSI

Pembahasan tentang ekonomi yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat kemudian disambungkan dengan urgensi dakwah di dalamnya, memberikan tantangan yang berbeda. Karena tidak sedikit masyarakat muslim yang memilih untuk mampu melanjutkan hidup tanpa mengetahui darimana asal dari produk yang dipakai, dimakan, diminum ataupun dipegang. Padahal konsep dasar segala hal yang melekat atau mengenai tubuh yang digunakan untuk beribadah menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya ibadah itu dilakukan. Sehingga perlu benar-benar disesuaikan yang masuk dan di pakai oleh tubuh agar sesuai dengan *tagline* halal dan *thayib*. Dari isu-isu yang mempengaruhi halal, sebagaimana penulis sebutkan, maka di bagian ini akan dibahas tentang solusi sebagai bentuk responsif terhadap isu yang sudah ada. Adapun solusi yang muncul sebagai berikut.

1. Peningkatan Literasi Halal Masyarakat melalui Pendidikan, Media, dan Komunitas

Indonesia adalah negara yang mengambil peran dengan maraknya isu halal sebagai isu ekonomi nasional sekaligus mendeklarasikan diri sebagai pusat global produk halal. Tetapi literasi produk halal masih rendah untuk masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya penguatan terkait literasi halal kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur Pendidikan, dibantu dengan penyebar berita melalaui media dan bermitra dengan komunitas sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari banyak daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyebarkan *halal lifestyle* pada masyarakat Indonesia. Kesadaran serta peluang pasar terhadap industri

halal mencakup berbagai sektor strategis, antara lain bidang makanan dan minuman, layanan kesehatan, pariwisata, industri kimia, logistik, periklanan, media cetak dan digital, pembiayaan, serta sektor-sektor penting lainnya yang terus berkembang (Nasution, 2020).

Peningkatan kesadaran umat Muslim memerlukan dukungan melalui penyebaran informasi dan edukasi yang relevan, luas, intensif, berkesinambungan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Penyampaian informasi dan wawasan mengenai kehalalan produk akan lebih efektif dan mudah diterima apabila disebarluaskan melalui media sosial. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan aspek religiusitas, khususnya dalam hal dedikasi dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengonsumsi produk halal (Khasanah, 2020). Sehingga proses penyebaran informasi terkait halal akan berdampak kepada pemahaman masyarakat tentang pentingnya isu halal yang bukan hanya dilihat dari segi konsumen tetapi dari segi produsen. Banyak sektor yang akan dapat berpartisipasi ketika kesadaran masyarakat mulai terbangun untuk mengenali isu halal sebagai faktor penting dalam peningkatan ekonomi.

2. Penguatan Sumber Daya Bahan Baku dan Teknologi

Pengelolaan bahan baku hingga tahap penjualan dalam industri halal dapat dioptimalkan melalui penerapan konsep *value chain* Porter. Dalam konsep ini, terdapat dua aspek utama yang perlu dimaksimalkan. Pertama, memastikan proses produksi halal berjalan dari hulu ke hilir secara terintegrasi dan sesuai dengan prinsip kehalalan. Kedua, menjaga kualitas produk agar mampu bersaing secara global. Hal ini berarti setiap produk halal yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam hal daya saing di pasar internasional.

Teori *Value Chain* yang digagas oleh Michael Porter menekankan pentingnya menciptakan keunggulan kompetitif untuk menghadapi dinamika persaingan pasar. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan mengoptimalkan seluruh aktivitas

utama dan pendukung, yang saling terhubung mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual. Dukungan terhadap proses ini mencakup sistem penyediaan yang efisien, pemanfaatan teknologi modern yang relevan, manajemen sumber daya manusia yang efektif, serta infrastruktur yang memadai, guna menghasilkan produk yang unggul secara kualitas dan mampu memenuhi tuntutan pasar global (Purnama & Nurrachmi, 2024).

Pada level hulu, produsen dalam industri halal umumnya masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait penyediaan produk halal yang mencakup berbagai aspek seperti pembiayaan, bahan baku, proses produksi, strategi pemasaran, hingga pengelolaan rantai pasok. Sebagian besar tenaga kerja di divisi produksi bukan berasal dari latar belakang ahli syariah, sehingga pemahaman mereka terhadap proses pengolahan produk sesuai prinsip halal masih minim. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya kapasitas inovatif dari para produsen, yang berdampak pada tertinggalnya pengembangan industri halal dibandingkan dengan industri konvensional.

Keterbatasan inovasi dalam industri halal sangat erat kaitannya dengan kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep dan praktik produksi berbasis halal secara menyeluruh. Rendahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi faktor penghambat dalam mendorong inovasi di sektor ini. Akibatnya, perkembangan industri halal hingga saat ini lebih berfokus pada pemenuhan aspek religius semata, tanpa disertai orientasi terhadap inovasi bisnis yang berkelanjutan, khususnya dalam memanfaatkan potensi wilayah atau spasial yang ada (Nasution, 2020).

Perlu adanya penguatan sumber daya bahan baku yang ditunjang dari pemahaman sumber daya manusia tentang halal, agar proses produksi hingga distribusi dari hulu ke hilir tetap terjaga kehalalannya. Ketersediaan bahan baku dan pemanfaatan teknologi menjadi sumber utama untuk setiap produksi baik barang ataupun jasa. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam Indonesia yang begitu banyak tetapi masih

belum semua dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi perlu adanya kerja sama antara praktisi, teknisi dan cendekiawan untuk mampu mengeksplorasi bahan baku baik berupa barang ataupun tempat di Indonesia untuk dapat menjadi produk halal, jasa halal dan wisata halal.

3. Penguatan Pembiayaan Keuangan dengan Sistem Syariah

Salah satu kelemahan dalam regulasi jaminan produk halal di Indonesia adalah masih minimnya jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hingga kini, jumlah LPH bersertifikat baru mencapai 52 atau sekitar 10% dari kebutuhan ideal, padahal untuk mendukung industri halal secara menyeluruh di tingkat kota dan kabupaten dibutuhkan setidaknya 514 LPH. Kekurangan ini berpotensi menghambat proses sertifikasi halal, mengingat LPH merupakan tahapan awal yang wajib dilalui oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Selain itu, jumlah auditor halal juga masih sangat terbatas. Saat ini, auditor halal yang tersedia hanya sebanyak 156 orang atau sekitar 10% dari total kebutuhan sebanyak 1.542 auditor. Padahal, setiap LPH diwajibkan memiliki minimal tiga auditor halal untuk menjalankan tugas pemeriksaan dengan optimal. Keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam percepatan sertifikasi halal nasional (Purnama & Nurrachmi, 2024).

Hal tersebut menjadi faktor utama perlu adanya penguatan di bidang pembiayaan keuangan, tanpa ada dukungan secara materi untuk proses Lembaga yang dibutuhkan masyarakat, maka mulai dari penyebaran informasi terkait produk halal, bahan baku dan Lembaga yang menanganipun tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di Indonesia. Apalagi pembiayaan terbesar hampir 88% dari bank konvensional. Pengembangan produk halal oleh perbankan syariah tidak hanya menjadi pilihan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, langkah ini berpotensi meningkatkan daya saing industri domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang tidak memenuhi standar kehalalan.

Perbankan syariah memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor halal, melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bank syariah memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan UMKM halal yang saat ini tengah menjadi fokus pembangunan di Indonesia (Warto et al., 2024).

Penetapan status halal oleh Bank Syariah Indonesia terhadap pelaku usaha tidak hanya dilakukan melalui sertifikasi halal reguler, tetapi juga dapat dilakukan melalui sertifikasi non-reguler yang berbasis pada pernyataan mandiri dari pelaku usaha (*self-declare*). Salah satu kontribusi BSI dalam mendukung perkembangan industri makanan halal diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, BSI menyediakan tiga jenis KUR, yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Skema pembiayaan ini bersifat multiguna, artinya dapat dimanfaatkan untuk modal kerja, investasi, maupun kebutuhan konsumtif (Warto et al., 2024). Selain pembiayaan, BSI juga menyelenggarakan pelatihan berupa *workshop* yang mencakup berbagai materi penting, seperti perencanaan usaha, strategi pemasaran, manajemen keuangan, pengembangan produk, dan topik lainnya yang relevan bagi pelaku usaha.

4. Legalitas Negara tentang Aturan Halal

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat 3 huruf e dan juga penjelasannya Undang-Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat 1 huruf h (Sunarto & Sasmianti, 2020). Hal ini memberikan penjelasan tentang perlindungan konsumen yang saat ini diatur pada UU Nomor 33 tahun 2024 tentang jaminan produk halal. Pemerintah memberlakukan UU sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Dampak dari peraturan-peraturan itu memang dapat memberikan ketentuan kepada banyak orang tetapi masih ada kelemahan yang berasal dari luar Indonesia.

Munculnya sertifikasi halal, merupakan pengesahan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), yang menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Sertifikat Halal dari MUI menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh izin penempatan label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Produk yang berhasil memperoleh sertifikasi ini telah melalui tahapan pemeriksaan dan pengujian yang memastikan bahwa produk tersebut layak konsumsi dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Beberapa indikator penting yang diperhatikan antara lain: 1) keberadaan logo halal yang jelas pada kemasan, 2) kemampuan membedakan logo halal MUI asli dari yang palsu, 3) jaminan kualitas dari produk yang telah bersertifikat halal, 4) label halal yang menunjukkan produk telah melewati proses uji kehalalan yang sistematis, dan 5) keyakinan untuk mengonsumsi produk makanan berlabel halal tanpa keraguan (Fatimah et al., 2022).

Untuk mendapatkan sertifikasi halal itu tidak mudah dan saat sudah mendapatkan sertifikat halal, produsen masih harus bersaing dengan produk luar negeri. Penerapan sertifikasi halal di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim dan di negara-negara sekuler yang memandang agama sebagai urusan pribadi di luar ranah publik, bukanlah didasari oleh komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya, hal ini lebih dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim serta memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima di pasar Muslim. Dengan demikian, sertifikasi halal yang awalnya berfungsi sebagai instrumen dalam pelaksanaan ajaran agama, kini telah mengalami pergeseran fungsi menjadi komoditas komersial yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan pasar (Faidah, 2017).

Beberapa langkah strategis sebagai bentuk awal legalitas yang sedang disusun pemerintah saat ini untuk mendorong peningkatan ekspor produk halal antara lain meliputi: penguatan riset terhadap bahan dan material halal guna

menghasilkan produk berkualitas tinggi, pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) yang dilengkapi dengan insentif serta regulasi pendukung, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Produk Halal yang berisi data serta informasi produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, pendirian halal center sebagai pusat riset dan pengembangan produk halal juga dapat menjadi strategi penting dalam mendukung kemajuan industri halal. Penerapan prinsip ketertelusuran dalam rantai pasok halal turut meningkatkan daya saing produk Indonesia agar lebih mudah diterima di pasar internasional, khususnya di negara-negara anggota OKI (Hapsari et al., 2022).

5. Pemberdayaan UMKM dan Komunitas Muslim

UMKM Halal merupakan usaha kecil dan menengah yang mengutamakan produksi maupun penyediaan barang dan jasa yang memenuhi ketentuan halal sesuai dengan ajaran Islam (Sasongko et al., 2024). UMKM yang saat ini menjadi program sasaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia juga sedang berada di fase membutuhkan legalitas halal. Peraturan terbaru untuk seluruh UMKM wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk pelaksanaan UU terbaru dalam rangka perlindungan konsumen. Pemerintah berperan memberikan pengelolaan fasilitas untuk UMKM dalam memperoleh sertifikat halal secara gratis dan berbayar sesuai produk yang dipasarkan oleh UMKM.

Sertifikat halal memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMKM. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar syariat dan kualitas tertentu, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen. Selain itu, sertifikat halal juga dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produk dari kompetitor yang belum memiliki sertifikasi, sekaligus menarik minat

konsumen yang memprioritaskan aspek kehalalan dalam memilih produk (Fadhli et al., 2024).

6. Pemasaran Produk Halal di Negara Strategis

Saat ini telah diberlakukan FTA (*Free Trade Agreement*), yakni perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas. Dalam konteks ini, regulasi terkait produk pangan diterapkan secara sangat ketat. Namun, hingga kini, belum terdapat harmonisasi dalam hal sertifikasi dan penggunaan logo halal. Standar halal yang berlaku masih beragam dan belum ada kesepakatan khusus yang menyatukan standar antarnegara secara rinci (Purnama & Nurrachmi, 2024).

Masyarakat madani atau *civil society* merupakan wadah berkumpulnya kekuatan sosial yang berperan dalam menjaga kebebasan, keberagaman, serta kemandirian masyarakat dari dominasi kekuasaan negara. *Civil society* memiliki otonomi terhadap negara, namun tetap menjalin hubungan timbal balik. Kekuatan masyarakat madani dapat tercermin melalui perannya dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Dalam konteks produk halal, hubungan antara negara, agama, dan *civil society* menunjukkan dinamika wacana yang terus berubah dan tidak selalu stabil (Faidah, 2017).

Dalam *master plan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, disebutkan bahwa salah satu strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia adalah dengan meningkatkan kapasitas UMKM, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam rantai pasok global industri halal (Fadhli et al., 2024). Indonesia yang memiliki mayoritas masyarakat muslim memang tidak menjadi negara yang memasok produk halal di pasar dunia karena banyak faktor. Hal ini sedang diproses oleh pemerintah dengan cara menerbitkan *master plan* ekonomi syariah Indonesia yang harapannya sesuai dengan tujuan, Indonesia menjadi pusat halal global.

REFLEKSI

Pemerhatian terhadap perkembangan industri halal di Indonesia membawa kita pada kesadaran bahwa halal bukan sekadar label, melainkan representasi dari nilai-nilai spiritual Islam yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Halal menjadi jembatan antara keimanan dan kebutuhan hidup, antara ibadah dan keseharian. Ketika makanan, pakaian, tempat wisata, bahkan kosmetik diberi label halal, seharusnya hal ini tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kebaikan bagi semua.

Di bagian lain, refleksi ini juga mengantar kita pada pertanyaan kritis: sudah sejauh mana pemahaman kita terhadap halal mampu menjadi bagian utuh dari kesadaran kolektif masyarakat? Lemahnya literasi halal, minimnya partisipasi produsen lokal, hingga dominasi negara-negara non-Muslim dalam pasar halal global menjadi cermin bahwa kita masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan bahwa dakwah di bidang ekonomi tidak terjebak dalam retorika, tetapi mampu hadir dalam tindakan nyata yang membumi.

Upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal global bukanlah perkara sederhana. Ia menuntut sinergi antara regulasi negara, kekuatan komunitas, kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan teknologi dan pembiayaan berbasis syariah. Namun lebih dari itu, kita semua ditantang untuk menjadikan halal sebagai gaya hidup yang tidak terjebak pada konsumtivisme, melainkan sebagai ekspresi kesalehan sosial dan ekologis.

Refleksi ini berusaha menunjukkan, bahwa dakwah ekonomi melalui konsep halal sejatinya adalah perjuangan untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam—yang menyejahterakan dan menyadarkan dan membebaskan. Pertanyaannya kini adalah: sudahkah kita menjalani ekonomi dengan semangat dakwah? Dan sejauh mana kita siap mengembalikan makna halal sebagai nilai, bukan semata komoditas?

DAKWAH DAN KESEHATAN MENTAL DI ERA MODERN

Permasalahan Burnout di Kalangan Santri dan Ustadz di Lingkungan Pesantren

Andik Khoirul Iman

ISU

Pesantren masih menjadi lembaga pendidikan favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga Agustus 2024, terdapat 41.220 pesantren yang terdaftar di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 11.000 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Ameliya, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pesantren tetap menjadi pilihan utama dalam pendidikan, terutama di daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan informasi dari Kementerian Agama yang mencatat bahwa jumlah santri aktif mencapai 2,56 juta, tersebar di 25.000 pondok pesantren (Bayu, 2022). Peningkatan jumlah pesantren dan santri ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk nilai-nilai tradisional, lingkungan belajar yang khas, dan pendekatan pendidikan holistik yang ditawarkan oleh pesantren. Pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter santri, menjadikannya institusi yang integral dalam sistem pendidikan nasional.

Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter dan spiritualitas umat Islam di Indonesia. Namun, di balik keberhasilan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama, terdapat tantangan serius yang kerap luput

dari perhatian, yakni isu kesehatan mental. Salah satu isu yang paling krusial adalah fenomena burnout atau kelelahan mental dan emosional yang dialami oleh santri dan ustadz di lingkungan pesantren.

Burnout, menurut World Health Organization (2019), adalah sindrom yang dihasilkan dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Tiga dimensi utama dari burnout adalah kelelahan emosional, meningkatnya jarak mental terhadap pekerjaan, serta penurunan efikasi profesional. Meskipun istilah ini umum digunakan dalam dunia kerja, berbagai penelitian membuktikan bahwa burnout juga terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren (Maslach, 2025).

Fenomena di kalangan santri dan ustadz dapat dilihat dari berbagai gejala psikologis dan perilaku yang muncul di lingkungan pesantren. Santri, yang menjalani pendidikan dalam sistem boarding school, sering kali menghadapi tekanan akademik yang berat, ditambah dengan tuntutan hafalan Al-Qur'an dan pelajaran diniyah yang ketat. Minimnya waktu istirahat serta keterbatasan ruang untuk berekspresi dapat menyebabkan stres berkepanjangan, yang pada akhirnya berujung pada gangguan psikosomatis, *burnout*, hingga depresi. Banyak kasus menunjukkan bahwa tekanan mental ini memicu perilaku kabur dari pesantren, *self-harm*, hingga gangguan kecemasan yang tidak tertangani dengan baik. Sayangnya, sebagian besar pesantren belum memiliki sistem konseling profesional yang melibatkan psikolog atau psikiater, sehingga banyak santri yang mengalami permasalahan psikologis tanpa penanganan yang tepat.

Tidak hanya santri, para ustadz di pesantren juga mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Beban kerja yang berat, tanggung jawab moral yang besar, serta ekspektasi masyarakat terhadap peran mereka sebagai figur panutan sering kali menimbulkan kelelahan mental dan emosional. Dalam beberapa kasus, ustadz juga menghadapi dilema ketika harus menyeimbangkan tugas dakwah, tanggung jawab pendidikan, serta kebutuhan pribadi mereka. Minimnya

fasilitas untuk mendukung kesehatan mental tenaga pendidik di pesantren mengakibatkan kelelahan kronis yang dapat berdampak pada kualitas pengajaran dan interaksi mereka dengan santri.

Selain itu, kenakalan santri yang muncul saat ini cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika dahulu ketidakdisiplinan santri lebih banyak berupa pelanggaran aturan ringan, saat ini banyak ditemukan kasus pembangkangan, konflik internal, hingga degradasi sikap penghormatan terhadap guru. Faktor-faktor eksternal seperti pengaruh budaya digital, tekanan akademik, serta kurangnya pendekatan psikologis dalam sistem pendidikan pesantren berkontribusi terhadap perubahan perilaku santri (Faqih, 2019). Pergeseran pola komunikasi dan gaya hidup generasi muda saat ini juga menuntut pesantren untuk melakukan pembaruan dalam strategi pengelolaan santri, termasuk dengan mengadopsi pendekatan psikologi modern dalam mendukung perkembangan mental dan spiritual mereka.

Jika dikaitkan dengan isu dakwah kontemporer, permasalahan burnout bukan sekadar persoalan internal lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap masa depan dakwah Islam dan keberlangsungan generasi penerus bangsa. Pesantren selama ini berperan sebagai pondasi utama dalam mencetak ulama, cendekiawan Muslim, dan pemimpin umat, sehingga kualitas santri dan tenaga pendidik di dalamnya akan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia dalam jangka panjang (Suryaningsih & Gunawan, 2023).

Namun, realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa tantangan dakwah kontemporer tidak hanya datang dari aspek keilmuan dan ideologi, tetapi juga dari problem psikologis dan sosial yang berkembang di masyarakat. Dakwah tidak lagi hanya berfokus pada pembinaan akidah dan syariat, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan emosional dan psikologis umat. Pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan kesehatan mental para santri dan ustadz, sebab jika dibiarkan akan berdampak pada terbentuknya generasi Muslim yang rapuh secara mental dan emosional,

yang pada akhirnya melemahkan kualitas dakwah Islam itu sendiri.

Beberapa isu dakwah kontemporer yang dapat dikaitkan dengan permasalahan ini antara lain sebagai berikut.

1. Transformasi Peran Pesantren di Era Digital

Dakwah di era modern menuntut penyesuaian metode dan pendekatan, termasuk dalam sistem pendidikan pesantren. Di satu sisi, pesantren tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman. Namun, di sisi lain, santri dan ustadz dihadapkan pada tantangan digitalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Tekanan akademik yang tinggi di pesantren, ditambah dengan ekspektasi sosial terhadap santri sebagai calon ulama, sering kali berbenturan dengan dinamika era digital yang penuh dengan distraksi, tuntutan produktivitas, dan persaingan global (Mansir, 2022). Jika pesantren tidak mengadaptasi sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap kesehatan mental santri, maka dapat terjadi pergeseran paradigma dakwah yang kaku dan sulit diterima oleh generasi muda yang lebih terbuka dengan pendekatan yang fleksibel dan humanis.

2. Krisis Mental dan Spiritualitas dalam Dakwah

Salah satu tantangan utama dakwah kontemporer adalah menjawab krisis mental dan spiritual yang dialami umat Islam, termasuk di kalangan santri dan ustadz. Saat ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental, dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin harus mampu memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan ini. Sayangnya, masih banyak lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, yang menganggap kesehatan mental sebagai isu sekunder dan lebih menekankan pada aspek keilmuan dan kedisiplinan semata. Padahal, dalam konteks dakwah modern, kesehatan mental dan ketahanan spiritual harus berjalan beriringan. Jika santri dan ustadz mengalami burnout tanpa adanya sistem dukungan yang memadai, maka mereka bukan hanya kehilangan

semangat dalam menuntut ilmu, tetapi juga berisiko mengalami krisis spiritual yang menghambat perkembangan dakwah itu sendiri (Attarwiyah, 2025).

3. Perubahan Pola Pikir Generasi Muda dan Tantangan Pendidikan Islam

Salah satu yang juga menjadi tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir generasi muda yang lebih kritis, independen, dan terbuka terhadap berbagai ideologi dan nilai-nilai baru. Pesantren tidak hanya dituntut untuk membentuk generasi yang taat secara syariat, tetapi juga generasi yang memiliki ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, kesehatan mental menjadi isu strategis dalam dakwah dan pendidikan Islam. Ketidaksiapan dalam memahami perubahan ini dapat menyebabkan ketegangan antara pola asuh tradisional dan kebutuhan psikologis santri modern, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas dakwah di lingkungan pesantren.

4. Beberapa Penelitian Studi Kasus di Pesantren Indonesia

Penelitian oleh Misbahudin dan Hidayatu Munawaroh (2024) di Pondok Pesantren Safiinattunnaja (PPQSN) di Wonosobo mengungkapkan bahwa santri menghadapi tekanan psikologis yang signifikan akibat tuntutan akademik, harapan dari orang tua dan ustaz, serta persaingan antar santri. Beban tugas yang meliputi kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan kewajiban harian menyebabkan kelelahan mental dan perasaan tertekan. Santri mencoba mengatasi tekanan ini melalui manajemen waktu, dukungan sosial, dan teknik relaksasi. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian beban tugas dan program kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan santri (Misbahudin & Munawaroh, 2024).

Penelitian lain, studi oleh Usfania Fernanti dkk (2023) di Pondok Pesantren An Nur 1 Asrama Az Zubaidah Bululawang Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa santriwati penghafal al-Qur'an mengalami tingkat stres yang bervariasi. Dari 192 santriwati yang diteliti, sekitar 30,73% mengalami stres sedang,

11,46% stres berat, dan 1,04% stres sangat berat. Faktor penyebab stres meliputi beban hafalan, kegiatan pesantren yang padat, dan tekanan untuk berprestasi. Penelitian ini menyarankan agar pengurus pesantren menyediakan aktivitas tambahan sebagai *coping mechanism* untuk mengurangi stres dan menjaga kualitas program hafalan (Fernanti et al., 2024).

Studi-studi kasus di atas memberikan gambaran nyata tentang tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh santri dan ustaz di pesantren. Mereka menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan mental dalam lingkungan pendidikan Islam dan perlunya intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah burnout dan stres.

SOLUSI

Menghadapi isu burnout yang melanda santri maupun ustadz di lingkungan pesantren, diperlukan pendekatan solutif yang komprehensif. Solusi tidak cukup jika hanya bersifat mengatasi masalah yang sudah timbul, melainkan harus disusun secara sistematis, mencakup dimensi edukatif, spiritual, struktural, serta psikologis untuk mencegah terjadinya permasalahan yang timbul berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan.

1. Penguatan Sistem Pendampingan Psikososial

Pondok pesantren perlu mengintegrasikan layanan bimbingan dan konseling (BK) berbasis nilai-nilai Islam dalam kurikulumnya. Pendampingan ini dapat diberikan oleh konselor profesional yang memahami konteks keislaman, atau ustadz/ustadzah yang telah mendapatkan pelatihan konseling dasar. Beberapa pesantren modern telah memiliki bagian Konseling dan Psikologi yang ditangani secara khusus untuk menangani masalah adaptasi, beban belajar, dan tekanan psikologis. Ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sistem pengasuhan santri melalui evaluasi dan perbaikan yang mencakup aspek konseling.

Pada tahun 2022, Gontor membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengasuhan santri, dengan fokus pada aspek pengawasan, kontrol, dan konseling. Langkah ini menunjukkan komitmen Gontor dalam mengintegrasikan pendekatan psikososial dalam pendidikan pesantren. Begitu juga dengan Pondok Pesantren Sidogiri yang telah membentuk Lembaga Psikologi dan Bimbingan Konseling (LPBK), bertujuan untuk menangani kesejahteraan mental santri melalui sistem berjenjang yang melibatkan wali kelas, guru BK, dan staf khusus.

2. Manajemen Jadwal dan Beban Kegiatan Santri & Ustadz

Pihak pesantren perlu menata ulang jadwal harian agar lebih proporsional antara kegiatan akademik, ibadah, istirahat, dan hiburan edukatif. Penelitian di PP Safiinatunnaja Wonosobo yang telah disebutkan sebelumnya merekomendasikan penyesuaian beban tugas sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan mental yang dialami santri (Misbahudin & Munawaroh, 2024). Penanganan bagi santri, pesantren perlu menyediakan waktu khusus untuk kegiatan reflektif dan relaksasi (seperti outbond, tadabbur alam, atau seni islami). Hal yang sama juga berlaku untuk ustadz pendamping, pesantren perlu memberikan waktu libur atau *rekreasi ruhani* secara berkala untuk menghindari kejenuhan.

3. Penguatan Spiritualitas sebagai *Coping Mechanism*

Spiritualitas merupakan kekuatan utama yang dimiliki pesantren. Maka, perlu digalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan jiwa. Misalnya: Dzikir berjamaah sebagai terapi ketenangan batin, dan pelatihan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa), agar santri dan ustadz memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengolah emosi negatif.

4. Pendidikan Karakter dan Kecerdasan Emosional

Penguatan karakter dan kemampuan mengelola emosi (*emotional intelligence*) penting untuk mengurangi gejala burnout. Program pelatihan tentang kesadaran diri (*self-awareness*), empati, dan ketangguhan mental dapat diberikan dalam bentuk pelatihan *soft skill* atau kajian tematik. Pendidikan karakter seperti ini dapat mengantisipasi perubahan pola pikir generasi muda yang lebih kritis, seperti yang tercermin dalam tantangan dakwah kontemporer. Pesantren perlu mengimbangi nilai-nilai spiritual dengan pembekalan kompetensi psikososial.

5. Pelibatan Orang Tua dalam Pembinaan Kesehatan Mental

Orang tua memiliki peran besar dalam menekan atau mendukung beban mental anak. Oleh karena itu, pesantren perlu menjalin komunikasi intensif dengan wali santri melalui Forum Parenting Islami, Pelatihan pengasuhan berbasis *rahmatan lil 'alamin*, dan Evaluasi bulanan yang mencakup aspek non-akademik (mental dan sosial). Pendidikan fitrah anak sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan utama anak terletak pada orang tua, sementara guru dan ustaz berperan sebagai mitra dalam proses tersebut.

Pesantren Kuttab dan Madrasah Al-Fatih yang dirintis oleh Ustadz Budi Ashari, menekankan pentingnya sinergi antara orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Berbagai program dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara orang tua dan guru, antara lain:

- a. Program Parenting Nabawiyyah: memberikan pelatihan kepada orang tua tentang metode pengasuhan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. *Mabit Qowwamah* (Maqom): kegiatan bermalam yang melibatkan orang tua dan anak dalam rangka memperkuat spiritualitas dan komunikasi keluarga.
- c. Forum Kelas (Forlas): pertemuan rutin antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan anak secara holistik.
- d. Belajar Bersama Orang Tua (BBO): program yang mendorong orang tua untuk terlibat langsung dalam proses belajar anak di rumah.

- e. Buku Penghubung dan Kunjungan Rumah (Home Visit): sarana komunikasi antara guru dan orang tua untuk memantau perkembangan anak dan memberikan intervensi jika diperlukan (Meilani, 2023).

Implementasi model seperti di Kuttab Al-Fatih dapat menjadi contoh bagi pesantren lain dalam mengembangkan program yang melibatkan orang tua secara aktif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan lembaga pendidikan.

6. Membangun Jejaring dengan Profesional Kesehatan Mental

Para pengajar dan pengasuh yang berada paling dekat dengan santri setiap hari memiliki peran vital sebagai lini pertama dalam memperhatikan perubahan perilaku dan sinyal distress psikologis yang mungkin muncul. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai kesehatan mental berbasis nilai-nilai Islam menjadi sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang stres akademik, tekanan sosial, serta pendekatan empatik dan suportif dalam membina santri.

Pesantren juga dapat menggandeng lembaga-lembaga profesional, seperti Lembaga Psikologi Islam, untuk menyusun kurikulum pelatihan yang kontekstual, aplikatif, dan selaras dengan prinsip pendidikan Islam. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sistem rujukan bagi kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih intensif (burnout berat, depresi, trauma, dan lain-lain). Sehingga para pengasuh tidak hanya berperan sebagai pendidik spiritual, tetapi juga sebagai penjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis santri.

7. Penyediaan Ruang Aman (*Safe Space*) di Lingkungan Pesantren

Untuk mencegah kejenuhan dan tekanan berlebih pada santri, pesantren perlu menyediakan ruang yang memadai untuk kegiatan non-akademik yang menyenangkan dan menyeimbangkan aspek emosional. Kegiatan seperti olahraga

rutin, seni dan kreativitas, mentoring sebaya, rekreasi Islami, dan kegiatan outbound berperan penting dalam menjaga kesehatan mental santri. Aktivitas ini tidak hanya menjadi selingan dari rutinitas belajar yang padat, tetapi juga menjadi sarana pelepasan emosi, ekspresi diri, dan pembangunan hubungan sosial yang sehat antar santri.

Beberapa pesantren progresif di Indonesia bahkan telah mengintegrasikan program semacam ini ke dalam kurikulum harian mereka, seperti Pesantren Daarut Tauhiid yang memiliki program *life skill* dan karakter building berbasis outdoor training. Dengan tersedianya wadah-wadah kegiatan yang beragam, santri dapat mengembangkan dirinya secara holistik baik dari sisi spiritual, emosional, maupun sosial. Sehingga ketahanan mental mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan semakin terbangun kuat.

REFLEKSI

Kesehatan mental di lingkungan pesantren bukan lagi isu pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian integral dari tantangan dakwah kontemporer. Di tengah tekanan akademik, tuntutan spiritualitas, dan ekspektasi sosial yang tinggi, baik santri maupun ustadz berada dalam posisi rentan terhadap burnout, stres, bahkan krisis spiritual. Situasi ini mengingatkan kita bahwa kekuatan dakwah tidak cukup hanya dengan kedalaman ilmu dan kedisiplinan ritual, tetapi juga dengan kesiapan mental dan emosional dari para pelakunya.

Refleksi ini menegaskan bahwa pesantren sebagai institusi dakwah dan pendidikan Islam tidak dapat hanya menekankan aspek normatif dan struktural semata. Ia harus menjadi ruang yang utuh bagi tumbuhnya manusia—baik secara spiritual, intelektual, maupun psikologis. Perhatian terhadap kesehatan mental bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai-nilai keislaman, melainkan justru bagian dari upaya memanusiakan manusia secara menyeluruh, sebagaimana visi Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*.

Dakwah di era modern menuntut pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan solutif. Kesehatan mental menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi Muslim yang tangguh, penuh kasih, dan siap menjadi pelita bagi umat. Dengan demikian, pembangunan ekosistem pesantren yang sehat secara spiritual dan psikologis merupakan kebutuhan sekaligus keniscayaan bagi keberlanjutan dakwah Islam yang membebaskan dan memulihkan.

**DAKWAH DI DUNIA HIBURAN
DAN BUDAYA POPULER**
Fenomena Nasyid dan Musik Islami di Indonesia

Fidaul Qonita

ISU

Dakwah merupakan salah satu pilar penting dalam penyebaran ajaran Islam, yang memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan spiritual umat. Seiring dengan perkembangan zaman, metode dakwah yang digunakan pun mengalami perubahan, menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah munculnya dakwah melalui dunia hiburan dan budaya populer, terutama dalam bentuk musik (al-Bayanuni, 1993). Di Indonesia, musik Islami dan nasyid telah menjadi salah satu media dakwah yang banyak diminati, menciptakan fenomena baru yang menggabungkan seni dan pesan moral Islam.

Fenomena nasyid dan musik Islami sebagai media komunikasi yang efektif, memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual (Risdiana, 2014). Namun, hal ini tidak lepas dari perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam dan bagaimana implementasi dakwah ini dapat selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa lagu-lagu seperti lagu Nasyid Raihan, Haddad Alwi dan Cingcangkeling dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tetap relevan dalam penyerapan budaya populer di kalangan masyarakat (Salsabia et al., 2024).

Sebagian kalangan mempertanyakan keabsahan penggunaan musik sebagai alat dakwah, sebagian kalangan lain berargumen bahwa musik, jika digunakan dengan bijak, dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islami dakwah (al-Qaradawi, 2019). Di sisi lain, para penggiat dakwah juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dan tidak terkorupsi oleh unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama (Nadia & Amanda, 2024).

Fenomena ini menggugah pertanyaan penting, bagaimana dakwah bisa memanfaatkan budaya populer, seperti musik, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nasyid dan musik Islami di Indonesia dapat menjadi sarana dakwah yang efektif, sambil tetap mempertimbangkan perdebatan seputar hukum musik dalam Islam. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran budaya populer dalam dakwah Islam, serta bagaimana strategi dakwah dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman yang esensial. Melalui fenomena ini, kita bisa membahas menenai dakwah di dunia hiburan dan budaya populer mengenai nasyid dan musik islami di indonesia.

1. Dakwah dan Budaya Populer dalam Islam

Dakwah adalah usaha untuk menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai cara, baik itu melalui lisan, tulisan, maupun media lainnya. Dalam konteks modern, dakwah tidak lagi terbatas pada metode konvensional, seperti ceramah atau khutbah, melainkan juga melibatkan penggunaan media massa dan budaya populer sebagai sarana untuk menyampaikan pesan Islam (Mustaqima, 2023). Hal ini menandakan bahwa dakwah semakin mengarah pada pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Salah satu bentuk dakwah yang semakin berkembang di Indonesia adalah melalui dunia hiburan, terutama melalui fenomena musik Islami dan nasyid (Zakaria al-Anshori & Fattah, 2018)

Sejak awal perkembangan Islam, dakwah telah melibatkan berbagai bentuk seni dan budaya, termasuk puisi, sastra, dan musik. Namun, dalam konteks modern, muncul perdebatan mengenai sejauh mana budaya populer, seperti musik, dapat digunakan sebagai media dakwah. Beberapa ulama menganggap bahwa musik memiliki potensi untuk membawa dampak negatif, sementara yang lain berpendapat bahwa musik bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran Islam jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Umdatul Hasanah, 2020)

Menurut (Sari et al., 2024) dakwah dalam Islam bukan hanya soal menyampaikan ajaran agama, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai hidup yang harmonis dalam masyarakat. Salah satu media yang memiliki potensi besar untuk dakwah adalah budaya populer, yang saat ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Musik, dalam konteks ini, bisa menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian khalayak, khususnya generasi muda, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keislaman (Nuwairah, 2014)

2. Fenomena Nasyid dan Musik Islami di Indonesia

Di Indonesia, fenomena musik Islami dan nasyid telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Nasyid, yang awalnya hanya dikenal sebagai lagu-lagu religi dengan lirik yang mengandung ajaran Islam, kini telah berkembang menjadi genre musik yang variatif. Nasyid tidak hanya diwarnai oleh lirik-lirik religius, tetapi juga dipadukan dengan berbagai elemen musik kontemporer, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama kalangan muda (Rubbiyanah dan Ade Maturi, 2023). Dalam hal ini, nasyid menjadi salah satu media dakwah yang efektif, karena mampu menyampaikan pesan Islam dalam bentuk yang lebih menarik dan tidak membosankan.

Musik Islami di Indonesia semakin populer dengan hadirnya beberapa grup musik, seperti Sabyan Gambus, Maher Zain, dan Raihan, yang berhasil menciptakan lagu-lagu dengan lirik yang mendalam dan bermuatan dakwah. Musik Islami tersebut mampu memberikan pesan moral dan spiritual tanpa

mengesampingkan unsur hiburan, yang menjadikannya sebagai media dakwah yang efektif di kalangan masyarakat urban dan remaja (Ifansyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa budaya populer, dalam hal ini musik, bisa menjadi sarana yang strategis untuk dakwah di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman latar belakang budaya (Meiranti, 2022).

3. Perdebatan Hukum Tentang Musik di Indonesia

Perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam merupakan topik yang cukup kontroversial dan telah dibahas oleh para ulama dari berbagai mazhab. Setiap mazhab memiliki pandangannya masing-masing mengenai apakah musik termasuk dalam hal yang dibolehkan (halal) atau haram menurut hukum Islam. Hal ini juga dipengaruhi oleh interpretasi terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan suara, hiburan, dan dampak yang ditimbulkan oleh musik (Ifansyah et al., 2023). Tinjauan ini akan membahas pandangan beberapa mazhab besar dalam Islam, seperti mazhab Syafi'i, Hambali, dan lainnya, terkait dengan hukum musik, serta bagaimana pandangan ini berkontribusi dalam diskursus mengenai penggunaan musik dalam dakwah (Endrika Widdia Putri, 2022).

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam al-Shafi'i, memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai hukum musik. Secara umum, ulama Syafi'i berpendapat bahwa musik dan alat musik hukumnya haram. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah hadits yang dianggap menunjukkan larangan terhadap suara-suara yang dapat menyebabkan orang lalai dari kewajiban agama. Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, Imam al-Ghazali, yang merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa musik bisa menyebabkan kerusakan moral, mengalihkan perhatian dari ibadah, dan membuka pintu kemaksiatan (Musdalifah, 2020). Hal ini mengacu pada pandangan bahwa musik seringkali disertai dengan suasana yang mengarah pada perilaku negatif, seperti mabuk, pergaulan bebas, dan hiburan yang bersifat duniawi.

Imam al-Nawawi, salah seorang ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, juga memberikan pandangan serupa dalam *al-Majmu'*, yang menyatakan bahwa mendengarkan musik adalah haram jika itu mengarah pada kelalaian terhadap kewajiban agama (Zakaria Al-Anshori & Fattah, 2018). Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, musik tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat merusak akhlak dan mendekatkan seseorang pada perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Mazhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki pandangan yang sedikit lebih moderat dibandingkan dengan mazhab Syafi'i terkait hukum musik. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri memiliki beberapa riwayat yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap musik, terutama yang disertai dengan perbuatan maksiat seperti minum khamr atau pergaulan bebas. Namun, sebagian besar ulama Hambali mengakui bahwa musik tidak sepenuhnya haram jika digunakan dalam konteks yang tidak melanggar prinsip-prinsip moral Islam (Rubbiyanah dan Ade Maturi, 2023)

Sebagai contoh, dalam *al-Mughni*, karya besar Ibn Qudamah, disebutkan bahwa musik dapat dibolehkan dalam situasi yang tidak membawa pada kelalaian atau kemaksiatan. Pandangan ini memungkinkan musik untuk digunakan dalam konteks dakwah, asalkan tidak menyertakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti maksiat, pergaulan bebas, atau eksposur pada unsur-unsur negatif lainnya (Ibnu Kasir & Syahrol Awali, 2024)

Pandangan mengenai musik juga bervariasi di kalangan mazhab lainnya. Di kalangan ulama Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai musik. Sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa musik termasuk dalam hal yang tidak dibolehkan, terutama jika disertai dengan perbuatan maksiat atau dapat merusak akhlak (Aswar, A. and Nashruddin, N. (2020). Namun, ada pula pandangan yang lebih moderat yang menganggap musik sebagai sesuatu yang tidak haram secara mutlak, selama itu tidak digunakan untuk tujuan yang negatif.

Sementara itu, mazhab Maliki lebih cenderung memberikan kelonggaran terhadap musik. Ulama-ulama Maliki menganggap musik tidak selalu haram, dengan catatan bahwa musik harus digunakan dalam konteks yang tidak mengarah pada kelalaian atau maksiat (Ifansyah et al., 2023). Mereka lebih menekankan pada efek musik terhadap perilaku individu dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual seseorang.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulum al-Din* menegaskan bahwa musik dapat membawa manusia kepada kemaksiatan, terutama jika disertai dengan lirik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Musik, menurut pandangan ini, bisa menyebabkan seseorang terlena dan lupa akan kewajiban agama (Jaya, 2024). Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat, yang menyatakan bahwa musik tidaklah haram secara mutlak. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fatwa Kontemporer* menegaskan bahwa musik tidak akan menjadi haram jika digunakan dengan cara yang baik, seperti dalam konteks dakwah atau pendidikan moral, asalkan tidak mengandung unsur maksiat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Huda et al., 2023). Selain itu, para penggiat musik Islami sering kali menekankan bahwa musik yang digunakan dalam dakwah haruslah mendukung tujuan yang baik, yaitu memperkenalkan ajaran Islam dan mendekatkan umat kepada Allah SWT.

4. Memanfaatkan Budaya Populer tanpa Melanggar Nilai-Nilai Islam

Dalam upaya untuk memanfaatkan budaya populer sebagai media dakwah, para dai dan musisi harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif dari budaya tersebut. Agar dakwah melalui musik tidak melanggar nilai-nilai Islam, ada beberapa prinsip yang perlu dijaga, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan Nilai Syariah: Musik dakwah harus mengandung lirik yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur provokatif atau maksiat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam agama.

Lirik lagu harus berfokus pada pesan-pesan kebaikan, persaudaraan, dan kedamaian (Ifansyah et al., 2023).

- b. **Penyampaian yang Tidak Mengarah pada Kesenangan Duniawi Semata:** Musik dakwah harus tetap mengedepankan nilai-nilai spiritual dan menghindari pengaruh-pengaruh yang dapat mengarah pada kesenangan duniawi yang berlebihan, seperti tayangan musik yang berfokus pada kemewahan, ketenaran, atau gaya hidup hedonistik (Fatimah et al., 2023).
- c. **Menghindari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Islam:** Beberapa unsur dalam musik populer, seperti tarian atau ekspresi fisik tertentu, bisa bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesopanan (Suliyati, 2024). Oleh karena itu, dalam penyajian musik Islami, penting untuk menjaga kesopanan, baik dari segi penampilan maupun gaya penampilan di panggung.
- d. **Menciptakan Daya Tarik yang Positif:** Meskipun musik Islami harus tetap mengedepankan nilai-nilai agama, ia juga harus memiliki daya tarik yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, musik Islami yang dikemas dalam genre yang modern dan dinamis bisa menjadi pilihan yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas (Fatimah et al., 2023).

Dakwah melalui dunia hiburan, khususnya musik Islami dan nasyid, telah menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam di Indonesia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam, banyak ulama yang sepakat bahwa musik dapat menjadi alat dakwah yang sah asalkan digunakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penting bagi para penggiat dakwah untuk menjaga keseimbangan antara mengoptimalkan potensi budaya populer dan tetap menjaga kesucian ajaran Islam agar dakwah yang dilakukan tetap membawa manfaat bagi umat.

SOLUSI

Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan dominasi budaya populer, dakwah Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang baru dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Salah satu fenomena yang menonjol di tengah masyarakat Indonesia adalah berkembangnya musik nasyid dan lagu-lagu Islami sebagai media dakwah yang merangkul unsur hiburan. Kehadiran musik Islami ini tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya yang mampu menjangkau generasi muda secara lebih efektif dan emosional.

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang dapat menjawab tantangan sekaligus peluang baru dalam fenomena ini.

1. Fenomena Nasyid dan Musik Islami di Indonesia

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan budaya populer, musik Islami dan nasyid telah menjadi salah satu sarana efektif untuk dakwah di Indonesia. Nasyid yang awalnya hanya dikenal dengan bentuk musik religius tradisional kini telah bertransformasi menjadi sebuah genre yang lebih kontemporer. Grup musik seperti *Sabyan Gambus*, *Maher Zain*, dan *Raihan* telah memainkan peran penting dalam menghidupkan genre musik Islami yang mengandung nilai-nilai dakwah (Ifansyah et al., 2023). Nasyid dan musik Islami ini, dengan lirik yang mengandung ajakan kepada kebaikan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah, berhasil menarik perhatian audiens muda yang sebelumnya mungkin kurang tertarik pada dakwah tradisional.

Sebagai contoh, lagu-lagu seperti *Ya Maulana* oleh Sabyan Gambus dan *For the Rest of My Life* oleh Maher Zain tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pesan moral yang kuat mengenai cinta kepada Allah dan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan grup musik ini menunjukkan bahwa dakwah melalui musik bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam di tengah

budaya populer yang berkembang. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Nashiruddin al-Thusi* dalam bukunya *Al-Da'wah al-Islamiyyah*, yang menekankan bahwa penggunaan media hiburan sebagai sarana dakwah dalam Islam memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat luas.

2. Perdebatan Mengenai Hukum Musik dalam Islam

Meskipun musik Islami semakin populer di Indonesia, perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam tetap menjadi topik yang kontroversial. Berbagai mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah ini. Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, seperti yang tercatat dalam karya Imam al-Ghazali *Ihya Ulum al-Din*, menganggap musik haram karena dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban agama dan mempengaruhi moralitas seseorang. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik al-Asy'ari, yang berkata:

“Di antara umatku nanti akan ada sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan musik.”
(H.R. al-Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk melarang musik, menganggapnya sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan kemaksiatan dan kelalaian dalam beribadah. Namun, terdapat pandangan yang lebih moderat dari ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fatwa Kontemporer*. Beliau berpendapat bahwa musik tidak secara otomatis haram, melainkan tergantung pada niat dan konteks penggunaannya. Al-Qaradawi menyatakan bahwa musik menjadi haram jika digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti mempromosikan kemaksiatan atau gaya hidup hedonistik. Sebaliknya, jika musik digunakan untuk tujuan dakwah dan pendidikan moral yang mendukung nilai-nilai Islami, maka ia bisa dianggap halal. Sebagai contoh, dalam bukunya *Fatwa Kontemporer*, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa: “Musik itu bisa menjadi sesuatu yang

bermanfaat jika digunakan untuk tujuan yang baik, namun bisa menjadi sesuatu yang merusak jika digunakan untuk tujuan yang buruk.” Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerimaan musik dalam Islam, asalkan tidak merusak akhlak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

3. Analisis: Dakwah Melalui Musik Islami dalam Budaya Populer

Salah satu hasil utama dalam penelitian ini adalah pengidentifikasian bagaimana dakwah melalui musik Islami dapat dimanfaatkan dalam budaya populer tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari analisis ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dakwah yang Positif dan Jelas

Musik Islami yang digunakan untuk tujuan dakwah harus selalu mengedepankan pesan-pesan positif yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, lirik lagu yang mengajak untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, dan menjaga kebersihan hati. Nasyid dan musik Islami yang banyak diproduksi saat ini, seperti yang ditampilkan oleh grup *Sabyan Gambus*, mengandung lirik yang mengajak umat Islam untuk semakin dekat dengan Allah dan berpegang teguh pada ajaran-Nya (Lestari. 2023). Ini adalah bentuk dakwah yang sangat efektif untuk generasi muda yang sering kali lebih tertarik pada hiburan daripada ceramah agama.

b. Menghindari Unsur yang Bertentangan dengan Islam

Penting untuk memastikan bahwa musik Islami tidak terjebak dalam dunia hiburan yang merusak moral. Musik Islami yang digunakan untuk dakwah harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti promosi gaya hidup hedonistik, ketelanjangan, atau penggunaan alkohol (Ibnu Kasir & Syahrol Awali, 2024). Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Ini menunjukkan bahwa niat dalam menggunakan musik untuk dakwah sangat penting, dan tujuan utama haruslah untuk kebaikan dan peningkatan spiritual umat Islam.

c. Kesesuaian dengan Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat

Musik Islami dalam dakwah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Di Indonesia, di mana musik dan hiburan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, musik Islami yang dipadukan dengan unsur budaya populer akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, terutama di kalangan anak muda (Ali, 2019). Dengan menggunakan genre musik yang familiar, seperti pop, gambus, atau rock, dakwah dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa kehilangan pesan-pesan moralnya.

Penelitian terdahulu tentang dakwah melalui musik juga menunjukkan bahwa penggunaan media hiburan untuk dakwah memiliki potensi besar dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, studi yang dilakukan oleh (Ifansyah et al., 2023), mengungkapkan bahwa dakwah melalui media massa, termasuk musik, sangat efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Dalam konteks Indonesia, penggunaan musik Islami dan nasyid sebagai media dakwah diperkuat oleh penelitian Zainal Azman dalam *Fenomena Musik Islami di Indonesia*, (Azman, 2022). yang menunjukkan bahwa genre musik ini telah berhasil menarik perhatian kalangan muda dan menjadi alat untuk menyebarkan pesan moral yang sejalan dengan ajaran Islam.

REFLEKSI

Dakwah di dunia hiburan, khususnya melalui musik Islami dan nasyid, menjadi cerminan bahwa ajaran Islam dapat hadir dalam berbagai bentuk ekspresi budaya yang kontekstual dan menyentuh. Musik, yang sering kali diperdebatkan hukumnya, ternyata mampu menjadi jembatan dakwah yang menjangkau generasi muda—mereka yang tumbuh dalam ekosistem budaya populer dan media digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa

dakwah tidak selalu harus dikemas dalam ceramah yang formal, tetapi juga bisa melalui lirik-lirik yang merangkul, menyapa jiwa, dan menggugah kesadaran spiritual.

Refleksi ini mengingatkan bahwa inti dakwah adalah menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan dalam bentuk yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan religius, musik Islami yang dikemas secara moderat, estetis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat menjadi media strategis untuk menyemai pesan-pesan Islam secara damai dan inklusif.

Dakwah di ruang hiburan juga menuntut kehati-hatian. Daya tarik budaya populer bisa menjadi peluang, tetapi juga godaan untuk melenceng dari substansi dakwah. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku dakwah untuk menjaga keseimbangan antara nilai artistik dan pesan spiritual, antara daya hiburan dan makna mendalam. Di sinilah peran niat, etika, dan pemahaman keagamaan yang kokoh sangat dibutuhkan.

Dengan pendekatan yang bijak, reflektif, dan penuh tanggung jawab, dakwah melalui musik dapat terus berkembang sebagai bagian dari transformasi budaya Islam yang ramah, relevan, dan membumi—sebuah dakwah yang tidak hanya menggetarkan telinga, tetapi juga menentramkan hati.

GERAKAN DAKWAH TRANSNASIONAL DAN PENGARUHNYA

Lalu Mirwazi

ISU

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Islam mengalami dinamika yang sangat kompleks, salah satunya ditandai dengan semakin menguatnya gerakan dakwah transnasional. Fenomena ini tidak sekadar menjadi isu keagamaan, melainkan juga berdampak luas pada aspek sosial, politik, dan budaya di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Gerakan dakwah transnasional, yang membawa paham dan ideologi Islam dari luar negeri ke dalam negeri, telah memunculkan perubahan mendasar dalam pola keberagamaan masyarakat, relasi sosial, hingga konfigurasi politik nasional.

Pentingnya mengangkat tema ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi lahan subur bagi masuknya berbagai paham keislaman dari luar. Gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Salafi misalnya, tidak hanya menawarkan pemahaman keagamaan yang skripturalis dan transnasional, tetapi juga membawa agenda politik dan sosial yang kerap kali bertentangan dengan tradisi Islam moderat yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam menjaga harmoni sosial, keutuhan budaya lokal, dan stabilitas nasional.

Lebih jauh, perkembangan pesat gerakan dakwah transnasional di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah

mempercepat penyebaran ideologi lintas batas negara. Media sosial, pendidikan, dan jaringan organisasi internasional menjadi instrumen efektif dalam memperluas pengaruh mereka. Di sisi lain, fenomena ini juga memicu resistensi, konflik ideologis, bahkan potensi radikalisasi yang mengancam keragaman dan toleransi yang menjadi ciri khas Islam di Nusantara.

Karena itu, kajian tentang gerakan dakwah transnasional dan pengaruhnya menjadi sangat relevan dan mendesak. Tidak hanya untuk memahami pola penyebaran dan karakteristik ideologinya, tetapi juga untuk merumuskan strategi konter yang efektif dalam menjaga identitas keislaman Indonesia yang moderat, inklusif, dan kontekstual. Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam merespons tantangan dakwah transnasional di Indonesia.

1. Definisi Gerakan Dakwah Transnasional

Gerakan dakwah transnasional adalah fenomena keagamaan yang melibatkan penyebaran ideologi Islam lintas batas negara (*nation-state*), dengan tujuan menyatukan umat Islam di bawah visi tertentu yang sering kali bersifat global. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari kebangkitan Islam dan pembaruan yang berkembang sejak abad ke-18 di Timur Tengah, terutama setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Gerakan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sering memiliki dimensi politik, seperti upaya mendirikan kembali Khilafah Islamiyah sebagai simbol persatuan umat Islam global (Aksa, 2017).

Gerakan ini memanfaatkan berbagai saluran, termasuk pendidikan, publikasi, dan organisasi sosial, untuk menyebarkan ideologinya. Contoh gerakan dakwah transnasional meliputi Hizbut Tahrir, Salafi dan Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia, gerakan ini menemukan lahan subur karena besarnya populasi Muslim dan menjadi tantangan bagi Islam moderat yang telah lama berkembang di negara ini. Sebagai gerakan lintas negara, dakwah transnasional sering kali menolak konsep negara-bangsa

(*nation-state*) dan demokrasi, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam universal. Hal ini menjadikannya berpotensi menimbulkan konflik dengan budaya dan sistem politik lokal (Syaoki, 2017).

2. Sejarah dan Genealogi Gerakan Dakwah Transnasional

a. Asal Usul Gerakan Dakwah Transnasional

Menurut Aksa (2017) Gerakan dakwah transnasional memiliki akar sejarah yang panjang, berawal dari kebangkitan Islam dan pembaruan keagamaan yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-18. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan, seperti kolonialisme Barat, kemunduran kekhalifahan Islam, dan kebutuhan untuk memperbarui praktik keagamaan umat Islam. Gerakan dakwah transnasional berakar pada upaya pembaruan Islam yang dimulai oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Ibn Abdul Wahhab (pendiri Wahhabisme) dan Jamal al-Din al-Afghani. Mereka menyerukan pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik *bid'ah* (inovasi dalam agama) dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Pada abad ke-20, gerakan ini diperkuat oleh organisasi seperti Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Hizbut Tahrir (Lebanon), yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual tetapi juga politik, dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang ideal. Salah satu momen penting dalam sejarah gerakan dakwah transnasional adalah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Peristiwa ini memicu dorongan untuk mendirikan kembali khilafah sebagai simbol persatuan umat Islam global.

Kehilangan institusi khilafah dianggap sebagai titik balik yang memotivasi banyak kelompok untuk menyebarkan ideologi mereka lintas batas negara dengan tujuan menghidupkan kembali kejayaan Islam (Wibowo, 2019).

Menurut Syaoki (Syaoki, 2017), pada era modern, globalisasi menjadi katalis bagi penyebaran gerakan dakwah transnasional. Teknologi komunikasi, pendidikan, dan migrasi memungkinkan ideologi ini menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan ini mulai berkembang pesat setelah Reformasi 1998, dengan masuknya kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Mereka memanfaatkan celah demokrasi untuk menyebarkan ideologi mereka melalui pendidikan, media, dan organisasi sosial.

Gerakan dakwah transnasional umumnya bersifat skripturalis dan fundamentalis, menekankan pemurnian ajaran agama berdasarkan teks-teks suci. Mereka sering kali menolak konsep negara-bangsa (nation-state) dan demokrasi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam universal. Sebaliknya, mereka mendorong pembentukan khilafah atau negara berbasis syariat Islam global (Wibowo, 2019).

b. Perkembangan Gerakan Dakwah Transnasional di Indonesia

Menurut Akhmad Zaeni (Zaeni & Zainuri, 2023) Perkembangan gerakan dakwah transnasional di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam berbagai aspek sosial, politik, dan keagamaan. Gerakan ini mulai masuk dan berkembang pesat terutama pasca era Reformasi 1998, memanfaatkan kebebasan berorganisasi dan kebebasan berpendapat yang lebih luas. Gerakan dakwah transnasional di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Islam dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi, yang dibawa oleh kelompok-kelompok seperti Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Ikhwanul Muslimin. HTI, misalnya, merupakan salah satu gerakan yang sangat jelas menunjukkan karakter transnasional dengan agenda utama mendirikan Khilafah Islamiyah global. HTI berkembang pesat dengan cabang di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh gerakan dakwah lain.

Selain HTI, gerakan Salafi dan Ikhwanul Muslimin juga aktif menyebarkan pemahaman mereka melalui pendidikan, dakwah di masjid, dan media sosial, yang semakin memperkuat jaringan transnasional mereka. Gerakan ini mempengaruhi lanskap politik Indonesia dengan memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai landasan hukum negara, yang menjadi isu sentral dalam aktivitas politik mereka. Selain itu, mereka juga mengubah pemahaman keagamaan masyarakat dengan menyebarkan ajaran Islam yang lebih konservatif dan puritan, yang kadang bertentangan dengan tradisi Islam moderat yang telah lama berkembang di Indonesia, seperti Islam Nusantara yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Aktivitas dakwah mereka tidak hanya terbatas pada ceramah keagamaan, tetapi juga merambah ke ranah politik dan sosial, termasuk melalui seminar, diskusi publik, dan demonstrasi.

Gerakan dakwah transnasional mempengaruhi praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti penampilan berpakaian, adat istiadat, dan tata nilai sosial yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Mereka juga memperkuat solidaritas antar umat Islam di Indonesia dengan membangun jaringan komunikasi dan pertemuan yang menghubungkan umat Islam lokal dengan komunitas Muslim global.

Faktor-faktor yang memperkuat perkembangan gerakan ini antara lain migrasi dan mobilitas umat Muslim, kemajuan teknologi informasi dan media sosial, dukungan keuangan dari negara atau kelompok tertentu, serta isu-isu politik dan sosial yang relevan. Media sosial dan internet menjadi sarana utama dalam menyebarkan ideologi dan mengorganisasi kegiatan dakwah secara masif dan efisien (Arrozi & Musyafak, 2021).

Perkembangan gerakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan potensi konflik dengan budaya lokal dan Islam moderat, serta risiko radikalisasi dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Menurut Syamsul Rijal (2011) Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan membatasi aktivitas kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keutuhan NKRI, seperti pembubaran HTI pada tahun 2017.

c. Karakteristik Ideologi Gerakan Dakwah Transnasional

Menurut Aksa (2017) Gerakan dakwah transnasional memiliki karakteristik ideologi yang khas dan berbeda dengan gerakan Islam lokal atau nasional. Berikut beberapa karakteristik ideologi gerakan dakwah transnasional:

- 1) **Orientasi Ideologi yang Melampaui Batas Negara (Transnasional)**
Gerakan dakwah transnasional tidak berfokus pada konsep negara-bangsa (nation-state) yang menjadi basis politik dan identitas nasional. Sebaliknya, mereka mengusung ideologi Islam yang bersifat universal dan global, dengan tujuan menyatukan umat Islam di seluruh dunia tanpa memperhatikan batas-batas geografis atau politik negara. Ideologi ini menolak fragmentasi umat Islam berdasarkan negara dan mengedepankan persatuan umat Islam secara global (ummah).
- 2) **Pemikiran Skripturalis dan Fundamentalis**
Gerakan ini sangat menekankan pemurnian ajaran Islam berdasarkan teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis secara literal dan tekstual. Mereka cenderung bersikap normatif, skripturalis, dan fundamentalis, yang berarti menolak interpretasi yang dianggap menyimpang dari teks asli. Pendekatan ini sering kali rigid (tidak fleksibel) dan kaku, menolak praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni.
- 3) **Penolakan terhadap Sistem Politik Modern dan Demokrasi**
Gerakan dakwah transnasional umumnya menolak sistem demokrasi dan konsep modernitas yang dianggap sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka menganggap sistem demokrasi sebagai sistem kufur dan haram untuk diterapkan dalam masyarakat Islam. Sebagai gantinya, mereka mendorong pembentukan negara Islam (*Khilafah*) yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.
- 4) **Solidaritas dan Persatuan Umat Islam Global**
Salah satu motivasi utama gerakan ini adalah solidaritas umat Islam yang mengalami penindasan atau konflik di berbagai wilayah, seperti di Irak, Afghanistan, dan Palestina. Gerakan ini mengekspresikan rasa ukhuwah Islamiyah

(persaudaraan Islam) yang kuat dan menganggap pembentukan negara Islam sebagai solusi untuk membebaskan umat Islam dari imperialisme dan kolonialisme Barat.

5) Adaptasi Terbatas terhadap Modernitas dan Teknologi

Meskipun ideologi mereka cenderung konservatif dan fundamentalis, gerakan dakwah transnasional tidak menolak sepenuhnya kemajuan teknologi. Mereka justru memanfaatkan teknologi modern, seperti media sosial dan internet, untuk menyebarkan dakwah dan memperkuat jaringan global mereka. Namun, adaptasi ini bersifat parsial dan selektif, hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat agenda ideologis mereka (Rachman Assegaf, 2017).

6) Pengaruh dan Jaringan Internasional

Gerakan ini memiliki jaringan internasional yang kuat, dengan organisasi induk yang berpusat di Timur Tengah atau negara-negara lain, dan cabang-cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Contoh organisasi yang masuk kategori ini adalah Ikhwanul Muslimin (Mesir), Hizbut Tahrir (Lebanon), dan Salafi-Wahabi (Arab Saudi). Jaringan ini memungkinkan penyebaran ideologi secara sistematis dan terorganisir lintas negara (Rachman Assegaf, 2017).

d. Pengaruh Gerakan Dakwah Transnasional

Menurut Akhmad Zaeni (Zaeni & Zainuri, 2023) Pengaruh gerakan dakwah transnasional di Indonesia sangat signifikan dan meliputi berbagai aspek sosial, politik, dan keagamaan. Berikut beberapa mengenai pengaruh gerakan dakwah transnasional:

1) Pengaruh dalam Bidang Politik

Gerakan dakwah transnasional berperan aktif dalam mengubah lanskap politik Indonesia dengan memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai landasan hukum negara. Mereka mendorong agenda politik Islam yang konservatif dan transnasional, seperti upaya mendirikan Khilafah Islamiyah yang melampaui batas negara nasional.

Gerakan ini juga memengaruhi partisipasi politik umat Islam dengan membentuk identitas politik yang lebih religius dan

transnasional, yang terkadang menimbulkan ketegangan dengan sistem demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

2) Pengaruh Sosial dan Budaya

Gerakan dakwah transnasional memengaruhi praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam hal penampilan berpakaian, adat istiadat, dan tata nilai sosial yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Hal ini menyebabkan perubahan budaya lokal yang selama ini lebih moderat dan inklusif.

Mereka juga memperkuat solidaritas antar umat Islam di Indonesia dengan membangun jaringan komunikasi dan pertemuan yang menghubungkan komunitas Muslim lokal dengan komunitas Muslim global, sehingga memperkuat identitas keagamaan yang bersifat transnasional.

3) Pengaruh dalam Bidang Pendidikan dan Dakwah

Gerakan ini aktif menyebarkan ajaran Islam yang lebih konservatif dan puritan melalui pendidikan, media sosial, dan dakwah langsung. Mereka menggunakan metode dakwah yang sistematis dan terorganisir untuk merekrut anggota dan memperluas pengaruhnya di masyarakat (Syaoki, 2017). Penggunaan teknologi informasi dan media sosial mempercepat penyebaran ideologi mereka, sehingga dakwah transnasional dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dan luas (Zaeni & Zainuri, 2023).

4) Dampak Negatif dan Tantangan Keamanan

Beberapa kelompok yang terkait dengan gerakan dakwah transnasional terlibat dalam aktivitas ekstremisme dan kekerasan, yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi radikalisasi yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Fasihullisan dan Martini, 2017).

Gerakan ini juga menimbulkan konflik dengan kelompok Islam moderat dan tradisional yang selama ini menjadi pilar kerukunan dan toleransi di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

5) Pengaruh dalam Pembentukan Identitas Muslim

Gerakan dakwah transnasional berperan dalam membentuk identitas Muslim yang lebih global dan terhubung dengan umat Islam di berbagai negara. Hal ini memperkuat rasa *ukhuwah Islamiyah* dan solidaritas antar umat Muslim, sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga keberagaman dan toleransi di tingkat lokal.

Identitas ini juga mendorong kesadaran politik dan sosial umat Islam untuk lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Zaeni & Zainuri, 2023).

3. Studi Kasus

a. Pengaruh Gerakan Salafi di Indonesia dalam Konteks Gerakan Dakwah Transnasional

Gerakan Salafi, sebagai bagian dari gerakan dakwah transnasional, telah meninggalkan dampak signifikan di Indonesia, baik dalam aspek keagamaan, sosial, politik, maupun budaya. Berikut analisis mendalam berdasarkan referensi jurnal dan buku bereputasi:

1) Penyebaran Ideologi dan Metode Dakwah

Gerakan Salafi di Indonesia menyebarkan ideologi skripturalis-fundamentalis yang menekankan pemurnian ajaran Islam berdasarkan interpretasi literal Al-Qur'an dan Hadis. Mereka menolak praktik keagamaan yang dianggap bid'ah (inovasi), termasuk tradisi lokal seperti tahlilan atau ziarah kubur. Penyebaran ini dilakukan melalui:

- a) Pendidikan: Pembentukan pesantren dan lembaga pendidikan Salafi, seperti Pesantren Ngruki dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang didanai Arab Saudi. LIPIA menjadi saluran utama penyebaran ideologi Salafi-Wahabi melalui program beasiswa dan kurikulum berbasis literatur Timur Tengah (Ubaidillah, 2012: 43).
- b) Media dan Penerjemahan: Penerjemahan buku-buku karya ulama Salafi seperti Ibn Taymiyyah dan Muhammad

Ibn Abdul Wahhab ke bahasa Indonesia. Buku-buku ini menjadi rujukan utama kajian keagamaan di kalangan aktivis Salafi (Noorhaidi Hasan, 2006: 2).

- c) Ekonomi: Penggunaan bisnis seperti penjualan madu, habbatussauda, dan layanan bekam (cupping therapy) untuk menarik simpati masyarakat sekaligus mendanai aktivitas dakwah (Zuly Qodir et al., 2023: 247).

2) Pengaruh pada Praktik Keagamaan

Gerakan Salafi mengubah lanskap keberagamaan di Indonesia dengan:

- a) Penyeragaman Gaya Hidup: Mendorong penggunaan pakaian bernuansa Arab (jalabiyya, niqab) dan larangan isbal (celana di atas mata kaki) sebagai simbol kesalehan (Noorhaidi Hasan, 2006: 2).

- b) Penolakan terhadap Tradisi Lokal: Menyebabkan konflik dengan organisasi Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mempertahankan praktik keagamaan berbasis budaya. Misalnya, di Batur, Jawa Tengah, Salafi dan NU berebut pengaruh di Masjid Baitul Makmur, hingga terjadi perpecahan jamaah (Krismono, 2016: 213-215).

3) Dampak Sosial-Politik

- a) Radikalisasi: Sebagian kelompok Salafi beraliran Salafi-Jihadi terlibat dalam jaringan terorisme, seperti kasus bom Bali 2002 yang melibatkan alumni pesantren Salafi (BIN, dikutip dalam Ubaidillah, 2012: 43).

- b) Politik Identitas: Gerakan Salafi memobilisasi dukungan untuk agenda penerapan syariat Islam, seperti upaya legalisasi Perda Syariah di beberapa daerah. Namun, mereka umumnya menolak partisipasi dalam sistem demokrasi, yang dianggap "kufur" (Zuly Qodir et al., 2023: 255).

- c) Resistensi Masyarakat: Di Papua, rencana pembangunan pesantren Salafi di Arso ditolak keras masyarakat lokal karena dianggap mengancam identitas budaya (Noorhaidi Hasan, 2006: 15).

4) Kontribusi Positif

- a) Peningkatan Literasi Agama: Kajian intensif dan pendalaman tauhid yang sistematis meningkatkan kesadaran beragama di kalangan muda Muslim (Slamet et al., 2020: 262).
- b) Deradikalisasi: Sebagian kelompok Salafi moderat (Salafi-Dakwah) menolak kekerasan dan fokus pada pendekatan edukasi, seperti Yayasan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (YLDII) yang aktif dalam dialog antaragama (Slamet et al., 2020: 267).

5) Tantangan dan Kritik

- a) Fragmentasi Umat Islam: Gerakan Salafi memperdalam polarisasi antara Islam "moderat" dan "puritan", seperti konflik antara NU dan Front Pembela Islam (FPI) di Garut, Jawa Barat (Krismono, 2016: 214).
- b) Ketergantungan pada Pendanaan Asing: Aktivitas Salafi di Indonesia didukung dana dari Timur Tengah, menimbulkan kekhawatiran intervensi asing dalam politik domestik (Ubaidillah, 2012: 43).

Pengaruh gerakan Salafi di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara ideologi transnasional dan konteks lokal. Meski berkontribusi pada penguatan identitas keislaman, gerakan ini juga menimbulkan tantangan serius bagi kerukunan sosial dan keutuhan NKRI.

b. Macam-Macam Salafi

Unggul Purnomo Aji dkk (2023) mengemukakan bahwa salafi terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Salafi Puris

Kelompok ini mengampanyekan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis secara literal, menjauhi praktik keagamaan yang dianggap bid'ah. Mereka sangat kaku dalam penafsiran teks dan menolak tradisi lokal yang tidak berdasar pada nash (teks suci). Fokus utama mereka adalah pemurnian tauhid dan ibadah sesuai dengan pemahaman generasi Salaf (tiga generasi pertama umat Islam).

2) Salafi-Hijazi (Wahhabi)

Kelompok ini berafiliasi dengan doktrin Wahhabi yang dipengaruhi oleh ulama Arab Saudi seperti Bin Baz dan Nashiruddin al-Albani. Mereka menekankan purifikasi tauhid, menolak tawassul, ziarah kubur, dan praktik-praktik yang dianggap syirik. Salafi-Hijazi ini juga dikenal sangat konservatif dan berorientasi pada pemurnian agama secara tekstual dan literal.

3) Salafi Jihadi

Kelompok yang menggunakan pendekatan kekerasan untuk menegakkan syariat Islam secara global. Contohnya adalah jaringan al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, dan kelompok-kelompok mujahidin lainnya. Mereka menganggap jihad sebagai kewajiban untuk melawan musuh Islam dengan segala cara, termasuk kekerasan bersenjata.

4) Salafi Dakwah (Moderate Salafi)

Kelompok ini fokus pada dakwah dan pendidikan Islam secara damai dan sistematis tanpa menggunakan kekerasan. Mereka menekankan pendekatan tekstual namun lebih moderat dalam interaksi sosial dan politik. Contohnya adalah organisasi dakwah yang menolak kekerasan dan lebih mengedepankan dialog dan pendidikan keagamaan (Unggul Purnomo Aji & Kerwanto, 2023).

SOLUSI

Strategi Konter terhadap Gerakan Dakwah Transnasional

Menurut Asiyah Strategi konter terhadap gerakan dakwah transnasional di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, terutama dengan mengedepankan dakwah struktural dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari lembaga keagamaan, pemerintah, maupun aparat keamanan. Berikut beberapa Strategi konter terhadap gerakan dakwah transnasional (Asiyah & Hakim, 2017).

1. Pendekatan Dakwah Struktural

Dakwah struktural adalah strategi yang memanfaatkan peran negara dan lembaga-lembaga formal dalam mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan keamanan, sebagai bagian dari aktivitas dakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam moderat dan menolak paham radikal.

Melalui dakwah struktural, pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan intervensi sistematis untuk membubarkan organisasi Islam transnasional yang dianggap menyimpang, seperti pembubaran Khilafatul Muslimin di Jepara.

Pendekatan ini melibatkan koordinasi antara lembaga dakwah, aparat kepolisian, dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman Islam yang moderat dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

2. Kolaborasi Multi-Pihak

Strategi konter melibatkan sinergi antara berbagai elemen, termasuk lembaga dakwah, MUI, Polres, dan penasihat agama di tingkat daerah. Kolaborasi ini penting untuk mengawasi, mendeteksi, dan menindak kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi transnasional yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa.

Setelah pembubaran kelompok transnasional, pendampingan dan pengawasan terus dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami Islam yang moderat dan toleran.

3. Penguatan Pendidikan dan Literasi Keagamaan

Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam strategi konter, dengan menanamkan pemahaman Islam yang moderat sejak dini melalui kurikulum pesantren, madrasah, dan sekolah umum.

Literasi keagamaan yang baik juga diperlukan agar masyarakat mampu mengenali dan menolak paham radikal yang dibawa oleh gerakan dakwah transnasional.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Aparat keamanan berperan aktif dalam mengawasi aktivitas kelompok transnasional dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum atau aktivitas yang mengancam keamanan nasional.

Penegakan hukum yang tegas sekaligus berkeadilan menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran paham radikal.

5. Moderasi Beragama

Menag periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Indonesia penting untuk bermoderasi beragama diantaranya:

- a. Untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dan tidak membunuh satu sama lain merupakan salah satu inti dari hadirnya suatu agama. Oleh karena itu agama selalu membawa tujuan kemaslahatan dan kedamaian, untuk mencapai tujuan tersebut agama di ajarkan tentang keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian moderasi beragama sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- b. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini, agama menjadi ikut berkembang dan tersebar, teks suatu agama sering dimaknai dengan berbagai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu menyebabkan banyak khalayak umum berpendapat ekstrem dan netral. Kenyataan inilah yang menjadikan moderasi beragama penting dalam menjaga manusia agar terhindar dari berbagai macam konflik yang terjadi.
- c. Dalam ranah Indonesia moderasi menjadi penting karena, ekstrimisme dan radikalisme menjadi suatu ancaman rusaknya keindonesiaan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut. (Kemenag RI, 2019)

REFLEKSI

Fenomena gerakan dakwah transnasional merupakan cerminan dari dinamika globalisasi keislaman yang menantang keutuhan identitas keagamaan dan kebangsaan Indonesia. Di satu sisi, gerakan ini memperlihatkan semangat ukhuwah Islamiyah lintas negara yang menginginkan persatuan umat; namun di sisi lain, ia membawa ideologi yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebhinekaan yang telah lama mengakar dalam tradisi Islam Nusantara.

Refleksi ini mengajak kita untuk tidak serta-merta menolak kehadiran wacana transnasional, tetapi untuk bersikap kritis dan selektif dalam menyikapinya. Dakwah semestinya menjadi jalan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian—bukan alat untuk menyebarkan eksklusivisme, radikalisme, atau bahkan perpecahan. Ketika dakwah kehilangan konteks lokal dan mengabaikan kearifan budaya bangsa, maka dakwah itu berisiko menjadi asing bahkan destruktif dalam tubuh umat sendiri.

Indonesia membutuhkan dakwah yang membumi dan menyatu dengan cita-cita kebangsaan. Moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip Islam, tetapi manifestasi dari Islam yang rahmatan lil ‘alamin—yang menjaga martabat, merawat kemajemukan, dan mencegah kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, menghadapi gerakan dakwah transnasional membutuhkan sinergi yang utuh: antara negara, lembaga keagamaan, pendidik, dan masyarakat sipil. Melalui pendidikan yang tercerahkan, regulasi yang adil, dan dakwah yang humanis, kita dapat membentengi Indonesia dari disorientasi ideologis, sekaligus meneguhkan Islam sebagai kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah.

DAKWAH DALAM BALUTAN HIBURAN

Analisis Kritis atas Komersialisasi Anak dalam Program Hafiz Indonesia

Mohamad Febrianto

ISU

Fenomena menghafal al-Qur'an kini telah menjelma menjadi bagian dari tren sosial yang mengakar di tengah masyarakat Muslim Indonesia (Moona Maghfirah et al., 2023). Tidak lagi sekadar praktik spiritual individual, aktivitas ini telah mengalami transformasi menjadi bagian dari budaya populer yang dilestarikan, dikembangkan, bahkan dipertontonkan melalui berbagai medium, termasuk televisi dan media sosial (Akhdiat & Marisa, 2023). Kecenderungan ini muncul seiring meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya menginternalisasi ajaran kitab suci sejak usia dini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan keluarga, lembaga keagamaan, hingga dorongan dari lingkungan sosial. Dorongan religiusitas kolektif ini kemudian mendorong masyarakat untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai simbol kesalehan, prestise sosial, bahkan identitas keagamaan yang dibanggakan.

Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi media, nilai-nilai religius menemukan bentuk baru dalam kemasan yang lebih populer dan menarik bagi khalayak luas (Halim et al., 2016). Salah satu bentuk nyata dari fenomena ini adalah munculnya berbagai program televisi bertema religi, yang tidak hanya menyajikan materi-materi dakwah, tetapi juga dikemas dalam format yang lebih ringan, menghibur, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Program Hafiz

Indonesia menjadi contoh paling mencolok dari transformasi dakwah media ini. Sejak pertama kali tayang di RCTI pada tahun 2013, program ini telah menjadi pionir dalam menghadirkan anak-anak penghafal al-Qur'an ke panggung hiburan nasional. Dengan mengusung format talent show, acara ini berhasil menarik perhatian jutaan pemirsa dari berbagai usia dan latar belakang (Najwah, 2022).

Popularitas Hafiz Indonesia tidak terlepas dari pamor keberhasilannya dalam menggabungkan aspek religius dengan unsur hiburan yang menyentuh emosi. Anak-anak yang tampil dalam acara ini biasanya berusia antara 6 hingga 11 tahun, dan telah menghafal lima hingga tiga puluh juz al-Qur'an. Mereka dinilai oleh juri-juri ahli yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmu al-Qur'an. Selain itu, acara ini dipandu oleh pembawa acara yang populer dan dicintai masyarakat, menambah daya tarik program di mata penonton (Audi Rizki Pangestu & Amin Shabana, 2024). Penempatan tayang di bulan Ramadan, yang merupakan momen spiritual paling penting dalam kalender Islam, juga turut menambah resonansi program ini di hati umat Muslim Indonesia. Hafiz Indonesia bahkan telah menerima berbagai penghargaan bergengsi sebagai program Ramadhan terbaik dan terfavorit (Kutanto, 2017).

Namun, di balik keberhasilan dan apresiasi yang tinggi tersebut, mulai muncul berbagai kritik dan pertanyaan etis terkait komersialisasi dalam tayangan religi (Saudi, 2018). Program Hafiz Indonesia, meskipun membawa misi dakwah dan pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari mekanisme industri hiburan dan logika rating. Kehadiran sponsor, iklan, serta pengemasan tayangan yang dramatis dan menyentuh emosi menjadi indikasi bahwa program ini juga mengejar keuntungan komersial (Ramadhan et al., 2021). Anak-anak peserta, yang seharusnya mendapat perlindungan khusus, justru diposisikan sebagai pusat perhatian publik dalam setting yang penuh tekanan dan tuntutan performa. Kamera yang menangkap ekspresi haru, tangis, atau kisah latar belakang

keluarga peserta menambah elemen dramatis yang bertujuan untuk menggugah simpati pemirsa.

Dramatisasi yang berlebihan ini menimbulkan pertanyaan etis tentang eksploitasi emosi anak-anak dan keluarganya demi kebutuhan hiburan dan rating. Meski niat awalnya adalah menyebarkan nilai-nilai al-Qur'an, pendekatan yang digunakan cenderung memperlihatkan praktik komersialisasi di mana aspek religius dijadikan sebagai komoditas untuk meraih audiens yang luas (Muhamad Yoga Firdaus et al., 2022). Hal ini menimbulkan dilema dakwah: ketika pesan spiritual harus disampaikan melalui mekanisme industri media yang menuntut sensasi, narasi emosional, dan segmentasi pasar. Di sinilah letak persoalan dakwah kontemporer ketika dakwah tidak lagi bebas nilai, tetapi harus berdialog dengan realitas media yang sangat kompetitif dan terstruktur.

Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen tayangan televisi cenderung menerima tanpa kritis apa yang disajikan oleh media. Tayangan-tayangan seperti *Hafiz Indonesia* dianggap sebagai bentuk ideal dari religiusitas modern, tanpa mempertanyakan proses produksi, motif ekonomi, dan dampak psikologis terhadap anak-anak peserta. Hal ini menunjukkan perlunya literasi media yang lebih baik di kalangan masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga mampu memahami konteks dan konsekuensi dari setiap tayangan yang mereka konsumsi. Literasi ini juga penting untuk mendorong masyarakat agar lebih selektif dalam memilih program-program religi yang benar-benar mendidik dan mencerminkan nilai-nilai Islam secara autentik.

Dalam dunia akademik, fenomena *Hafiz Indonesia* menawarkan peluang kajian yang sangat luas, mulai dari perspektif sosiologi agama, komunikasi dakwah, hingga etika media. Program ini dapat dijadikan studi kasus untuk memahami bagaimana simbol-simbol keagamaan dikonstruksi, dimodifikasi, dan dipasarkan dalam konteks media modern.

Dengan demikian, penting bagi para pendakwah, pendidik, dan pembuat kebijakan media untuk merefleksikan ulang tujuan dan metode dakwah yang dilakukan melalui media massa. Program seperti Hafiz Indonesia dapat tetap memiliki nilai positif jika dikemas dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, perlindungan anak, dan keaslian nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jika hanya mengejar popularitas dan keuntungan komersial, maka program ini berisiko menjadi sekadar tontonan yang memanfaatkan simbol religius demi kepentingan industri hiburan. Di sinilah peran penting dakwah kritis untuk mengingatkan, menilai, dan membimbing arah perkembangan dakwah di era digital dan media modern.

1. Deskripsi Program Hafiz Indonesia

Program Hafiz Indonesia yang tayang di stasiun televisi RCTI merupakan salah satu bentuk inovasi dakwah melalui media massa yang telah berhasil menarik perhatian publik secara luas. Sejak pertama kali tayang pada tahun 2013, program ini menampilkan kompetisi menghafal al-Qur'an yang ditujukan untuk anak-anak, dengan format tayangan yang menggabungkan aspek religius, edukatif, dan hiburan (Aini, 2020). Seiring berjalannya waktu, Hafiz Indonesia tidak hanya menjadi ikon program religi saat Ramadan, tetapi juga menjadi salah satu representasi penting bagaimana dakwah dapat dikemas dalam bentuk tayangan yang menarik, menyentuh, dan menghibur. Namun, di balik popularitasnya, terdapat sejumlah permasalahan yang patut dikaji, terutama terkait pencitraan anak sebagai simbol kesalehan dan potensi komersialisasi oleh media serta industri hiburan.

a. Format Acara: Kompetisi, Tahapan, Segmentasi Usia, dan Metode Seleksi

Program Hafiz Indonesia dirancang dalam format kompetisi bertema keagamaan, di mana peserta anak-anak saling berlomba dalam menghafal dan membaca al-Qur'an secara tartil dan bertajwid. Format kompetisi ini menarik karena berbeda dari program-program religi konvensional yang biasanya berbentuk

ceramah atau diskusi keagamaan. Dalam Hafiz Indonesia, setiap peserta menjalani tahapan seleksi yang cukup kompleks, dimulai dari audisi (Ikhtirah/Salamah), pengenalan peserta (Muqqadimah & Ta'aruf), eliminasi (Izaalah), kompetisi utama (Musabaqah), hingga babak final atau Wisuda Akbar. Setiap tahapan dirancang secara profesional, meniru struktur ajang pencarian bakat (talent search) seperti Indonesian Idol atau The Voice, namun dengan konten religius.

Segmentasi usia peserta menjadi aspek penting yang membedakan program ini dari kontes lain. Peserta umumnya berasal dari rentang usia 5 hingga 11 tahun. Dalam praktiknya, banyak peserta yang masih sangat kecil, bahkan ada yang baru berusia 3 tahun. Anak-anak yang mengikuti acara ini harus memiliki hafalan minimal lima juz al-Qur'an dan menunjukkan kualitas bacaan yang baik, baik dari sisi makhraj huruf, hukum tajwid, hingga kefasihan tartil. Hal ini menandakan bahwa peserta bukanlah anak-anak biasa, melainkan mereka yang telah melalui proses pendidikan keagamaan yang intensif sejak dini, baik melalui rumah tahfidz, pesantren, maupun bimbingan keluarga secara langsung (Islamiah et al., 2019).

Metode seleksi dalam program ini juga patut diperhatikan. Tidak seperti kontes hiburan lain yang menggunakan sistem voting penonton (SMS atau aplikasi), Hafiz Indonesia menempatkan keputusan penuh pada dewan juri profesional yang berasal dari kalangan ulama dan *qari'/qaria'h* ternama. Hal ini menambah nilai kredibilitas dalam proses penilaian, karena para juri benar-benar menilai kualitas hafalan dan pembacaan al-Qur'an peserta. Namun demikian, aspek hiburan tetap tidak dilepaskan. Dalam setiap episode, disisipkan elemen-elemen dramatis, seperti kisah perjuangan peserta, wawancara dengan orang tua, hingga momen haru yang menyentuh emosi penonton.

b. Pencitraan Anak-anak sebagai Simbol Kesalehan

Salah satu daya tarik utama Hafiz Indonesia adalah pencitraan anak-anak sebagai simbol kesalehan dan keteladanan. Anak-anak yang tampil dalam program ini tidak hanya dinilai

berdasarkan kemampuannya menghafal al-Qur'an, tetapi juga atas perilaku, kelembutan, kepolosan, dan kedekatan mereka dengan nilai-nilai agama. Mereka ditampilkan sebagai sosok-sosok mungil yang tidak hanya pintar, tetapi juga saleh, penuh cinta pada al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, dan menjadi inspirasi bagi jutaan keluarga di Indonesia (Anggreni, 2024).

Simbolisasi kesalehan melalui anak-anak menjadi strategi naratif yang kuat dalam membangun hubungan emosional dengan penonton. Kamera sering menyorot ekspresi polos peserta saat membaca ayat-ayat suci, menangis karena rindu orang tua, atau ketika mendapat pujian dari dewan juri. Cerita di balik perjalanan hidup anak-anak tersebut juga sering diangkat misalnya, anak yang berasal dari keluarga sederhana, anak yatim, atau anak dengan kondisi kesehatan tertentu yang kemudian diberi narasi sebagai "pejuang kecil di jalan Allah."

Dengan demikian, anak-anak tidak lagi hanya menjadi peserta lomba, melainkan juga menjadi representasi ideal dari harapan umat Islam: generasi yang mencintai al-Qur'an sejak kecil. Dalam logika simbolik ini, anak-anak menghafal al-Qur'an diposisikan dalam tingkat kesalehan yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada orang dewasa yang belum tentu mampu mencapai level tersebut. Akibatnya, mereka menjadi ikon publik dan sekaligus media dakwah yang sangat kuat.

Namun, pencitraan ini juga membawa implikasi yang harus dicermati. Dalam banyak kasus, anak-anak berada dalam tekanan performatif yang cukup tinggi. Mereka dituntut tampil sempurna, tidak hanya dari segi hafalan tetapi juga dari sikap, penampilan, dan cara berbicara. Segala bentuk emosi merekabaik kegembiraan, kesedihan, maupun ketegangan ditampilkan secara eksplisit untuk menciptakan efek dramatik dalam tayangan. Ini menimbulkan pertanyaan etik: sejauh mana anak-anak diberi ruang untuk menjadi diri mereka sendiri, dan sejauh mana mereka dikonstruksi sebagai "figur religius kecil" demi kepentingan tayangan televisi?

c. Keterlibatan Media dan Kepentingan Industri Hiburan

Sebagaimana industri hiburan lainnya, program Hafiz Indonesia tidak terlepas dari logika komersial yang menjadi dasar keberlangsungan media massa. RCTI sebagai penyelenggara tentu memiliki target rating dan pangsa pasar yang harus dipenuhi, terutama di bulan Ramadan yang menjadi momen emas dalam dunia pertelevisian. Program religi seperti Hafiz Indonesia, dengan segala daya tarik spiritual dan emosionalnya, mampu mendongkrak angka penonton secara signifikan. Dalam konteks ini, konten religius bukan semata-mata bentuk dakwah, tetapi juga komoditas yang dikemas sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan (Sinatra, 2019).

Keterlibatan media dalam memproduksi tayangan ini sangat terlihat dari aspek visual dan teknis. Hafiz Indonesia menampilkan grafis yang modern, tata panggung yang megah, serta penyuntingan video yang sangat halus dan emosional. Musik latar yang mengiringi adegan dramatis, angle kamera yang fokus pada ekspresi anak-anak, dan pengemasan cerita personal menjadi bagian integral dari strategi produksi. Tak jarang, sponsor-sponsor besar ikut masuk dalam tayangan ini, baik dalam bentuk iklan komersial maupun placement produk secara halus (*soft selling*). Bahkan hadiah yang diberikan kepada para peserta pemenang seperti umrah, beasiswa, hingga rumah ditampilkan dengan framing tertentu yang menggambarkan besarnya nilai perjuangan mereka.

Melalui mekanisme ini, tayangan Hafiz Indonesia bukan hanya menjadi media dakwah, tetapi juga menjadi ruang promosi nilai, produk, bahkan gaya hidup. Agama dan spiritualitas ditampilkan dalam bentuk tontonan yang dapat dikonsumsi secara massal, dengan segala estetikanya. Maka, muncul pertanyaan penting dalam konteks dakwah: apakah media benar-benar menyampaikan nilai-nilai Islam murni, ataukah sedang membungkus nilai-nilai tersebut dalam bingkai kapitalisme budaya?

Isu ini semakin relevan jika dilihat dari perspektif anak-anak sebagai subjek tayangan. Dalam hukum pertelevisian dan perlindungan anak, ada batasan-batasan ketat mengenai

sejauh mana anak-anak boleh dilibatkan dalam produksi media, terutama jika ada muatan komersial di dalamnya. Program Hafiz Indonesia berada dalam posisi yang kompleks: di satu sisi, ia memberikan wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan menghafal al-Qur'an; namun di sisi lain, terdapat kemungkinan eksploitasi simbolik anak demi kepentingan ekonomi dan popularitas media.

Lebih jauh, intervensi industri hiburan dalam produksi dakwah menimbulkan tantangan baru. Ketika nilai-nilai agama dibentuk melalui konstruksi televisi, maka yang muncul bukan lagi dakwah dalam arti transendental dan spiritual, tetapi dakwah yang harus mengikuti logika rating, estetika media, dan selera pasar. Ini merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai “komersialisasi dakwah” yakni ketika pesan-pesan keagamaan tidak lagi berdiri sebagai misi ilahiah, melainkan menjadi komoditas yang dapat dijual dan dipertontonkan.

2. Identifikasi Isu Dakwah

Program Hafiz Indonesia yang ditayangkan oleh RCTI setiap bulan Ramadan telah menjadi fenomena tersendiri dalam ranah dakwah kontemporer (Karim et al., 2023). Program ini menampilkan anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal al-Qur'an, dan dikemas dalam bentuk kompetisi religius yang menyentuh sisi emosional penonton. Meskipun pada permukaan tampak sebagai bentuk syiar Islam yang inovatif dan membanggakan, lebih dalam program ini menyimpan sejumlah persoalan serius yang berkaitan dengan esensi dakwah, nilai spiritualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Terdapat empat isu utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini: komersialisasi nilai religius, eksploitasi emosional anak, distorsi makna hadis, dan pergeseran orientasi dakwah. Keempat isu ini saling terkait dan membentuk kerangka besar dari problematika dakwah yang muncul dalam format tayangan keagamaan seperti Hafiz Indonesia.

a. Komersialisasi Nilai Religius: Perpindahan Tujuan dari Nilai Spiritual Menuju Target Komersial dan Rating

Komersialisasi nilai religius dalam program Hafiz Indonesia tampak jelas dari cara acara ini dikemas dan dipasarkan kepada publik. Di satu sisi, acara ini berhasil mempopulerkan kegiatan menghafal al-Qur'an, yang merupakan bagian dari tradisi Islam yang sangat mulia. Namun di sisi lain, tayangan ini telah berubah menjadi produk industri hiburan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan perolehan rating televisi.

Kebutuhan media untuk terus bertahan di tengah persaingan menyebabkan nilai-nilai spiritual dalam dakwah harus dibungkus dalam kemasan yang menarik, menyentuh, dan menghibur. Hafiz Indonesia tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menginspirasi penonton agar lebih dekat dengan al-Qur'an, tetapi juga untuk menarik iklan, sponsor, dan perhatian masyarakat dalam bentuk angka pemirsa (rating). Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi dari dakwah sebagai proses spiritual menuju dakwah sebagai komoditas.

Dalam proses ini, nilai religius tidak lagi berdiri sendiri sebagai kekuatan transenden, tetapi menjadi bagian dari strategi pasar. Tayangan-tayangan religi, termasuk Hafiz Indonesia, tidak terlepas dari kepentingan kapitalisme media yang menekankan efektivitas penayangan berdasarkan keuntungan ekonomi. Konten dakwah menjadi "produk" yang harus dikemas sedemikian rupa untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini berpotensi mengikis nilai-nilai dakwah yang seharusnya bersifat mendalam, personal, dan bebas dari motif komersial.

b. Eksploitasi Emosional Anak: Dramatisasi Berlebihan untuk Kepentingan Penonton

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam Hafiz Indonesia adalah penggunaan dramatisasi emosional yang melibatkan anak-anak peserta. Anak-anak ini tidak hanya dinilai dari segi kemampuan hafalan, tetapi juga dari kisah hidup mereka yang sering kali diangkat sebagai narasi utama acara. Cerita tentang anak yatim, anak dari keluarga miskin,

atau anak yang mengalami kondisi tertentu disampaikan dengan narasi yang menyentuh, lengkap dengan musik latar yang menggugah perasaan.

Meskipun dapat menginspirasi, narasi semacam ini cenderung memposisikan anak-anak sebagai objek tontonan yang dijadikan alat untuk menggugah empati penonton. Mereka ditempatkan dalam tekanan performatif, di mana ekspresi tangis, haru, dan kerinduan harus ditampilkan secara terbuka demi kepentingan naratif acara. Proses ini secara tidak langsung mengeksploitasi sisi emosional anak untuk kepentingan tayangan.

Eksplorasi emosional ini juga menyangkut aspek psikologis. Anak-anak dalam usia pertumbuhan sangat rentan terhadap tekanan dan ekspektasi. Ketika mereka diposisikan sebagai ikon publik, ada beban psikologis yang besar untuk tampil sempurna. Mereka bukan hanya dituntut untuk hafal al-Qur'an, tetapi juga harus mampu tampil baik di depan kamera, menjawab pertanyaan juri, dan menangani reaksi emosional dari jutaan penonton.

Dari sisi dakwah, hal ini justru bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak-anak. Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Memasukkan mereka dalam sistem tayangan yang berorientasi hiburan dapat berisiko terhadap perkembangan mental dan spiritual mereka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana keterlibatan anak dalam program dakwah semacam ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Distorsi Makna Hadis: Penyederhanaan Nilai Spiritual Menjadi Simbol Status Sosial

Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering dikutip dalam konteks menghafal al-Qur'an berbunyi: "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan al-Qur'an, dan akan merendahkan kaum yang lain dengannya." Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mencintai,

membaca, dan menghafal al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya, makna hadis ini sering kali disederhanakan dan direduksi menjadi simbol-simbol status sosial di masyarakat.

Dalam Hafiz Indonesia, peserta yang berhasil tampil baik kerap dielu-elukan sebagai "bintang kecil Islam," mendapatkan penghargaan besar, dan bahkan menjadi figur publik. Mereka tampil di berbagai acara, diundang ke istana, dan menjadi duta al-Qur'an. Meskipun ini tampak positif, ada kecenderungan bahwa status sebagai penghafal al-Qur'an dijadikan alat untuk memperoleh pengakuan sosial. Proses spiritualitas yang seharusnya bersifat ikhlas dan tersembunyi berubah menjadi proses eksibisionis yang memerlukan pengakuan eksternal.

Kondisi ini berbahaya karena dapat menanamkan pemahaman yang keliru dalam masyarakat, terutama anak-anak, bahwa menghafal al-Qur'an dilakukan untuk mendapatkan hadiah, popularitas, dan status sosial. Padahal dalam Islam, amal ibadah tidak diukur dari pujian manusia, tetapi dari keikhlasan niat dan penerimaan Allah SWT. Distorsi makna ini dapat menjauhkan masyarakat dari pemahaman hakiki terhadap al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, bukan sebagai alat prestise.

Lebih jauh, distorsi ini juga memengaruhi orientasi pendidikan Islam. Banyak orang tua yang kemudian mendorong anak-anak mereka untuk menghafal al-Qur'an bukan karena keinginan membentuk karakter spiritual, melainkan karena dorongan untuk dapat tampil di media, mendapatkan beasiswa, atau menjadi terkenal. Ini adalah bentuk pembalikan nilai yang harus disikapi secara serius oleh para ulama, pendidik, dan pelaku dakwah.

d. Pergeseran Orientasi Dakwah: Dakwah Sebagai Hiburan, Bukan Edukasi Ruhani

Dakwah dalam Islam adalah proses menyampaikan nilai-nilai kebenaran, ajakan kepada jalan Allah, serta pembentukan karakter ruhani yang mendalam. Namun dalam konteks tayangan seperti Hafiz Indonesia, dakwah mengalami pergeseran orientasi yang signifikan. Dakwah tidak lagi dilihat sebagai

proses transformasi spiritual yang berkelanjutan, melainkan sebagai hiburan yang dikonsumsi secara instan (Wahid, 2023).

Dalam dunia pertelevisian, segala hal harus dikemas dengan estetika visual yang menarik, cerita yang dramatis, dan alur yang menggugah. Hal ini membuat substansi dakwah sering kali terpinggirkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan minat penonton. Hafalan al-Qur'an menjadi atraksi utama, sementara nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sering kali tidak dijelaskan atau dijadikan bahan refleksi mendalam.

Selain itu, dakwah dalam format media massa harus menyesuaikan diri dengan durasi tayang, jadwal iklan, dan pola konsumsi penonton. Dakwah menjadi terbatas oleh format, dan substansinya disesuaikan agar "laku dijual." Akibatnya, proses edukasi ruhani yang seharusnya menjadi inti dari dakwah tergantikan oleh tontonan yang menghibur, cepat saji, dan emosional. Tayangan-tayangan ini memang dapat menyentuh, tetapi tidak selalu mengubah.

Orientasi hiburan dalam dakwah juga berimplikasi pada standar keberhasilan dakwah itu sendiri. Keberhasilan dakwah tidak lagi diukur dari perubahan akhlak masyarakat, tetapi dari jumlah penonton, komentar positif, dan popularitas di media sosial. Ini menandakan adanya krisis makna dalam dakwah modern yang perlu segera dikritisi dan diluruskan kembali.

Empat isu utama yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa program Hafiz Indonesia tidak hanya dapat dilihat sebagai bentuk keberhasilan syiar Islam di era modern. Di balik kemasan yang mengharukan dan menghibur, terdapat tantangan serius bagi keberlangsungan dakwah yang substansial dan bermartabat. Komersialisasi, eksploitasi emosional, distorsi nilai-nilai hadis, serta pergeseran orientasi dakwah merupakan peringatan bahwa media sebagai alat dakwah harus dikendalikan secara arif, dengan mempertimbangkan etika, nilai spiritual, dan perlindungan terhadap subjek dakwah, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya reflektif dari para pelaku dakwah, akademisi, serta regulator media untuk

menata ulang strategi dakwah melalui media agar tetap setia pada tujuan utamanya: membimbing umat menuju kebenaran dan kebajikan, bukan semata-mata menjadi tontonan yang laris di pasaran.

SOLUSI

Fenomena menjamurnya program dakwah dalam bentuk hiburan kompetitif seperti *Hafiz Indonesia* membawa serta sejumlah isu dakwah yang memerlukan perhatian serius, mulai dari komersialisasi nilai religius, eksploitasi emosional anak, distorsi makna hadis, hingga pergeseran orientasi dakwah dari ruang edukatif ke ruang hiburan. Menghadapi realitas ini, diperlukan serangkaian solusi komprehensif agar nilai-nilai dakwah tidak mengalami penyimpangan yang dapat merusak ruh dakwah itu sendiri. Solusi-solusi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian tujuan dakwah serta melindungi subjek-subjek yang terlibat, terutama anak-anak.

1. Komersialisasi Nilai Religius

Salah satu kritik paling tajam terhadap program seperti *Hafiz Indonesia* adalah kecenderungannya untuk menjadikan nilai-nilai religius sebagai komoditas industri hiburan. Tujuan utama dari dakwah, yaitu menyampaikan risalah ilahiyah demi tercapainya masyarakat yang berakhlak mulia, berisiko tergantikan oleh kepentingan ekonomi seperti rating dan sponsor.

Produsen acara perlu menghidupkan kembali prinsip dakwah yang berdiri di atas niat lillah (ikhlas). Dalam prinsip dakwah Islam, ikhlas menjadi fondasi utama dari segala aktivitas keagamaan. Program dakwah seharusnya berangkat dari motivasi menyebarkan ajaran Islam, bukan mengejar pujian atau keuntungan duniawi. Oleh karena itu, setiap konten dan strategi penyiaran harus melalui evaluasi niat dan orientasi, agar tidak menyimpang dari semangat dakwah Nabi Muhammad saw. Peneguhan niat ini juga perlu dijadikan

komitmen tertulis dalam bentuk visi dan misi setiap program religi di televisi.

2. Eksploitasi Emosional Anak

Program seperti *Hafiz Indonesia* banyak menuai pujian karena menampilkan anak-anak sebagai penghafal al-Qur'an. Namun, tidak sedikit pula kritik yang diarahkan pada eksploitasi emosional yang terjadi. Banyak segmen dalam acara ini dirancang secara dramatis untuk menggugah air mata penonton, sementara aspek pendidikan dan pembentukan karakter anak kurang mendapat sorotan yang proporsional.

Untuk menanggulangi hal ini, perlu dirancang kode etik penyiaran anak dalam dakwah. Kode etik ini harus berbasis prinsip Islam dan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam konvensi hak anak internasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Penampilan anak-anak dalam media dakwah harus mengedepankan martabat, hak, dan kebutuhan perkembangan mereka, bukan sekadar alat untuk menggugah emosi atau meningkatkan rating.

Lebih dari itu, setiap peserta program dakwah berbasis anak harus mendapatkan pendampingan psikologis dan spiritualitas yang memadai. Ini penting agar pengalaman mereka dalam program tersebut menjadi bagian dari proses tumbuh kembang yang sehat, bukan tekanan yang membebani jiwa dan emosi mereka. Pendampingan ini dapat berupa sesi konseling, pendampingan guru agama, serta evaluasi berkala terhadap kondisi psikologis dan spiritual peserta. Dengan pendekatan ini, program dakwah anak dapat benar-benar menjadi ladang tarbiyah (pendidikan) dan bukan ajang eksploitasi.

3. Distorsi Makna Hadis

Isu lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya distorsi atau penyederhanaan makna hadis yang mengangkat keutamaan menghafal al-Qur'an. Dalam banyak kasus, hadis-hadis tersebut ditampilkan secara literal tanpa upaya untuk menafsirkan dalam konteks yang lebih komprehensif. Hal ini berisiko

menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat, seperti menganggap hafalan semata sudah cukup untuk mendapat jaminan surga.

Solusi terhadap isu ini adalah dengan mengaji ulang makna hadis secara kontekstual. Pemahaman terhadap hadis harus mencakup konteks turunnya, kondisi masyarakat saat itu, serta integrasi antara teks dan realitas. Para ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam perlu berperan aktif dalam mendidik masyarakat mengenai pemahaman hadis yang benar. Misalnya, hadis-hadis keutamaan hafalan al-Qur'an harus dibarengi dengan pemahaman akan pentingnya pengamalan dan akhlak sebagai bagian integral dari dakwah Qur'ani.

Langkah lanjutannya adalah dengan merancang pendidikan keagamaan berbasis tafsir dan konteks. Kurikulum pendidikan Islam, baik di madrasah maupun pesantren, harus mengintegrasikan kegiatan tahfidz dengan tafsir, konteks historis, serta dimensi ruhani dan sosial dari al-Qur'an. Dengan cara ini, penghafalan al-Qur'an tidak hanya menjadi aktivitas mekanis, tetapi juga proses internalisasi nilai dan pemaknaan yang mendalam. Lembaga pendidikan Islam juga harus aktif dalam melahirkan generasi yang tidak hanya kuat hafalannya, tetapi juga arif dalam mengamalkannya.

4. Pergeseran Orientasi Dakwah

Transformasi dakwah dalam media telah menggeser orientasi dari edukasi spiritual menjadi hiburan religius. Dakwah tidak lagi dipandang sebagai proses tazkiyah (penyucian jiwa) dan tarbiyah (pembentukan karakter), tetapi lebih sebagai tayangan menarik yang mampu bersaing dengan program lain dalam hal rating dan popularitas.

Menyikapi hal ini, diperlukan reformasi konsep dakwah media. Para pengelola media dakwah harus menyusun ulang visi dakwah mereka, menekankan pentingnya penyadaran ruhani, pembentukan karakter Islami, dan penguatan etika. Format tayangan dapat tetap menghibur, namun tidak mengorbankan kedalaman pesan dakwah. Contoh nyata adalah dengan mengurangi elemen dramatisasi berlebihan, menambah sesi edukatif.

Di samping itu, solusi jangka panjang adalah dengan pelibatan lembaga dakwah dan ormas Islam seperti NU, dan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini perlu dilibatkan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengawasan program dakwah di media agar tidak keluar dari tujuan syariat (maqasid syariah). Kehadiran lembaga-lembaga ini akan memberikan otoritas keilmuan dan legitimasi moral terhadap tayangan dakwah, sekaligus menjaga agar proses dakwah tidak dipermainkan oleh industri hiburan.

Dengan menerapkan solusi-solusi di atas secara terstruktur dan konsisten, diharapkan isu-isu dakwah yang muncul dalam program seperti *Hafiz Indonesia* dapat diredam atau bahkan diubah menjadi peluang positif. Dakwah di media massa akan tetap relevan sepanjang ia berpijak pada nilai keikhlasan, perlindungan terhadap subjek dakwah, pemahaman teks agama yang utuh, serta orientasi yang jelas menuju pembentukan masyarakat berakhlak. Program *Hafiz Indonesia* dan sejenisnya dapat menjadi wahana pembelajaran dan inspirasi, bukan sekadar tontonan yang menjual kesalehan sebagai komoditas.

REFLEKSI

Fenomena Hafiz Indonesia merefleksikan wajah dakwah kontemporer yang berada di persimpangan antara idealisme spiritual dan realitas industri hiburan. Di satu sisi, tayangan ini mampu menggugah kesadaran religius masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai al-Qur'an sejak dini, dan menghadirkan sosok anak-anak sebagai inspirasi spiritual. Namun di sisi lain, terdapat dinamika yang mengkhawatirkan: komersialisasi nilai religius, eksploitasi emosional anak-anak, dan pergeseran orientasi dakwah dari edukasi ruhani menjadi tontonan kompetitif.

Refleksi ini mengajak kita untuk melihat ulang esensi dakwah: bahwa dakwah adalah proses pembinaan, bukan pertunjukan; ia bersifat mendalam, bukan permukaan; ia mengajak umat mendekat pada Tuhan, bukan sekadar memukau pemirsa. Ketika tayangan religi dikemas dengan tuntutan pasar, maka diperlukan

kebijaksanaan dalam mengatur batas antara dakwah sebagai pencerahan dan hiburan sebagai industri.

Anak-anak sebagai subjek dakwah dalam media harus diperlakukan dengan kehati-hatian penuh. Mereka bukan alat eksibisi religius, tetapi amanah yang harus dijaga hak, martabat, dan tumbuh kembangnya secara utuh. Media, sebagai ruang dakwah potensial, juga harus berani melakukan otokritik dan membuka ruang kolaborasi dengan ulama, akademisi, serta lembaga perlindungan anak agar pesan-pesan spiritual tidak kehilangan substansi karena tekanan rating atau popularitas.

Refleksi ini menjadi pengingat bahwa dakwah sejatinya adalah misi mulia yang hanya dapat dijalankan dengan keikhlasan, integritas, dan keberpihakan pada kemaslahatan. Jika media ingin menjadi bagian dari jalan dakwah, maka ia harus bersedia dikawal nilai, bukan semata-mata dikendalikan pasar.



PENUTUP

Refleksi dan Rekomendasi atas Dinamika Dakwah Kontemporer

Dakwah Islam sebagai sebuah proses penyampaian nilai dan ajaran ilahiah sejatinya tidak pernah bersifat statis. Ia senantiasa bergerak dinamis mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, dakwah menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal umat maupun dari eksternal, berupa perubahan sosial, budaya, ekonomi, hingga perkembangan teknologi komunikasi. Dalam bab-bab sebelumnya, telah diuraikan berbagai isu dakwah kontemporer seperti disorientasi pesan dakwah, fragmentasi sosial keumatan, serta terjadinya misrepresentasi dakwah di ruang-ruang digital.

Berbagai permasalahan tersebut menuntut pendekatan dakwah yang lebih adaptif, inklusif, dan strategis. Dakwah tidak cukup hanya mengandalkan metode tradisional yang bersifat monolog dan menekankan pada aspek verbalistik tetapi perlu ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, solusi dakwah kontemporer perlu dikembangkan dalam bentuk inovasi pendekatan, integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi digital, serta penguatan kompetensi dai dalam memahami konteks sosial umat secara lebih mendalam.

Salah satu kunci utama keberhasilan dakwah masa kini adalah kemampuan untuk membumikan nilai-nilai Islam secara relevan dan solutif. Islam yang ramah, moderat, dan membangun perdamaian harus menjadi narasi utama dalam setiap aktivitas dakwah. Dakwah tidak hanya mengajak, tetapi juga harus memberdayakan. Dalam hal ini, penguatan literasi keagamaan, pelibatan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus terus diupayakan.

Sebagai penutup, bab ini menegaskan bahwa dakwah kontemporer merupakan sebuah ikhtiar berkelanjutan untuk menjaga relevansi Islam dalam kehidupan modern. Para dai, akademisi, dan institusi dakwah dituntut untuk tidak sekadar melestarikan tradisi dakwah tetapi juga merekonstruksi dan mengembangkan dakwah sebagai gerakan perubahan sosial yang transformatif. Dengan semangat ijtihad, dakwah kontemporer diharapkan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi jalan hidayah bagi umat manusia dalam menapaki kehidupan yang lebih bermakna dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Putri, S. T. (2022). Islamophobia: Ancaman Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a1>
- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne. <https://archive.org/details/greattheftwrestl0000abou>
- Adam, A. F. (2019). Kapitalisasi Agama Menuju Pasar, Komodifikasi dan Komersialisasi “Agama.” *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 17–24.
- Addini, A. (2019). Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim sebagai Mode Sosial. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 109–118. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1313>
- Agus, A. (2023). Islamic Economic Strategy Faces Global Recession in the Perspective of Dakwah: Strategi Ekonomi Islam Menghadapi Recessi Global dalam Persepektif Dakwah. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 6(2), 53–66.
- Aji, U. P. & Kerwanto. (2023). Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 45–61. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>
- Aksa. (2017). Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal*, 1 (1), 1-14
- Al-Bayanuni, M. A. F. (1993). *Al-Madkhal ila 'Ilm al-Da'wah: Dirasat Manhajiyah Shamilah li Tarikh al-Da'wah wa Usuliha wa Manahijiha wa Asalibiha wa Wasa'iliha wa Mushkilatiha fi Daw' al-Naql wa al-'Aql*. Mu'assasat al-

Risalah.

- Al-Hikami, F. J., Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Moderasi Beragama dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme dan Peradaban Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(3), 325–332. <https://doi.org/10.60132/jip.v1i3.127>
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Dakwah Dialogis, Seni Berkomunikasi dan Berinteraksi dalam Dakwah* (M. Zaini (ed.)). BILDUNG.
- Alfiyah, A., Ahlan, A., & Adila, F. (2022). Eksistensi Perempuan dalam Dakwah Kontemporer Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 280–291.
- Ali, H. (2019). *Dakwah dengan Hikmah: Seni Menyentuh Hati Umat*. CV Yrama Widya.
- Alnashr, M. S., Zaenudin, Z., & Hakim, M. A. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Pembiasaan dan Budaya Madrasah. *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(2), 155–166. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.504>
- Ameliya, T. M. (2024). *Kemenag sebut pesantren bertambah 11 ribu sejak UU Pesantren disahkan*. Antara.
- Amna, A. (2019). Hijrah Artis sebagai Komodifikasi Agama. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 331. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1531>
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674034563>
- Ana, A. K., & Shofa, A. R. (2023). The Role of Social Media in Increasing the Relevance and Accessibility of Dakwah: Challenges and Strategies of Dakwah. *JKMD*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.35905/jkmd.v5i1.5552>

- Annisa, D. N., Wijaya, I. S., & Huda, M. (2023). Pesan Dakwah Self-Healing dalam Channel YouTube Ustadzah Halimah Alaydrus. *Journal of Social Computer and Religiosity (SCORE)*, 1(2), 63–72.
- Arfa, & Lasaiba. (2022). Kampanye Toleransi melalui Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*.
- Aryati, A., Suradi, A., & Marpuah, S. (2024). The Politics of Islamophobia in Indonesia: Reacting Religious Issues in Politics. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 8(1), 23–32.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i1.11657>
- Asiyah, S., & Hakim, M. L. (2017). *Strategi Kontra Gerakan Islam Transnasional melalui Dakwah Struktural Counter Strategy of Transnational Islamic Movement through Structural Da'wah*.
- Assegaf, Abd. Rachman (2017). Gerakan Transnasional Islam dan Globalisasi Salafi di Islamic Center bin Baz Yogyakarta. *Millah*, 16(2), 147–172.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art1>
- Attarwiyah, N. M. (2025). Spiritual Leadership and Mental Wellbeing: the Role of Kiai in Maintaining Santri Mental Health. 17(1), 121-134. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 17(1), 121–134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1.6395>
- Ayu Rahmawati, & Prembayun Miji Lestari. (2024). Pendakwah Berbahasa Jawa Ngapak dalam Ceramah Ustadzah Mumpuni pada Channel Youtube: Kajian Sociolinguistik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(2), 2080–2096.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.3679>
- Arrozi, M. N. J., & Musyafak, N. (2021). Gerakan Transnasional di Era Globalisasi: Perspektif Komunikasi Islam. *At-Tabasyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*,

- 8(2), 187. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v8i2.9265>
- Azizah, A., Aulia, A., Dinana, R. A., Rahmawan, A. I., Al Maliki, A. Z., & Syafi'i, I. (2025). Dinamika Islamopobhia dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 74–91.
- Azman, Z. (2022). Dakwah Bagi Generasi Milenial Melalui Media Sosial. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3, 193–205. <https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.350>
- Azmy, A. S. (2020). Fundamentalisme Islam: Telaah terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27997>
- Azzahra, S., & Maysithoh, S. (2024). Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1568–1579.
- Bakhri, S. (2020). Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54–65.
- Basri, M. R. (2023). Gejala Hijrah di Indonesia: Transformasi Dari Islamisme Fundamentalis Menuju Islamisme Populer. *Maarif*, 17(2), 31–51. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.193>
- Bayu, D. (2022). *Indonesia Miliki 26.975 Pesantren, Ini Sebaran Wilayahnya*. Data Indonesia ID.
- Budiantoro, W., & Saputri, K. D. (2021). Pengembangan Dakwah Multikultural di Era Digital. *Icodev*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.24090/icodev.v2i1.5294>
- Darmawan, A. & Desiana, R. (2020). *Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi*. Ar-Raniry Press.

- Djuniasih, & Kosasih. (2019). Konflik Agama dan Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Konflik Sosial*.
- Endrika Widdia Putri. (2022). Analisis Konten Dakwah dalam Channel Youtube Omar & Hana Silamic Cartoons for Kids pada Awal Ramadhan 1443 H. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jmd.v5i1.4115>
- Esposito, J. L., & Kalin, I. (2011). *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/islamophobia-a-9780199753642?q=Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century&cc=id&lang=en>
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izah, R., Saputri, M. K., Qodri, H. F., Ramadhani, M. H., & Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 166–173.
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi halal di Indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 449–476.
- Faizah, R., & Alkhalimi, D. V. (2023). Peran Perempuan dalam Gerakan Dakwah Islam. *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(2), 100–108.
- Faqih, N. (2019). Kesejahteraan Subjektif Ditinjau dari Virtue Transcendence dan Coping Stress. *Tazkiya: Journal of Psychology*, 7(2), 145–154. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v7i2.13475>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.
- Fatimah, C., Surawan, S., & Wahdah, N. (2022). Implikasi Sertifikat Halal Produk dalam Sakralisasi Agama di Indonesia. *Mudṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97–108.

- Fatimah, K., Angga Febriyatko, Hasan Busri, & Moh Badrih. (2023). Estetika Bahasa dalam Retorika Dakwah KH Anwar Zahid pada Channel Youtube: Kajian Fungsional Linguistik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(2), 1068–1089. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2906>
- Fernanti, U., Asri, Y., Pitaloka Priasmoro, D., & Eka Ardiyanti, S. (2024). Gambaran Stres pada Santriwati Penghafal Al Quran di Pondok Pesantren An Nur 1 Asrama Az Zubaidah Bululawang Kabupaten Malang. *Jurnal Keperawatan*, 18(2), 83–89. <https://doi.org/10.36568/nersbaya.v18i2.151>
- Firdaus, M. M., & Kolil, M. T. (2023). Optimalisasi Media Sosial Gerakan Pemuda (Gp) Ansor sebagai Strategi Dakwah Pimpinan Cabang Kota Kediri. *Spektra*, 2(2), 115–129. <https://doi.org/10.33752/.v2i2.4718>
- Fitriani, H., Susanti, L. D., & Astuti, R. Y. (2020). Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden). *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(01), 153–171.
- Fitriani, V., & Aliyudin, M. (2021). Dakwah dalam Pendekatan Konsep Ekologi. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6, 80–99.
- Fitriyah, R. D., Huda, S., Adnan, A. M., Hermansah, T., & Ummah, A. H. (2022). Reformulation of Da'wah Communication Paradigm in the Post-Pandemic Era. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 190–219. <https://doi.org/10.15642/JKI.2022.12.2.190-219>
- Foltz, R. C. (2005). *Environmentalism in the Muslim World*. Nova Science Publishers. <https://lawcat.berkeley.edu/record/172335>
- Freire, P. (2024). *Pendidikan Kaum Tertindas: Pendidikan Kaum Tertindas*. Narasi.

- Ghafournia, N. (2020). Negotiating Gendered Religious Space: Australian Muslim Women and The Mosque. *Religions*, 11(12), 686.
- Habibi, M. (2018). Optimalisasi Dakwah Melalui Media Sosial pada Era Milenial. *Al-Hikmah*, 12(1). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v12i1.1085>
- Hakim, L. (2024). Dinamika Hijrah di Indonesia: Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, 5(1), 13–33. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.3993>
- Hapsari, D. P., Putri, E. B. P., & Gunawan, S. (2022). Kajian titik kritis kehalalan produk olahan yoghurt. *Halal Research Journal*, 2(1), 8–25.
- Hasan, N. (2006). Salafism in Indonesia: Transnational Islam, Violent Activism, and Cultural Resistance. PDF: 2, 15
- Hasbi, M., & Fadillah, A. (2024). *Peran Media Sosial dalam Dakwah : Tantangan dan Peluang di Era Digital*. 4(2), 17–23.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(02).
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64.
- Hi Asnawi, M. (2020). Ketidaksantunan Berbahasa pada Islamophobia di Media Sosial. *Jurnal Osf*, 8(2), 259–267.
- Hidayat, A. S. (2013). Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam: Dari Dakwah Tekstual menuju Dakwah Kontekstual. *Jurnal Risalah*, 24(2), 1–15.
- Hidayat, Pimay, & Savitri. (2020). Kampanye Publik dan Kesadaran Toleransi. *Jurnal Komunikasi Massa*.
- Huda, F. W., Helmy, N., & Saori, S. (2023). Dakwah Digital Berbasis Moderasi Beragama. In *Proceedings Uin Sunan*

Gunung Djati Bandung (Vol. 3, Issue 7).

- Huda, S. (2008). Menggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer: Perspektif Historis-Paradigmatik. *Al-'Adalah: Jurnal Kajian Keislaman dan Masyarakat*, 11(2), 253–272. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1174480>
- Huda, S. (2017). *Sufisme Dakwah Era Kontemporer: Kajian atas Pemikiran dan Praksis M. Fethullah Gülen*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26939.11041>
- Ibnu Kasir, & Syahrol Awali. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68.
- Ifansyah, M. S., Aidah, U., Anwari, N., Halimatus, N., Jumali, J., Aziz, M. A., & Yaqin, A. (2023). Analisis Dakwah Menggunakan Nasyid Ning Umi Laila Perspektif Syaikh Jumâ€™ah Amin. *Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 5(2), 11. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v5i2.115>
- Itasari, A. A. (2024). *Pengantar Komunikasi Persuasif*. Unisri Press.
- Jaya, C. K. (2024). *Komunikasi Dakwah Era Digital*. PublicaIndonesiaUtama.
- Karim, A. A., & Nuraziza, F. (2024). Strategi Dakwah Generasi Milenial: Studi Kasus Rutinan Minggu Legi (Ngaji dan Maulid Diba') STAIMU Mukomuko. *Al-Idaroh*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i1.691>
- Karim, A. (2016). Dakwah Melalui Media: Sebuah Tantangan dan Peluang. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 4(1), 157–172.
- Kasir, I., & Awali, S. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68.

- Khaer, M. (2016). Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–18.
- Khasanah, M. (2020). Peranan Media Sosial sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi. *Al-Tijary*, 139–157.
- Krismono. (2016). Konflik NU-Salafi di Batur. dalam Zuly Qodir et al. (2023), 213–215.
- Liliweri, A. (2020). *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*.
- Maftukhin, M. (2016). Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 16(2), 337–352.
- Mansir, F. (2022). Problems of Islamic Religious Education in the Digital Era. *At-Ta'dib*, 17(2), 284. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v17i2.8405>
- Marwing, A., & Yunus. (2021). *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*. Bintang Pustaka Madani.
- Maslach, C. (2025). Job Burnout. *The ECPH Encyclopedia of Psychology*, 52, 779–779. https://doi.org/10.1007/978-981-97-7874-4_1217
- Mazid, & Suharno. (2019). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*.
- Meilani, F. (2023). Sinergi Orangtua-Guru dalam Membentuk Adab Santri di Kuttab Al-Fatih. *Jurnal Jendela Bunda Program Studi PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jjb.v11i2.4649>
- Meiranti, M. (2022). Modifikasi Penerapan Konsep-Konsep Dasar Komunikasi Publik dalam Kegiatan Dakwah Kontemporer. *Intercode: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 02(01), 1–7.
- Misbahudin, & Munawaroh, H. (2024). Analisis Pengaruh Tekanan Psikologis dan Beban Tugas terhadap Kesejahteraan

- Mental Santri: Studi Kasus. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 3(4), 331–335.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mubarok & Yusuf. (2024). Dakwah Dialogis dan Inklusivitas. *Jurnal Dakwah*.
- Musdalifah, N. (2020). Strategi Dakwah Islam di Era Digital. *Jurnal Dakwah*, 21(1), 1–20.
- Mustaqima, F. U. (2023). *Penerapan Retorika Dakwah di Ponpes Persatuan Islam Garut (Analisis Mengajar Ustadz Iqbal Santoso)*. 97–105.
- Muttaqin, J. (2022). Ulama Perempuan dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis. *Living Sufism: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 1(1), 92–104.
- Muyassaroh, I. S., Harto, U. S., Suparto, D., Permadi, D., & Sutjiatmi, S. (2024). Model Komunikasi Pendakwah pada Konten Dakwah dalam Isu Sosial dan Politik di Media Sosial. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2231–2241. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15480>
- Nadhifah, S. N., & Syakur, A. (2025). Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif al-Qur'an dan Hadis. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 557–568.
- Nadia, S., & Amanda, C. (2024). *Inovasi Dakwah di Era Digital Melalui Media Sosial*. 1, 108–122.
- Najwah, N. (2022). Dehumanization of Women by Da'iyah (Media Contest in Religious Lectures). *Jurnal Living Hadis*, 7(1), 75–95. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.3979>

- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nawangsih, Qodim, & Darwis. (2022). Pendidikan Multikultural untuk Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Nisa, I. S., & Kurniawan, M. R. (2024). Membangun Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Tinjauan Studi Gender. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–8.
- Nitah, S. Q. (2024). Media Sosial sebagai Platform Dakwah Interaktif dalam Membangun Dialog dan Silaturahmi. *Al-Idzaah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 145–147.
- Notonegoro, A. S. (2023). Hijrah sebagai New Social Movement? *Maarif*, 17(2), 52–69. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.194>
- Nurhayati, & Agustina. (2020). Kurikulum Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Inklusif*.
- Nurjannah, G. F. R. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1(1), 13–28.
- Nuwairah, N. (2014). Dakwah di Tengah Keragaman Masyarakat: Hakikat dan Strategi. *Alhadarah*, 13(25), 18.
- Prabowo, H. S. (2020). *Manusia dan Perubahan Iklim dalam Perspektif 6 (Enam) Agama di Indonesia*. Yayasan ICLE-Local Governments for Sustainability Indonesia.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(01), 20–33.
- Purnama, R., & Nurrachmi, R. (2024). Penguatan Halal Value Chain pada Klaster Makanan dan Minuman di Indonesia. *Irtiqo': Postgraduate Journal of Islamic Economics*,

Finance and Accounting Studies, 3(2), 222–246.

- Putri, Ferdiansyah, Akbar, & Ahmad. (2021). Kasus Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sukabumi. *Jurnal Studi Konflik*.
- Qodir, Z. (2023). Salafism in Rural Java: The Struggles of Indonesian Islam. *QIJIS*, 11(2), 247–255.
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial dalam Trend Global. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 151–161.
- Rahayu, & Baggio. (2024). Teknologi dalam Pendidikan Moderasi Beragama. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Rahman, F. (2017). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo41314165.html>
- Ramadhani, R., Nafila, K., Maharani, A., & Amalia, A. D. (2025). *Analisis Islamofobia terhadap Integrasi Muslim di Negara Minoritas Islam*. 02(01), 91–102. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8225>
- Ridwan, M. K. (2021). Jalan Baru Gerakan Moderasi Islam di Indonesia; Reagensi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah sebagai Basis Gerakan Moderasi. *Maarif*, 16(1), 60–78. <https://doi.org/10.47651/mrf.v16i1.134>
- Risdiana, A. (2014). Transformasi Peran Da'i dalam Menjawab Peluang dan Tantangan (Studi terhadap Manajemen SDM). *Jurnal Dakwah*, 15(2), 433–451.
- Riyadi. (2024). Program Pertukaran Budaya untuk Harmoni Sosial. *Jurnal Antropologi*.
- Rizal, S. (2020). Peran Perempuan dalam Dakwah. *Dakwatul Islam*, 5(1).

- Royani, M. I., Shohifur Rizal, M. A., & Kholik, K. (2024). Strategi Retorika Dakwah Gus Iqdam Untuk Menarik Minat Generasi Z. *Al-Ittishol Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
<https://doi.org/10.51339/ittishol.v5i2.2369>
- Rubbiyanah dan Ade Maturi. (2023). Pengantar Ilmu Dakwah. *Unpekalongan Ejournal.Ac.Id*, 19.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.
<https://academic.oup.com/book/10229>
- Safi, L. M. (2022). *Islam and the Trajectory of Globalization: Rational Idealism and the Structure of World History*. Taylor & Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003203360>
- Saloom, G. (2021). Understanding “Hijrah and Atonement” Among Indonesian Celebrities: Social Psychology and Psychology of Religion Perspectives. *Dialog*, 44(2), 204–215. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.480>
- Salsabia, A. Z., Saefullah, C., & Rojudin, R. (2024). Penerapan Metode Mujadalah dalam Dialog Antar Iman. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 8(1), 25–42.
<https://doi.org/10.15575/tabligh.v8i1.25140>
- Sari, J. K., Duraesa, M. A., & Tahir, M. (2024). *Strategi Komunikasi Islam dalam Konteks Dakwah*. 5(5).
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Sistem Ekonomi Syariah pada UMKM Halal melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Siddiqui, M., & Vette, N. (2022). *A Theology of Gratitude: Christian and Muslim Perspectives*. Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/us/universitypress/subject>

s/religion/theology/theology-gratitude-christian-and-muslim-perspectives?format=AR&isbn=9781009198394

- Slamet. (2020). Gerakan Salafi dan Deradikalisasi Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 262-267.
- Syaoki, M. (2017). Gerakan Islam Transnasional dan Perubahan Peta Dakwah di Indonesia. *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 9(2), 167–182. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/download/1293/669>
- Sholichati, & Janitra. (2021). Pendidikan Toleransi melalui Dialog. *Jurnal Pendidikan Multikultural*.
- Sholihin, A. S. (2025). Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 637–646.
- Sitepu. (2023). Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Sugitanata, A. (2020). Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga terhadap Egaliter Laki-laki dan Perempuan. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2), 303–318.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesenjangan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Suliyati, S. (2024). Retorika Dakwah dalam Ceramah Dennis Lim Berjudul “Akselerasi Taqwa.” *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 457–476. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i2.48>
- Sunarto, Z., & Sasmianti, M. (2020). Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal Untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 4(2), 151–161.

- Sungkawaningrum, F., & Nasrullah, A. (2019). *Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal*.
- Suryaningsih, S., & Gunawan, T. (2023). Hegemoni Pesantren Bahrul Ulum di Desa Tambak Rejo, Jombang. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(10), 964–975. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i10.1773>
- Syafitri, G. D., & Arief, E. (2023). Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Video Ceramah Ustadzah Oki Setiana Dewi pada Media Youtube. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 139–152.
- Syahda, A., Shanie, A., Nurul, Y., & Apriliyana, N. (2024). *Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Sikap Moderat untuk Mengatasi Islamofobia*. 1.
- Syahyuti. (2013). Konflik Sosial dan Integrasi Nasional. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
- Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. UMSU Press.
- Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81.
- Ubaidillah. (2012). Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal*, 13(1), 43.
- Ulfa, F., & Efrina, E. (2024). Relevansi Metode Dakwah Hamka dan Implementasinya di Indonesia. *JCSS*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.61994/jcss.v2i1.604>
- Umdatul Hasanah. (2020). Retorika Dakwah Kontemporer. In *Media Madani*.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press. <https://www.jstor.org/stable/1051560>
- Wahid, A. (2019). *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi*

Antarbudaya. Prenada Media.

- Wardi Suhra. (2024). Fenomena Gerakan Hijrah dan Ekstrimisme pada Pemuda Muslim. *Farabi*, 21(2), 189–206. <https://doi.org/10.30603/jf.v21i2.4356>
- Warto, W., Nurlaila, L., & Khumaini, S. (2024). Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(1), 72–84.
- Widigdo, M. S. A. (2018). Gerakan Islam Indonesia: Mengurai Belenggu, Membangun Peradaban. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2222>
- Windi Triyana, D. (2021). Hijrah: Tren Keberagaman Kaum Milenial di Indonesia. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Yani, Samudro, & Madjid. (2020). Globalisasi dan Tantangan Inklusivitas. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Zaeni, A., & Zainuri, Z. (2023). Memahami Gerakan Islam Transnasional (Studi Kasus di Indonesia, Brunei, dan Thailand). *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i1.26>
- Zafri, N. D., Opir, H., & Yahaya, A. M. (2023). Dakwah Interaktif terhadap Golongan Belia Melalui Media Sosial. *Journal of Fatwa Management and Research*, 28(2), 54–69. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.528>
- Zahara, M. N., Wildan, D., & Komariah, S. (2020). Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital. *Indonesian Journal of Sociology Education and Development*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i1.21>
- Zakaria Al-Anshori, M., & Fattah, A. (2018). Metode Dakwah dalam Upaya Meningkatkan Pengamalan Islam pada Masyarakat. *Jurnal Al-Nashihah*, 2(2), 86–101.

GLOSARIUM

1. Islamofobia dan Dakwah Global

Islamofobia: ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam dan umat Muslim.

Dakwah global: upaya menyampaikan pesan Islam secara lintas negara dan budaya.

Sekularisme: paham yang memisahkan agama dari urusan publik dan pemerintahan.

Minoritas Muslim: komunitas Muslim yang hidup dalam negara dengan mayoritas non-Muslim.

2. Gerakan Hijrah dan Generasi Milenial

Hijrah: perpindahan atau transformasi spiritual seseorang menuju kehidupan Islam yang lebih taat.

Krisis eksistensial: kegelisahan atau pencarian makna hidup di kalangan anak muda.

Komunitas dakwah digital: kelompok yang menyebarkan dakwah melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dll.

Prestise religius: citra dan gengsi yang diasosiasikan dengan gaya hidup religius.

3. Pluralisme dan Dakwah Multikultural

Pluralisme keagamaan: pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman keyakinan.

Intoleransi: penolakan terhadap kelompok atau keyakinan lain.

Ahmadiyah: kelompok minoritas dalam Islam yang sering mendapat diskriminasi di Indonesia.

4. Gender dan Dakwah Perempuan

Daiyah: perempuan yang berdakwah.

Keadilan gender: kesetaraan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek.

Komunikasi digital perempuan: penggunaan media sosial oleh daiyah untuk menyampaikan pesan keagamaan.

Gerakan keagamaan perempuan: inisiatif dakwah yang dipimpin atau difokuskan untuk perempuan.

5. Dakwah dan Lingkungan Hidup

Ekoteologi Islam: konsep teologi Islam yang berbasis pada pelestarian lingkungan.

Khalifah: manusia sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam.

Krisis ekologis: Kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari ulah manusia.

6. Dakwah dan Politik

Politik keagamaan: integrasi ajaran agama dalam ranah politik.

Polarisasi politik: pembelahan tajam dalam masyarakat akibat ideologi politik, termasuk yang berbasis agama.

Islamisme: gerakan yang ingin menegakkan hukum Islam dalam sistem kenegaraan.

7. Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Ekonomi Islam: sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Kapitalisme halal: penggunaan simbol keislaman dalam pasar komersial.

Industri halal: sektor bisnis yang memenuhi standar kehalalan produk menurut Islam.

8. Kesehatan Mental dan Dakwah

Burnout santri: kelelahan mental dan spiritual yang dialami santri karena tekanan akademik dan spiritual.

Psikologi Islami: pendekatan psikologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

Pesantren humanis: lembaga pendidikan Islam yang juga memperhatikan kesejahteraan mental peserta didik.

9. Dakwah di Dunia Hiburan

Nasyid: lagu religi Islami.

Komersialisasi dakwah: proses menjadikan aktivitas dakwah sebagai komoditas pasar.

Fenomena “Hafiz Indonesia”: program televisi yang menampilkan anak-anak penghafal al-Qur'an dan aspek kontroversialnya dalam konteks etika dakwah.

10. Gerakan Dakwah Transnasional

Salafisme: Gerakan yang ingin kembali ke praktik Islam generasi pertama.

Gerakan transnasional: Gerakan keagamaan lintas batas negara.

Puritanisme Islam: Pendekatan keislaman yang sangat literal dan skriptural.

11. Evaluasi dan Refleksi Dakwah Kontemporer

Komunikasi dakwah: Proses menyampaikan ajaran Islam yang menyesuaikan konteks audiens.

Dakwah partisipatoris: Pendekatan dakwah yang melibatkan audiens secara aktif.

Transformasi sosial Islam: Perubahan masyarakat ke arah yang lebih adil dan manusiawi berdasarkan nilai-nilai Islam.

BIODATA PENULIS



Sokhi Huda adalah Associate Professor pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Secara profesional, ia adalah dosen Filsafat Islam, dengan konsentrasi mayor Studi Etika Dakwah dan Sufisme. Dia mendapat kepercayaan untuk mengajar beberapa matakuliah di sejumlah Fakultas dan Pacasarjana. Dia pernah terlibat sebagai *reviewer* di sejumlah proyek penelitian, prosiding, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional. Karya karyanya terkoleksi di Google Scholar ID:

[https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user= u6s1QgAAAAJ](https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=u6s1QgAAAAJ),
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0707-6887>, Scopus ID:
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59907862000&or igin=recordpage>



Hesty Putri Utami adalah Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedara professional, ia adalah Supervisor di PT Fatikha Jagad Rejeki yang bergerak di bidang digital marketing. Dia aktif dalam sosial media dan aktif di beberapa penelitian tentang dakwah. Pengembangan teknologi menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan dakwah.

Bagi Hesty, dakwah bukan hanya menyampaikan pesan kebaikan tetapi menyebarkan pesan kebaikan kepada siapapun menjadi fokus utama agar dakwah bukan hanya sebagai pengingat, tetapi sebagai alarm yang muncul setiap kali *scrolling handphone*.



Ahsanul Izzah lahir di Sampit, 6 April 2000. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di tahun 2022 pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik, yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Kia Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik. Saat ini, ia menetap di salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah Gresik kota. Selain menulis,

Ahsanul juga memiliki minat dan keterampilan dalam bidang seni fotografi. Ia aktif sebagai fotografer lepas (freelance) dan menjadikan fotografi sebagai media ekspresi kreatif di sela aktivitasnya. Saat ini, ia juga sedang menempuh pendidikan magister (S2) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Melalui buku *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer*, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia dakwah serta terus berkembang dalam ranah keilmuan dan kreativitas. Semoga karya ini menjadi langkah awal yang membuka jalan bagi kiprah yang lebih luas di masa mendatang.



Farah Najela, lahir di Pamekasan pada 4 November 2000. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Trunojoyo Madura dengan jurusan Ilmu Komunikasi 2019. Saat ini, tengah menempuh studi strata dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selama berkuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan program pengembangan diri serta organisasi

yang dapat mendukung pengalaman praktisnya dalam dunia komunikasi. Penulis juga aktif dalam menulis artikel serta karya tulis ilmiah, yang telah terbit di berbagai jurnal berskala nasional. Melalui karya tulis ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran dakwah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak, berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi zaman kedepannya.



Mochammad Afif Jalla, lahir di Pasuruan pada 01 Juni 1998. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Darut Taqwa Pasuruan dengan jurusan Teknik Informatika 2017. Saat ini, tengah menempuh studi strata dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selama berkuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan program pengembangan diri serta organisasi yang dapat mendukung pengalamannya dalam dunia komunikasi. Penulis juga aktif dalam menulis artikel serta karya tulis ilmiah. Melalui karya tulis ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran dakwah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak, berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi zaman kedepannya.



Dina Rahmawati, perempuan asal Sidoarjo yang lahir pada 1 Oktober 2000, dan masih terus belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri hingga saat ini. Setelah menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Surabaya jurusan Ilmu Komunikasi, saya memutuskan untuk melanjutkan studi magister di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk memperdalam pemahaman tentang komunikasi berbasis nilai keislaman. Sebagai seorang perempuan, saya ingin tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tetap dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Saya percaya bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan untuk menebar manfaat lewat tindakan, tulisan, atau bahkan percakapan keseharian. Meskipun sederhana, saya ingin setiap langkah yang saya ambil bisa memberi arti, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar, dan menjadi bekal untuk terus tumbuh dalam proses kehidupan yang terus berjalan.



M. Rufful Athfal, lahir di Banda Aceh pada 16 Februari 2001. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2023. Saat ini, tengah menempuh studi strata dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selama berkuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan program pengembangan diri serta organisasi

Yang dapat mendukung pengalamannya dalam dunia komunikasi. Penulis juga aktif dalam menulis artikel serta karya tulis ilmiah, yang telah terbit di berbagai jurnal berskala nasional. Melalui karya tulis ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat peran dakwah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak, berpikir kreatif dan berinovasi dalam menghadapi zaman kedepannya.



Ali Murtadlo, lahir di Surabaya pada 29 Juli 1978. Menyelesaikan studi strata satu di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004. Sekarang tengah menempuh studi strata dua di kampus yang sama dimana sekarang berubah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) di strata satu, penulis mengambil penelusuran minat dan bakat di bidang jurnalistik. Pengalaman jurnalistiknya pernah

mengikuti kegiatan jurnalistik di salah satu media cetak di kota Surabaya. Pada studi strata dua ini pun menempuh jurusan yang sama yakni Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selain menempuh kegiatan akademis, penulis juga mengembangkan karir di dunia kerja pada sebuah perusahaan penerbitan buku yang memiliki kantor pusat di Bogor Jawa Barat.



Andik Khoirul Iman, putera daerah asli Probolinggo, lahir pada 4 April 2000, penulis memotivasi diri untuk terjun dan bergelut di bidang Al-Qur'an, Masjid dan Dakwah. Pernah nyantri di Pesantren Ma'had Al-Muqaddasah untuk menghafal Al-Qur'an dan melanjutkan hafalan Al-Quran Rumah tahfidz Darul Quran di Probolinggo. Mengambil Program Pendidikan S1 Manajemen Dakwah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya untuk mempelajari bagaimana manajemen dakwah di lingkup masjid. Segala ikhtiar ini tentu tak lepas dari perjuangan, serta lantunan doa yang terus mengiringi dari orang tua, saudara, dan orang-orang tercinta yang senantiasa menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan ini.



Fidaul Qonita, lahir di Surabaya pada 27 Juni 1997. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan mengambil konsentrasi di public relations atau hubungan masyarakat di tahun 2015. Sekarang tengah menempuh studi strata dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selama berkuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik serta organisasi kemahasiswaan yang mendukung perkembangan ilmu komunikasi. Penulis juga aktif dalam menulis artikel serta karya tulis ilmiah, yang telah terbit di berbagai jurnal berskala nasional. Penulis juga berkerja di PT. Global Ultima Surabaya sebagai media sosial spesialis. Melalui tulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dakwah yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.



Lalu Mirwazi, lahir di Lombok pada 2 Juli 1992. Menyelesaikan studi strata satu di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dengan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang tengah menempuh Studi Strata Dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Selama kuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik serta

organisasi kemahasiswaan yang mendukung perkembangan ilmu komunikasi. Penulis juga berkerja di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai dosen. Melalui tulisan buku ini, penulis berharap setiap kata yang tertulis menjadi lentera, menerangi jalan dakwah di luasnya dunia digital. Serta ide-ide yang terangkai menjadi jembatan yang menghubungkan hati, menyampaikan pesan kebaikan dengan sentuhan zaman.



Mohamad Febrianto, lahir di Surabaya pada 12 Februari 2000. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada tahun 2018 dengan program studi Manajemen Dakwah. Selama masa kuliah, penulis lebih banyak menjalani peran sebagai mahasiswa yang fokus pada proses perkuliahan dan pengembangan diri secara mandiri. Meskipun tidak aktif dalam organisasi formal, penulis tetap memelihara

minat yang kuat terhadap wacana dakwah dan pengembangan keilmuan Islam. Saat ini, penulis tengah menempuh studi strata dua di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Penulis memiliki ketertarikan pada studi dakwah kontemporer, media digital keislaman, serta pendekatan-pendekatan kreatif dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang relevan dengan perkembangan sosial. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran dakwah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak, berpikir kreatif, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman ke depan.

ISU DAN SOLUSI DAKWAH KONTEMPORER

Di tengah arus deras globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial modern, dakwah Islam menghadapi tantangan yang semakin dinamis dan multidimensi. Buku *Isu dan Solusi Dakwah Kontemporer* hadir sebagai ikhtiar intelektual untuk menjawab problematika dakwah masa kini melalui pendekatan faktual, reflektif, dan solutif.

Berbasis studi kasus aktual dari berbagai konteks—mulai dari Islamofobia global, pluralisme keagamaan, hijrah milenial, isu gender, krisis lingkungan, hingga dakwah di dunia hiburan—buku ini menggambarkan wajah dakwah yang penuh warna dan menuntut strategi baru yang kontekstual dan humanis.

Disusun oleh para akademisi dan praktisi dakwah, setiap bab dalam buku ini menawarkan analisis tajam dan solusi aplikatif untuk menjawab persoalan dakwah yang terus berkembang. Dengan pendekatan interdisipliner dan semangat transformasi sosial, buku ini menjadi rujukan penting bagi para dai, peneliti, dan pembaca yang peduli terhadap masa depan dakwah Islam.

Dakwah merupakan penyampaian pesan moral dan juga panggilan untuk menjadi agen perubahan. Buku ini mengajak pembaca untuk mereformulasi paradigma dakwah: dari normatif menuju transformatif, dari dogmatis menuju partisipatif, dari eksklusif menuju inklusif.



Penerbit *Cakrawala Satria Mandiri*
Email: redoksi.satria@gmail.com
www.cakrawalasatria.co.id
Anggota IKAPI

ISBN 978-634-7293-05-3



9

786347

293053